



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib kearsipan dan administrasi penyelenggaraan pengelolaan persuratan serta sinkronisasi informasi kearsipan, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 045.1/1.16 Tahun 2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Kota Surakarta perlu dicabut dan disesuaikan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, maka Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pedoman Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, perlu dicabut dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Kode Klasifikasi Arsip . . .

Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
5. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah Perangkat Daerah yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Statis dan pembinaan Arsip di Daerah.
6. Unit Kerja adalah satuan kerja atau unit yang menjalankan salah satu tugas dan fungsi organisasi.
7. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
8. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
9. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
10. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh instansi vertikal, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
11. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
12. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

13. Arsip . . .

13. Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional Pencipta Arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
14. Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
15. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
16. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga Kearsipan.
17. Arsip Terjaga adalah Arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
18. Arsip Umum adalah Arsip yang tidak termasuk dalam kategori Arsip Terjaga.
19. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
20. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan Arsip Dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
21. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
22. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
23. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
24. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis adalah merupakan aturan pembatasan hak akses terhadap fisik Arsip dan informasinya sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan Arsip dalam rangka melindungi hak dan kewajiban Pencipta Arsip dan pengguna dalam pelayanan Arsip.

25. Tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengelompokkan Arsip dalam tingkatan tertentu berdasarkan dampak yang ditimbulkan apabila informasi yang terdapat di dalamnya diketahui oleh pihak yang tidak berhak.
26. Klasifikasi Keamanan Arsip yang bersifat terbatas yang selanjutnya disebut Terbatas adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
27. Klasifikasi Keamanan Arsip yang bersifat biasa/umum/terbuka yang selanjutnya disebut Biasa/Umum/Terbuka adalah Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
28. Klasifikasi Keamanan Arsip yang bersifat rahasia yang selanjutnya disebut Rahasia adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro dan apabila informasi yang terdapat pada Arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi.
29. Klasifikasi Keamanan Arsip yang bersifat sangat rahasia yang selanjutnya disebut Sangat Rahasia adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
30. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan membuka informasi publik dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
31. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis.
32. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.

33. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan Arsip bagi kepentingan pengguna Arsip yang berwenang.
34. Pengguna Arsip adalah orang atau unit kerja yang mempunyai hak akses untuk menggunakan Arsip.
35. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan Arsip dan berasal dari lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
36. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
37. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi Kearsipan.
38. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
39. Arsip Fasilitatif adalah Arsip yang berkaitan dengan bidang fasilitatif yang mana merupakan Arsip pendukung yang mencerminkan tugas dan fungsi pendukung instansi.
40. Arsip Substantif adalah Arsip yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unit Pencipta Arsip merupakan Arsip pokok yang mencerminkan tugas dan fungsi utama instansi.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Kode Klasifikasi Arsip;
- b. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; dan
- c. Pengaturan Akses Arsip.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan Arsip Dinamis;
- b. mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya sinkronisasi informasi kearsipan antara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam implementasi Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. mewujudkan tertib Arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Surakarta; dan
- d. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali Arsip.

BAB III

KODE KLASIFIKASI ARSIP

Bagian Kesatu

Klasifikasi Arsip Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta Arsip yang meliputi:
 - a. fungsi fasilitatif; dan
 - b. fungsi substantif.
- (3) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

(4) Fungsi . . .

- (4) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.

Bagian Kedua Klasifikasi Arsip Berdasarkan Urusan

Pasal 5

- (1) Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan fungsi dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka, yaitu:
- a. 000 Umum;
 - b. 100 Pemerintahan;
 - c. 200 Politik;
 - d. 300 Keamanan Ketertiban;
 - e. 400 Kesejahteraan Rakyat;
 - f. 500 Perekonomian;
 - g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan;
 - h. 700 Pengawasan;
 - i. 800 Kepegawaian; dan
 - j. 900 Keuangan.
- (3) Klasifikasi Arsip terbagi menjadi beberapa urusan sebagai berikut:
- a. urusan umum, terdiri dari:
 1. urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 2. urusan perlengkapan;
 3. urusan pengadaan;
 4. urusan perpustakaan;
 5. urusan kearsipan;
 6. urusan persandian;
 7. urusan perencanaan pembangunan;
 8. urusan organisasi dan tata laksana; dan
 9. urusan penelitian, pengkajian dan pengembangan;
 - b. urusan pemerintahan, terdiri dari:
 1. urusan otonomi daerah;
 2. urusan pemerintahan umum; dan

3. urusan . . .

3. urusan hukum;
- c. urusan politik, terdiri dari:
 1. urusan kesatuan bangsa dan politik; dan
 2. urusan pemilihan umum;
- d. urusan keamanan dan ketertiban, terdiri dari:
 1. urusan satuan polisi pamong praja; dan
 2. urusan penanggulangan bencana, pencarian dan pertolongan;
- e. urusan kesejahteraan rakyat, terdiri dari:
 1. urusan pembangunan daerah tertinggal;
 2. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. urusan pendidikan;
 4. urusan keolahragaan;
 5. urusan kepemudaan;
 6. urusan kebudayaan;
 7. urusan kesehatan;
 8. urusan agama dan kepercayaan;
 9. urusan sosial;
 10. urusan pemberdayaan masyarakat desa;
 11. urusan pertamanan dan pemakaman;
 12. urusan kependudukan dan catatan sipil;
 13. urusan keluarga berencana; dan
 14. urusan hubungan masyarakat;
- f. urusan perekonomian, terdiri dari:
 1. urusan ketahanan pangan;
 2. urusan perdagangan;
 3. urusan koperasi dan usaha kecil menengah;
 4. urusan kehutanan;
 5. urusan kelautan dan perikanan;
 6. urusan pertanian;
 7. urusan peternakan;
 8. urusan perkebunan;
 9. urusan perindustrian;
 10. urusan energi dan sumber daya mineral;
 11. urusan perhubungan;
 12. urusan komunikasi dan informatika;
 13. urusan pariwisata dan ekonomi kreatif;

14. urusan . . .

14. urusan statistik;
 15. urusan ketenagakerjaan;
 16. urusan penanaman modal;
 17. urusan pertanahan; dan
 18. urusan transmigrasi;
 - g. urusan pekerjaan umum dan ketenagaan, terdiri dari:
 1. urusan pekerjaan umum;
 2. urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 3. urusan tata ruang (tata kota); dan
 4. urusan lingkungan hidup;
 - h. urusan pengawasan internal;
 - i. urusan kepegawaian, terdiri dari:
 1. urusan sumber daya manusia; dan
 2. urusan pendidikan dan pelatihan;
 - j. urusan keuangan daerah.
- (4) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali Arsip.
- (5) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 6

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan pemerintah Kota Surakarta ini dimaksudkan untuk:
- a. mendorong unit kerja agar memberkaskan Arsip Dinamis unit kerjanya secara tertib sesuai tugas dan fungsi yang disertai dengan daftar Arsip Aktifnya;
 - b. memberikan petunjuk kepada unit kerja agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi Arsip yang telah ditetapkan;
 - c. melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas Arsip dapat tetap terjaga; dan
- c. melindungi . . .

- d. melindungi Arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
 - e. menyediakan informasi Arsip yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses bagi kepentingan publik serta menjamin keamanan Arsip bagi informasi yang di kecualikan.
- (2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta ini bertujuan untuk:
- a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
 - b. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, dan aman;
 - c. tersedianya informasi Arsip di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang dikategorikan Terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan lampiran Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
 - d. terjaminnya keamanan Arsip bagi informasi yang dikecualikan; dan
 - e. terciptanya kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Asas Klasifikasi

Pasal 7

Ruang Lingkup Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan pemerintah Kota Surakarta mencakup:

- a. klasifikasi keamanan Arsip dinamis, memuat informasi Biasa/Umum/ Terbuka, Terbatas, Rahasia dan Sangat Rahasia;
- b. pengamanan Arsip dinamis, memuat pengamanan ruang simpan, penentuan pengelola Arsip, serta daftar informasi Terbatas, Rahasia dan Sangat Rahasia; dan
- c. klasifikasi dan pengaturan akses Arsip dinamis, memuat pengguna internal dan pengguna eksternal.

Pasal 8

- (1) Asas klasifikasi keamanan dan akses Arsip dinamis di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.
- (3) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyusunan dan penerapan pedoman, standar operasional prosedur, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

Bagian Kedua

Tingkat Klasifikasi Informasi dan Sarana Penyimpanan

Pasal 9

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan pemerintah Kota Surakarta diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Arsip yang tercipta pada unit kerja Pencipta Arsip dapat diklasifikasikan menjadi informasi:
 1. Biasa/Umum/Terbuka;
 2. Terbatas;
 3. Rahasia; dan
 4. Sangat Rahasia.
 - b. tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
 - c. tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya; dan
 - d. publik dapat mengakses informasi yang dikategorikan Biasa/Umum/Terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- (2) Sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka.

Pasal 10

- (1) Sarana klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis Pemerintah Kota Surakarta menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa *filling cabinet*/rak Arsip untuk menyimpan Arsip Biasa/Umum/Terbuka;
 - b. brangkas atau almari besi untuk penyimpanan Arsip terbatas, rahasia dan sangat rahasia;
 - c. sarana penyimpanan Arsip media baru berupa almari Arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - d. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. daftar Arsip Aktif, Arsip Inaktif, Arsip Terjaga dan Arsip Vital;
 - b. aplikasi pengelolaan Arsip Aktif dan Arsip Inaktif.

Bagian Ketiga

Pengamanan Tingkat Klasifikasi

Pasal 11

- (1) Tingkat Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis bagi Pencipta Arsip dalam pelaksanaan pengamanan fisik Arsip Dinamis maupun informasinya sesuai dengan tingkat klasifikasi, meliputi:
 - a. penyimpanan; dan
 - b. penyampaian.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rangka penanganan fisik maupun informasi Arsip Dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. media Arsip;
 - b. pengaturan pengguna Arsip; dan
 - c. prasarana dan sarana Arsip.

Bagian Keempat
Penyimpanan

Pasal 12

Penyimpanan dalam rangka penanganan fisik maupun informasi Arsip dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi dengan memperhatikan media Arsip, pengaturan pengguna Arsip, dan prasarana dan sarana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Arsip konvensional; dan
- b. Arsip elektronik.

Paragraf 1

Penyimpanan Arsip Konvensional dengan Klasifikasi Keamanan
Biasa/Umum/Terbuka

Pasal 13

- (1) Penyimpanan Arsip konvensional dengan klasifikasi keamanan Biasa/Umum/Terbuka untuk media Arsip tidak ada persyaratan dan prosedur khusus.
- (2) Penyimpanan Arsip konvensional dengan klasifikasi keamanan Biasa/Umum/Terbuka untuk pengguna Arsip, pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses tidak ada persyaratan dan prosedur khusus.
- (3) Penyimpanan Arsip konvensional dengan klasifikasi keamanan Biasa/Umum/Terbuka untuk prasarana dan sarana Arsip, tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus.

Paragraf 2

Penyimpanan Arsip Konvensional dengan Klasifikasi Keamanan Terbatas

Pasal 14

- (1) Penyimpanan Arsip konvensional dengan klasifikasi keamanan Terbatas untuk media Arsip ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap “TERBATAS” pada fisik Arsip.
- (2) Penyimpanan Arsip konvensional dengan klasifikasi keamanan Terbatas untuk pengguna Arsip dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum.

(3) Penyimpanan . . .

- (3) Penyimpanan Arsip konvensional dengan klasifikasi keamanan Terbatas untuk prasarana dan sarana Arsip diperlukan tempat penyimpanan yang aman.

Paragraf 3

Penyimpanan Arsip Konvensional dengan Klasifikasi Keamanan Rahasia

Pasal 15

- (1) Penyimpanan Arsip konvensional dengan klasifikasi keamanan Rahasia untuk media Arsip ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap “RAHASIA” pada fisik Arsip dan tidak sembarangan meletakkan Arsip/dokumen yang bersifat Rahasia.
- (2) Penyimpanan Arsip konvensional dengan klasifikasi keamanan Rahasia untuk pengguna Arsip dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum.
- (3) Penyimpanan Arsip konvensional dengan klasifikasi keamanan Rahasia untuk prasarana dan sarana Arsip, lokasi aman dengan akses yang dibatasi.

Paragraf 4

Penyimpanan Arsip Konvensional dengan Klasifikasi Keamanan Sangat Rahasia

Pasal 16

- (1) Penyimpanan Arsip konvensional dengan klasifikasi keamanan Sangat Rahasia untuk media Arsip ada persyaratan dan prosedur Rahasia dengan memberikan cap “SANGAT RAHASIA” pada fisik Arsip.
- (2) Penyimpanan Arsip konvensional dengan klasifikasi keamanan Sangat Rahasia untuk pengguna Arsip dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan dan penegak hukum.
- (3) Penyimpanan Arsip konvensional dengan klasifikasi keamanan Sangat Rahasia untuk prasarana dan sarana Arsip, disimpan dalam zona yang sangat aman dengan penelusuran jejak akses dan penerapan kebijakan “Meja Harus Bersih”.

Paragraf 5

Penyimpanan Arsip Elektronik dengan Klasifikasi Keamanan
Biasa/Umum/Terbuka

Pasal 17

- (1) Penyimpanan Arsip elektronik dengan klasifikasi keamanan Biasa/Umum/Terbuka untuk media Arsip dilakukan rekam cadang/ *backup* secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autensitas Arsip.
- (2) Penyimpanan Arsip elektronik dengan klasifikasi keamanan Biasa/Umum/Terbuka untuk pengguna Arsip, pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.
- (3) Penyimpanan Arsip elektronik dengan klasifikasi keamanan Biasa/Umum/Terbuka untuk prasarana dan sarana Arsip, tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus.

Paragraf 6

Penyimpanan Arsip Elektronik dengan Klasifikasi Keamanan Terbatas

Pasal 18

- (1) Penyimpanan Arsip elektronik dengan klasifikasi keamanan Terbatas untuk media Arsip dilakukan rekam cadang/ *backup* secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin keaslian Arsip dan file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak eksternal.
- (2) Penyimpanan Arsip elektronik dengan klasifikasi keamanan Terbatas untuk Pengguna Arsip, autentikasi pengguna (nama pengguna/kata sandi (*password*) atau identitas digital) dan penggunaan untuk *log in* pada tingkat individual.
- (3) Penyimpanan Arsip elektronik dengan klasifikasi keamanan Terbatas untuk prasarana dan sarana Arsip, meliputi:
 - a. autentikasi server;
 - b. langkah-langkah keamanan dengan sistem operasional khusus atau aplikasi khusus; dan
 - c. *firewall* dan sistem serta prosedur deteksi terhadap intrusi.

Paragraf 7

Penyimpanan Arsip Elektronik dengan Klasifikasi Keamanan Rahasia

Pasal 19

- (1) Penyimpanan Arsip elektronik dengan klasifikasi keamanan Rahasia untuk media Arsip dilakukan rekam cadang/*backup* secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin keaslian Arsip dan file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak eksternal.
- (2) Penyimpanan Arsip elektronik dengan klasifikasi keamanan Rahasia untuk Pengguna Arsip, hanya staf yang ditunjuk oleh organisasi dan tingkat di atasnya yang dapat mengakses Arsip tersebut, autentikasi Pengguna (nama pengguna/kata sandi (*password*) atau identitas digital), dan penggunaan untuk *log in* pada tingkat individual.
- (3) Penyimpanan Arsip elektronik dengan klasifikasi keamanan Rahasia untuk prasarana dan sarana Arsip, langkah-langkah keamanan dengan sistem operasional khusus atau aplikasi khusus dan *firewall* serta sistem dan prosedur deteksi terhadap intrusi.

Paragraf 8

Penyimpanan Arsip Elektronik dengan Klasifikasi Keamanan Sangat Rahasia

Pasal 20

- (1) Penyimpanan Arsip elektronik dengan klasifikasi keamanan Sangat Rahasia untuk media Arsip dilakukan rekam cadang/*backup* secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin keaslian Arsip dan file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak eksternal.
- (2) Penyimpanan Arsip elektronik dengan klasifikasi keamanan Sangat Rahasia untuk Pengguna Arsip, autentikasi pengguna (nama pengguna/kata sandi (*password*) atau identitas digital), dan penggunaan untuk *log in* pada tingkat individual.

(3) Penyimpanan . . .

- (3) Penyimpanan Arsip elektronik dengan klasifikasi keamanan Sangat Rahasia untuk prasarana dan sarana Arsip, autentikasi server, langkah-langkah keamanan dengan sistem operasional khusus atau aplikasi khusus serta *firewall* dan sistem dan prosedur deteksi terhadap intrusi.

Bagian Kelima
Penyampaian

Pasal 21

- (1) Penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dalam rangka penanganan fisik maupun informasi Arsip Dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi dilakukan dengan memperhatikan cara pengiriman.
- (2) Penyampaian Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Arsip konvensional; dan
 - b. Arsip elektronik.

Paragraf 1

Penyampaian Arsip Konvensional

Pasal 22

- (1) Penyampaian Arsip konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dengan klasifikasi keamanan Biasa/Umum/Terbuka tidak ada persyaratan khusus.
- (2) Penyampaian Arsip konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dengan klasifikasi keamanan Terbatas amplop harus disegel.
- (3) Penyampaian Arsip konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dengan klasifikasi Rahasia, harus:
 - a. menggunakan warna kertas yang berbeda;
 - b. diberi kode Rahasia;
 - c. menggunakan amplop ganda;
 - d. amplop segel, stempel Rahasia;
 - e. konfirmasi tanda terima; dan
 - f. harus dikirim melalui orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengendalian Arsip/dokumen Rahasia.

(4) Penyampaian . . .

- (4) Penyampaian Arsip konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dengan klasifikasi Sangat Rahasia, harus:
- menggunakan warna kertas yang berbeda;
 - menggunakan amplop ganda bersegel;
 - audit jejak untuk setiap titik akses (misal: tandatangan); dan
 - harus dikirim melalui orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengendalian Arsip/dokumen Rahasia.

Paragraf 2

Penyampaian Arsip Elektronik

Pasal 23

- (1) Penyampaian Arsip elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dengan klasifikasi keamanan Biasa/Terbuka tidak ada prosedur khusus.
- (2) Penyampaian Arsip elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dengan klasifikasi keamanan Terbatas, apabila pesan elektronik atau surel berisi data tentang informasi personal, harus menggunakan enkripsi, surel yang dikirim dengan alamat khusus, kata sandi (*password*), dan lain-lain.
- (3) Penyampaian Arsip elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dengan klasifikasi keamanan Rahasia, harus:
- ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau surel;
 - menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau surel Rahasia; dan
 - menggunakan persandian atau kriptografi.
- (4) Penyampaian Arsip elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dengan klasifikasi keamanan Sangat Rahasia, harus:
- ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau surel;
 - menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau surel Rahasia;
 - menggunakan persandian atau kriptografi; dan
 - harus ada pelacakan akses informasi untuk suatu pesan elektronik atau surel.

BAB V

PENGATURAN AKSES ARSIP

Pasal 24

- (1) Pengaturan akses Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c digunakan kepada pengguna Arsip yang berwenang.
- (2) Pengguna Arsip yang berhak mengakses Arsip terdiri dari:
 - a. Pengguna Internal di dalam instansi; dan
 - b. Pengguna Eksternal di luar instansi.
- (3) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. Wali Kota sebagai pimpinan tingkat tertinggi di daerah, dapat mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 - b. sekretaris daerah, sebagai pimpinan tingkat tinggi di daerah, dapat mengakses Arsip di bawah kewenangannya, tapi tidak dapat mengakses informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi dan yang satu tingkat dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin;
 - c. asisten sekretaris daerah dan staf ahli Wali Kota, sebagai pimpinan tingkat tinggi di daerah, dapat mengakses seluruh Arsip sesuai bidangnya setelah mendapatkan izin dari pimpinan tinggi yang terkait;
 - d. kepala perangkat daerah dan pejabat eselon III (sekretaris/kepala bidang/kepala bagian/camat), sebagai pimpinan tingkat menengah, dapat mengakses seluruh Arsip di bawah kewenangannya, namun tidak dapat mengakses informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi dan yang satu tingkat di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin;
 - e. pejabat eselon IV (kepala seksi, kepala subbagian, lurah), sub koordinator, fungsional arsiparis, dan aparatur sipil negara jabatan pelaksana hanya dapat mengakses seluruh Arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa tetapi tidak diberikan hak akses untuk Arsip dengan tingkat klasifikasi Terbatas, Rahasia, dan Sangat Rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan tingkat menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin; dan
 - f. pengawas . . .

- f. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pengawas eksternal, mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. aparat penegak hukum, mempunyai hak untuk mengakses Arsip pada Pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum, setelah mendapatkan izin dari pimpinan tertinggi; dan
 - c. publik, dapat mengakses informasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dikategorikan terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengaturan akses Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengamanan fisik dan informasi Arsip.
- (2) Pengamanan fisik dan informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (*closed-circuit television/ CCTV*), kunci pengamanan ruangan dan media simpan Arsip.
- (3) Pengamanan fisik dan informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kategori Arsip Biasa/Umum/Terbuka disimpan dalam rak besi;
 - b. kategori Arsip Terbatas disimpan dalam filling cabinet/rak Arsip; dan
 - c. kategori Arsip Rahasia dan Sangat Rahasia disimpan dalam almari besi.
- (4) Pengamanan fisik dan informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penciptaan daftar Arsip Terbatas dan daftar Arsip Rahasia.

(5) Pengamanan . . .

- (5) Pengamanan fisik dan informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Arsiparis dan/atau petugas kearsipan yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola dan mengamankan fisik serta informasi Arsip.

Pasal 26

Pengaturan akses Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disusun dalam daftar Arsip dinamis berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka:

- a. Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 045.1/1.16 Tahun 2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Kota Surakarta; dan
- b. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 57 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 Maret 2025

WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA

- 000 UMUM
 - 000.1 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN
 - 000.1.1 Telekomunikasi
 - 000.1.2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 - 000.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
 - 000.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD
 - 000.1.2.3 Perjalanan Dinas Pegawai
 - 000.1.3 Perjalanan Dinas Luar Negeri
 - 000.1.3.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
 - 000.1.3.2 Perjalanan Dinas DPRD
 - 000.1.3.3 Perjalanan Dinas Pegawai
 - 000.1.4 Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya)
 - 000.1.5 Rapat pimpinan antara lain: Notula/Risalah Rapat
 - 000.1.6 Penyediaan Konsumsi
 - 000.1.7 Pengurusan Kendaraan Dinas
 - 000.1.7.1 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
 - 000.1.7.2 Pemeliharaan dan perbaikan
 - 000.1.7.3 Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
 - 000.1.8 Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor
 - 000.1.8.1 Pertamanan/ Landscape
 - 000.1.8.2 Penghijauan

- 000.1.8.3 Perbaikan Gedung
- 000.1.8.4 Perbaikan Peralatan Kantor
- 000.1.8.5 Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma
- 000.1.8.6 Kebersihan Gedung dan Taman
- 000.1.9 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer
 - 000.1.9.1 Perbaikan / Pemeliharaan
 - 000.1.9.2 Pemasangan
- 000.1.10 Ketertiban dan Keamanan
 - 000.1.10.1 Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas
 - 000.1.10.2 Laporan Ketertiban dan Keamanan
- 000.1.11 Administrasi Pengelolaan Parkir
 - 000.1.12 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya

000.2 PERLENGKAPAN

- 000.2.1 Inventarisasi dan Penyimpanan
 - 000.2.1.1 Data hasil inventarisasi dan penyimpanan
- 000.2.1.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan
- 000.2.2 Pemeliharaan peralatan kantor
 - 000.2.2.1 Data hasil pemeliharaan kantor
 - 000.2.2.2 Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor
- 000.2.3 Distribusi
 - 000.2.3.1 Barang habis pakai
 - 000.2.3.2 Barang milik daerah
- 000.2.4 Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan.
- 000.2.5 Pengelolaan Database Barang Milik Daerah

000.3 PENGADAAN

- 000.3.1 Rencana pengadaan Barang dan jasa (antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran

pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)

000.3.2 Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)

000.3.3 Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)

000.3.4 Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)

000.3.5 Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain: Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa

000.3.6 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi

000.4 PERPUSTAKAAN

000.4.1 Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

000.4.2 Deposit Bahan Pustaka

000.4.2.1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

000.4.2.2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman

000.4.2.3 Terbitan Internasional dan Regional

000.4.2.4 PemantauanWajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

000.4.2.5 Bibliografi dan Katalog

000.4.3 Koleksi Pustaka

000.4.3.1 Pembelian

000.4.3.2 Hibah

000.4.3.3 Hadiah

000.4.3.4 Tukar Menukar

000.4.3.5 Implementasi Undang-Undang KCKR

- 000.4.3.6 Terbitan Internal
- 000.4.3.7 Pendistribusian bahan pustaka surplus
- 000.4.3.8 Inventarisasi koleksi (Buku Induk)
- 000.4.4 Pengolahan Bahan Pustaka
- 000.4.5 Pangkalan Data Katalog Koleksi
- 000.4.6 Layanan Perpustakaan
 - 000.4.6.1 Keanggotaan
 - 000.4.6.2 Peminjaman
 - 000.4.6.3 Pengembangan gemar baca
- 000.4.7 Kerjasama Perpustakaan
 - 000.4.7.1 MOU
 - 000.4.7.2 Perjanjian kerjasama
 - 000.4.7.3 Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional
- 000.4.8 Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
 - 000.4.7.4 Pengembangan situs web
 - 000.4.7.5 Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
 - 000.4.7.6 Pengembangan program aplikasi perpustakaan
 - 000.4.7.7 Pengembangan pangkalan data kepastakaan digital
- 000.4.9 Pangkalan Data Layanan Perpustakaan
- 000.4.10 Konservasi
 - 000.4.10.1 Perawatan Bahan Perpustakaan
 - 000.4.10.2 Perbaikan Bahan Perpustakaan
 - 000.4.10.3 Penjilidan Bahan Perpustakaan
- 000.4.11 Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)
- 000.4.12 Transformasi Digital
- 000.4.13 Kurasi Digital
- 000.4.14 Pengembangan Perpustakaan
 - 000.4.14.1 Perpustakaan Umum
 - 000.4.14.2 Perpustakaan Khusus
 - 000.4.14.3 Perpustakaan Sekolah
 - 000.4.14.4 Perpustakaan Perguruan Tinggi

000.5 KEARSIPAN

- 000.5.1 Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 000.5.2 Pembinaan Kearsipan
 - 000.5.2.1 Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis
 - 000.5.2.2 Bimbingan Konsultasi Arsiparis
 - 000.5.2.3 Penilaian Arsiparis
 - 000.5.2.4 Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan
 - 000.5.2.5 Data Base Arsiparis
 - 000.5.2.6 Bimbingan Konsultasi Kearsipan Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi
 - 000.5.2.7 Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
 - 000.5.2.8 Fasilitasi Kearsipan, antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan
 - 000.5.2.9 Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan
 - 000.5.2.10 Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI
- 000.5.3 Pengelolaan Arsip Dinamis
 - 000.5.3.1 Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)

- 000.5.3.2 Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: daftar berkas dan daftar isi berkas)
- 000.5.3.3 Penataan Arsip Inaktif (antara lain: daftar arsip inaktif, daftar arsip inaktif tematik)
- 000.5.3.4 Penggunaan (antara lain: daftar arsip dinamis berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, bukti peminjaman arsip)
- 000.5.3.5 Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentisitas arsip dinamis)
- 000.5.4 Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital dan Pemulihan Arsip Vital)
- 000.5.5 Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentifikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga)
- 000.5.6 Penyusutan Arsip
 - 000.5.6.1 Pemindahan Arsip (antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)
 - 000.5.6.2 Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip Yang Dimusnahkan.

- 000.5.6.3 Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)
- 000.5.7 Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)
- 000.5.8 Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis
 - 000.5.8.1 Data Base Pengelolaan Arsip Aktif
 - 000.5.8.2 Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif
- 000.5.9 Pengelolaan Arsip Statis
 - 000.5.9.1 Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan, Daftar Arsip yang diserahkan)
 - 000.5.9.2 Penghargaan dan Imbalan
 - 000.5.9.3 Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaser/ CD/ media lain sesuai perkembangan TI, dan Transkrip)
 - 000.5.9.4 Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)
 - 000.5.9.5 Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide)
 - 000.5.9.6 Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)

- 000.5.9.7 Preservasi Kuratif
- 000.5.9.8 Autentikasi Arsip Statis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentitas arsip statis)
- 000.5.9.9 Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)
- 000.5.10 Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)
- 000.5.11 Pengelolaan SIKN dan JIKN
- 000.5.12 Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana
- 000.5.13 Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan
- 000.5.14 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup
- 000.5.15 Pengawasan Kearsipan
 - 000.5.15.1 Pengawasan Kearsipan Internal
 - 000.5.15.2 Pengawasan Kearsipan Eksternal
 - 000.5.15.3 Sanksi
- 000.6 PERSANDIAN
 - 000.6.1 Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 000.6.2 Pengamanan persandian
 - 000.6.2.1 Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto
 - 000.6.2.2 Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto
 - 000.6.2.3 Materiil sandi: sistem dan peralatan
 - 000.6.3 Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi
 - 000.6.3.1 Perencanaan Pengkajian
 - 000.6.3.2 Administrasi Pengkajian
 - 000.6.3.3 Pelaksanaan
 - 000.6.3.4 Pelaporan
 - 000.6.4 Pembinaan dan Pengendalian Persandian
 - 000.6.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 000.6.4.2 Jaring Komunikasi

- 000.6.5 Layanan Sertifikasi Elektronik
 - 000.6.5.0 Perencanaan dan Administrasi
 - 000.6.5.1 Pelaksanaan Verifikasi
 - 000.6.5.2 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
 - 000.6.5.3 Penyesuaian Sistem dan Testing
 - 000.6.5.4 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
 - 000.6.5.5 Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
 - 000.6.5.6 Pelaporan

000.7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

- 000.7.1 Musyawarah Perencanaan/Musrenbang
 - 000.7.1.1 Musrenbang Provinsi
 - 000.7.1.2 Musrenbang Nasional
 - 000.7.1.3 Musrenbang Kab/Kota
 - 000.7.1.4 Musrenbang Kecamatan
 - 000.7.1.5 Musrenbang Kelurahan
 - 000.7.1.6 Musrenbang Desa
- 000.7.2 Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 000.7.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang
 - 000.7.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
 - 000.7.2.3 Rencana Anggaran Daerah
 - 000.7.2.4 Rencana Pembangunan Tahunan
 - 000.7.2.5 Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - 000.7.2.6 Program kerja tahunan
 - 000.7.2.7 Penetapan / Kontrak Kinerja
 - 000.7.2.8 Laporan Berkala
 - 000.7.2.9 Laporan Insidental
 - 000.7.2.10 Evaluasi Program
- 000.7.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
- 000.7.4 Konsultasi Perencanaan Pembangunan
- 000.7.5 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
- 000.7.6 Aksi Strategis Daerah
 - 000.7.6.1 Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah

- 000.7.6.2 Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah
- 000.7.6.3 Sosialisasi dengan Perangkat Daerah
- 000.7.6.4 Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
- 000.7.6.5 Penerapan perencanaan aksi strategi daerah
- 000.7.7 Perencanaan Pendanaan Pembangunan
 - 000.7.7.1 Pendanaan Nasional dan Hibah
 - 000.7.7.2 Pendanaan Daerah
 - 000.7.7.3 Kerjasama Pembangunan Nasional
 - 000.7.7.4 Surat Berharga Syariah Negara
 - 000.7.7.5 Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru
- 000.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
 - 000.8.1 Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
 - 000.8.1.1 Pembentukan
 - 000.8.1.2 Pengubahan
 - 000.8.1.3 Pembubaran
 - 000.8.2 Uraian Jabatan
 - 000.8.2.1 Analisa Jabatan
 - 000.8.2.2 Analisa Beban Kerja
 - 000.8.3 Ketatalaksanaan
 - 000.8.3.1 Proses Bisnis
 - 000.8.3.2 Standar Pelayanan
 - 000.8.3.3 Standar Operasional Prosedur
 - 000.8.3.4 Pelayanan Publik
 - 000.8.4 Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional
 - 000.8.5 Evaluasi Kelembagaan
 - 000.8.6 Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi
 - 000.8.6.1 Budaya Kerja
 - 000.8.6.2 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
 - 000.8.6.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN

- 000.9.1 Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
- 000.9.2 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan meliputi: rencana kerja, administrasi penelitian, pelaksanaan, hasil penelitian/ pengkajian/ rekomendasi
- 000.9.3 Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, hasil pengkajian dan pengembangan
- 000.9.4 Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan
- 000.9.5 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 000.9.6 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 000.9.6.1 Data
 - 000.9.6.2 Statistik
 - 000.9.6.3 Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian
- 000.9.7 Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 000.9.8 Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
- 000.9.9 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
- 000.9.10 Seminar, lokakarya, temukarya, workshop

100 PEMERINTAHAN

100.1 OTONOMI DAERAH

- 100.1.1 Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 100.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)
- 100.1.3 Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
- 100.1.4 Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)

- 100.1.4.1 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
- 100.1.4.2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
- 100.1.4.3 Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan
- 100.1.4.4 Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)
- 100.1.4.5 Assosiasi Daerah
- 100.1.5 Otonomi khusus dan daerah istimewa
- 100.1.6 Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
 - 100.1.6.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - 100.1.6.2 Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
 - 100.1.6.3 Pengembangan Kapasitas Daerah
- 100.1.7 LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)
- 100.2 PEMERINTAHAN UMUM
 - 100.2.1 Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 100.2.2 Dekonsentrasi dan Kerjasama
 - 100.2.2.1 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
 - 100.2.2.2 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
 - 100.2.2.3 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring Evaluasi Kerjasama Daerah
 - 100.2.2.4 Fasilitas Kecamatan
 - 100.2.2.5 Fasilitas Pelayanan Umum
 - 100.2.3 Wilayah Administrasi dan Perbatasan
 - 100.2.3.1 Toponimi dan Data Wilayah

- 100.2.3.2 Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara
- 100.2.3.3 Batas Antar Daerah Wilayah
- 100.2.3.4 Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan
- 100.2.3.5 Pemeliharaan Batas Wilayah
- 100.3 HUKUM
 - 100.3.1 Program Legislasi
 - 100.3.1.1 Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
 - 100.3.1.2 Program Legislasi
 - 100.3.2 Rancangan Peraturan Perundang Undangan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan
 - 100.3.3 Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah
 - 100.3.3.1 Keputusan / Ketetapan Gubernur
 - 100.3.3.2 Keputusan / Ketetapan Bupati
 - 100.3.3.3 Keputusan / Ketetapan Walikota
 - 100.3.3.4 Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
 - 100.3.3.5 Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
 - 100.3.3.6 Keputusan Sekretaris Daerah Kota
 - 100.3.4 Instruksi / Surat Edaran
 - 100.3.4.1 Instruksi / Surat Edaran Provinsi
 - 100.3.4.2 Instruksi / Surat Edaran Kabupaten
 - 100.3.4.3 Instruksi / Surat Edaran Kota
 - 100.3.4.4 Instruksi / Surat Edaran Setingkat Eselon II
 - 100.3.5 Surat Perintah
 - 100.3.5.1 Surat Perintah Gubernur
 - 100.3.5.2 Surat Perintah Bupati
 - 100.3.5.3 Surat Perintah Walikota
 - 100.3.5.4 Surat Perintah Setingkat Eselon II
 - 100.3.6 Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis

- 100.3.7 Nota Kesepakatan/ Memorandum of Understanding (MOU)/ Kontrak/ Perjanjian kerja sama
 - 100.3.7.1 Dalam Negeri
 - 100.3.7.2 Luar Negeri
- 100.3.8 Dokumentasi Hukum, (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)
- 100.3.9 Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pembinaan Hukum
- 100.3.10 Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi Pemberian bantuan/ konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)
- 100.3.11 Kasus/ Sengketa Hukum
 - 100.3.11.1 Pidana Kasus/sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran
 - 100.3.11.2 Perdata Kasus/sengketa perdata
 - 100.3.11.3 Tata Usaha Negara
 - 100.3.11.4 Perburuhan
 - 100.3.11.5 Arbitrase
 - 100.3.11.6 Sengketa Adat
- 100.3.12 Perijinan
- 100.3.13 Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - 100.3.13.1 Hak Cipta
 - 100.3.13.2 Hak Paten
 - 100.3.13.3 Hak Desain Industri
 - 100.3.13.4 Hak Rahasia Dagang
 - 100.3.13.5 Hak Merk
- 100.3.14 Permohonan HAKI yang ditolak

200 POLITIK

200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- 200.1.1 Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 200.1.2 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - 200.1.2.1 Ketahanan Ideologi Negara
 - 200.1.2.2 Wawasan Kebangsaan
 - 200.1.2.3 Bela Negara
 - 200.1.2.4 Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan

- 200.1.2.5 Pembauran dan Kewarganegaraan
- 200.1.3 Kewaspadaan Nasional
 - 200.1.3.1 Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
 - 200.1.3.2 Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
 - 200.1.3.3 Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
 - 200.1.3.4 Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
 - 200.1.3.5 Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
- 200.1.4 Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan
 - 200.1.4.1 Ketahanan Seni
 - 200.1.4.2 Ketahanan Budaya
 - 200.1.4.3 Agama dan Kepercayaan
 - 200.1.4.4 Organisasi Kemasyarakatan
 - 200.1.4.5 Masalah Sosial Kemasyarakatan
 - 200.1.4.6 Fasilitasi
 - 200.1.4.7 Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
 - 200.1.4.8 Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
 - 200.1.4.9 Evaluasi Aktifitas Ormas: Sanksi Administrasi
 - 200.1.4.10 Fasilitasi Sengketa Ormas
 - 200.1.4.11 Fasilitasi Ormas
- 200.1.5 Politik Dalam Negeri
 - 200.1.5.1 Implementasi Kebijakan Politik
 - 200.1.5.2 Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
 - 200.1.5.3 Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
 - 200.1.5.4 Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi
 - 200.1.5.5 Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi

- 200.1.5.6 Pemerintah Daerah
- 200.1.5.7 Database Parpol
- 200.1.5.8 Pendidikan Budaya Politik
- 200.1.5.9 Pemilihan Umum
- 200.1.6 Ketahanan Ekonomi
 - 200.1.6.1 Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
 - 200.1.6.2 Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
 - 200.1.6.3 Perilaku Perekonomian Masyarakat
 - 200.1.6.4 Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi
- 200.2 PEMILU
 - 200.2.1 Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 200.2.2 Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
 - 200.2.2.1 Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu Tetap (DPT)
 - 200.2.2.2 Daftar Pemilih Sementara (DPS)
 - 200.2.2.3 Daftar Pemilih Tambahan
 - 200.2.2.4 Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih
 - 200.2.2.5 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 - 200.2.3 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
 - 200.2.3.1 Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik
 - 200.2.3.2 Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik
 - 200.2.3.3 Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan
 - 200.2.3.4 Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual
 - 200.2.4 Penetapan Peserta Pemilu
 - 200.2.4.1 Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
 - 200.2.4.2 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
 - 200.2.4.3 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR

- 200.2.4.4 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota
- 200.2.4.5 Peta Daerah Pemilihan
- 200.2.5 Pencalonan Pemilu
 - 200.2.5.1 Petunjuk teknis pencalonan
 - 200.2.5.2 Surat pencalonan pendaftaran
 - 200.2.5.3 Daftar bakal calon
 - 200.2.5.4 Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
 - 200.2.5.5 Dokumen verifikasi administrasi
 - 200.2.5.6 Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
- 200.2.6 Kampanye Pemilu
 - 200.2.6.1 Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye
 - 200.2.6.2 Nama juru kampanye/ pelaksana kampanye
 - 200.2.6.3 Peringatan tertulis/ penghentian kegiatan kampanye
- 200.2.7 Dana Kampanye
 - 200.2.7.1 Pedoman audit dana kampanye
 - 200.2.7.2 Laporan dana kampanye peserta Pemilu
 - 200.2.7.3 Laporan hasil audit dana kampanye
- 200.2.8 Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - 200.2.8.1 Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara
 - 200.2.8.2 Master surat suara
 - 200.2.8.3 Surat suara yang terpakai
 - 200.2.8.4 Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)
 - 200.2.8.5 Formulir pemilu di Pemerintah Daerah
- 200.2.9 Penetapan Hasil Pemilu
- 200.2.10 Perselisihan Hasil Pemilu
 - 200.2.10.1 Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu
 - 200.2.10.2 Jawaban dan kesimpulan termohon
 - 200.2.10.3 Salinan Putusan lembaga peradilan

200.2.11 Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN

300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

300.1.1 Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah

300.1.2 Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja

300.1.2.1 Tata Operasional Polisi Pamong Praja

300.1.2.2 Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja

300.1.3 Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja

300.1.4 Perlindungan Masyarakat

300.1.5 Penyidik Pegawai Negeri Sipil

300.1.6 Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia

300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN

300.2.1 Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

300.2.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan

300.2.2.1 Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan

300.2.2.2 Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring

300.2.2.3 Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan

300.2.2.4 Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan

300.2.2.5 Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan

300.2.2.6 Registrasi BEACON

300.2.3 Pencegahan dan Kesiapsiagaan

300.2.4 Potensi Pencarian dan Pertolongan

300.2.5 Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan

300.2.5.1 Rencana Pendidikan dan Pelatihan

- 300.2.5.2 Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
- 300.2.5.3 Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
- 300.2.5.4 Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
- 300.2.5.5 Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
- 300.2.6 Operasi Pencarian dan Pertolongan
- 300.2.7 Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi
- 300.2.8 Operasi Komunikasi
 - 300.2.8.1 Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
 - 300.2.8.2 Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
 - 300.2.8.3 Registrasi BEACON
- 300.2.9 Inventarisasi dan Pemeliharaan
- 300.2.10 Pengembangan Sistem Informasi
- 300.2.11 Penyajian dan Layanan Informasi
- 300.2.12 Pelaporan dan Evaluasi
 - 300.2.12.1 Laporan Harian
 - 300.2.12.2 Laporan Bulanan
 - 300.2.12.3 Laporoan Tahunan
 - 300.2.12.4 Evaluasi

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

- 400.1.1 Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.1.2 Pembangunan Sumber Daya
 - 400.1.2.1 Fasilitasi Pendidikan keterampilan Pengembangan Sumber Daya
 - 400.1.2.2 Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
 - 400.1.2.3 Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya
 - 400.1.2.4 Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup
 - 400.1.2.5 Fasilitasi Teknologi dan inovasi

- 400.1.2.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya
- 400.1.2.7 Pemantauan dan evaluasi
- 400.1.3 Peningkatan Infrastruktur
 - 400.1.3.1 Fasilitas Transportasi peningkatan infrastruktur
 - 400.1.3.2 Fasilitas Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur
 - 400.1.3.3 Fasilitas Sosial dalam peningkatan infrastruktur
 - 400.1.3.4 Fasilitas Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur
 - 400.1.3.5 Fasilitas energi dalam peningkatan infrastruktur
 - 400.1.3.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur
 - 400.1.3.7 Pemantauan dan evaluasi
- 400.1.4 Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
 - 400.1.4.1 Fasilitas Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
 - 400.1.4.2 Fasilitas Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
 - 400.1.4.3 Fasilitas Usaha mikro, kecil dan menengah
 - 400.1.4.4 Fasilitas Kemitraan usaha
 - 400.1.4.5 Fasilitas Pengembangan komoditas unggulan
 - 400.1.4.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
 - 400.1.4.7 Pemantauan dan evaluasi
 - 400.1.4.8 Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
 - 400.1.4.9 Fasilitas pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
 - 400.1.4.10 Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal

- 400.1.4.11 Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
- 400.1.4.12 Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
- 400.1.4.13 Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
- 400.1.4.14 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
- 400.1.5 Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya
 - 400.1.5.1 Penguatan kapasitas lembaga lokal
 - 400.1.5.2 Penguatan organisasi masyarakat
 - 400.1.5.3 Pemberdayaan masyarakat
 - 400.1.5.4 Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya
 - 400.1.5.5 Ketenagakerjaan
 - 400.1.5.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya
 - 400.1.5.7 Pemantauan dan evaluasi
- 400.1.6 Pengembangan Daerah Khusus
 - 400.1.6.1 Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan
 - 400.1.6.2 Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
 - 400.1.6.3 Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan
 - 400.1.6.4 Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar
 - 400.1.6.5 Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis
 - 400.1.6.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus
 - 400.1.6.7 Pemantauan dan evaluasi
- 400.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 - 400.2.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.2.2 Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum
 - 400.2.2.1 Data gender

- 400.2.2.2 Advokasi dan fasilitasi
- 400.2.3 Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)
 - 400.2.3.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
 - 400.2.3.2 Data perlindungan perempuan
 - 400.2.3.3 Advokasi dan fasilitasi
 - 400.2.3.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan
 - 400.2.3.5 Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender
 - 400.2.3.6 Analisis dan penyajian informasi gender
 - 400.2.3.7 Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu
- 400.2.4 Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)
 - 400.2.4.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
 - 400.2.4.2 Data perlindungan anak
 - 400.2.4.3 Advokasi dan fasilitasi
 - 400.2.4.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak
 - 400.2.4.5 Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak
- 400.2.5 Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)
 - 400.2.5.1 Pemenuhan Hak Anak
 - 400.2.5.2 Data Klaster Hak Anak
 - 400.2.5.3 Data tumbuh kembang anak
 - 400.2.5.4 Advokasi dan fasilitasi
 - 400.2.5.5 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak
 - 400.2.5.6 Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak
- 400.2.6 Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)
- 400.2.7 Penghargaan Kabupaten Layak Anak

400.2.8 Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak

400.3 PENDIDIKAN

400.3.1 Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.3.2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal

400.3.2.1 Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)

400.3.2.2 Pelatihan Sosial

400.3.2.3 Peringatan Hari anak

400.3.2.4 Block Grant

400.3.3 Pendidikan Masyarakat

400.3.3.1 Penyelenggaraan Program

400.3.3.2 Penilaian dan pemberian bantuan sosial

400.3.3.3 Pembinaan Program

400.3.3.4 Lomba/Pemberian Penghargaan

400.3.3.5 Pameran

400.3.3.6 Rakor

400.3.3.7 Sosialisasi

400.3.3.8 Sertifikasi dan Akreditasi

400.3.4 Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik

400.3.5 Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama

400.3.5.1 Kurikulum, bahan ajar

400.3.5.2 Block Grant

400.3.5.3 Pelatihan, Bimtek, sosialisasi

400.3.5.4 Lomba, penghargaan, penganugerahan

400.3.5.5 Bantuan operasional sekolah (BOS)

400.3.5.6 Bantuan Siswa Miskin

400.3.6 Pendidikan khusus/Layanan Khusus

400.3.6.1 Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran

400.3.6.2 Block Grant

400.3.6.3 Lomba, festival

400.3.6.4 Sosialisasi, bimtek

400.3.6.5 Pendataan

400.3.6.6 Kelembagaan

400.3.7 Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik

400.3.7.1 Pendataan dan Pemeetaan

- 400.3.7.2 Uji Kompetensi Guru
- 400.3.7.3 Sertifikasi Guru
- 400.3.7.4 Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
- 400.3.7.5 Peningkatan kesejahteraan guru
- 400.3.7.6 Sosialisasi, bimtek
- 400.3.7.7 Block Grant
- 400.3.8 Sekolah Menengah Atas
 - 400.3.8.1 Kurikulum
 - 400.3.8.2 Bahan Ajar
 - 400.3.8.3 Pelatihan
 - 400.3.8.4 Block grant
 - 400.3.8.5 Bimbingan teknis/sosialisasi
 - 400.3.8.6 Lomba, Sayembara, festival
 - 400.3.8.7 Bantuan operasional Sekolah (BOS)
 - 400.3.8.8 Bantuan siswa miskin
- 400.3.9 Pendidikan Khusus-Layanan Khusus
 - 400.3.9.1 Bahan ajar
 - 400.3.9.2 Petunjuk Teknis
 - 400.3.9.3 Block grant
 - 400.3.9.4 Sosialisasi, bimtek
 - 400.3.9.5 Lomba, sayembara, jambore, festival
 - 400.3.9.6 Kurikulum/bahan pembelajaran Alat bantu pembelajaran
 - 400.3.9.7 Pendataan
 - 400.3.9.8 Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi)
- 400.3.10 Pendidik dan Tenaga Pendidik
 - 400.3.10.1 Pendataan dan Pemetaan
 - 400.3.10.2 Uji Kompetensi Guru
 - 400.3.10.3 Sertifikasi Guru
 - 400.3.10.4 Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
 - 400.3.10.5 Penghargaan guru dan tenaga kependidikan

- 400.3.10.6 Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
- 400.3.10.7 Block grant
- 400.3.10.8 Bimbingan teknis/sosialisasi
- 400.3.11 Penilaian Pendidikan
 - 400.3.11.1 Penilaian Akademik
 - 400.3.11.2 Penilaian Non Akademik
 - 400.3.11.3 Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
- 400.3.12 Data dan Statistik Pendidikan
 - 400.3.12.1 Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
 - 400.3.12.2 Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
- 400.3.13 Prasarana dan Sarana Pendidikan
 - 400.3.13.1 Prasarana Pendidikan
 - 400.3.13.2 Sarana Pendidikan
 - 400.3.13.3 Monitoring dan Evaluasi
- 400.4 KEOLAHRAGAAN
 - 400.4.1 Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.4.2 Pengelolaan Olahraga Pendidikan
 - 400.4.2.1 Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 400.4.2.2 Olahraga Pendidikan Tinggi
 - 400.4.2.3 Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal
 - 400.4.3 Pengelolaan Olahraga Rekreasi
 - 400.4.3.1 Olahraga Massal
 - 400.4.3.2 Olahraga Tradisional
 - 400.4.3.3 Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata
 - 400.4.4 Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga
 - 400.4.4.1 Olahraga Pendidikan
 - 400.4.4.2 Olahraga Rekreasi
 - 400.4.4.3 Olahraga Prestasi
 - 400.4.4.4 Sekolah Khusus Olahraga

- 400.4.5 Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
 - 400.4.5.1 Olahraga Tradisional
 - 400.4.5.2 Layanan Khusus
- 400.4.6 Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
 - 400.4.6.1 Kemitraan Keolahragaan
 - 400.4.6.2 Penghargaan Olahraga
- 400.4.7 Pembibitan dan IPTEK Olahraga
 - 400.4.7.1 Pembibitan Olahraga
 - 400.4.7.2 Kompetisi
 - 400.4.7.3 IPTEK Olahraga
- 400.4.8 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
 - 400.4.8.1 Tenaga Keolahragaan
 - 400.4.8.2 Organisasi Keolahragaan
- 400.4.9 Industri dan Promosi Olahraga
 - 400.4.9.1 Industri Olahraga
 - 400.4.9.2 Promosi Olahraga
- 400.4.10 Olahraga Prestasi
 - 400.4.10.1 Daerah
 - 400.4.10.2 Nasional
 - 400.4.10.3 Internasional
- 400.4.11 Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga
 - 400.4.11.1 Standardisasi Keolahragaan
 - 400.4.11.2 Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
 - 400.4.11.3 Infrastruktur Olahraga
- 400.5 KEPEMUDAAN
 - 400.5.1 Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.5.2 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda
 - 400.5.2.1 Penelusuran (Duta Kepemudaan)
 - 400.5.2.2 Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)
 - 400.5.2.3 Pengembangan
 - 400.5.3 Peningkatan Wawasan Pemuda
 - 400.5.3.1 Wawasan Kebangsaan
 - 400.5.3.2 Wawasan Lingkungan
 - 400.5.3.3 Wawasan Sosial dan Hukum

- 400.5.4 Peningkatan Kapasitas Pemuda
 - 400.5.4.1 Kapasitas Iman dan Taqwa
 - 400.5.4.2 Kapasitas IPTEK
 - 400.5.4.3 Pemanfaatan IPTEK
- 400.5.5 Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas /seni kepemudaan)
 - 400.5.5.1 Pengkajian
 - 400.5.5.2 Pengembangan
 - 400.5.5.3 Pendayagunaan (fasilitasi)
- 400.5.6 Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
 - 400.5.6.1 Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
 - 400.5.6.2 Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan
- 400.5.7 Kewirausahaan
 - 400.5.7.1 Kelembagaan
 - 400.5.7.2 Pengaderan
 - 400.5.7.3 Perintisan
- 400.5.8 Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan
 - 400.5.8.1 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumberdaya
 - 400.5.8.2 Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan: Kelembagaan dan Sumberdaya
 - 400.5.8.3 Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya
 - 400.5.8.4 Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan, Program dan Sumberdaya
- 400.5.9 Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda
 - 400.5.9.1 Standardisasi
 - 400.5.9.2 Infrastruktur Pemuda
- 400.5.10 Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
 - 400.5.10.1 Kemitraan
 - 400.5.10.2 Penghargaan Pemuda
- 400.6 KEBUDAYAAN
 - 400.6.1 Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

- 400.6.2 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
 - 400.6.2.1 Registrasi Nasional
 - 400.6.2.2 Pelindungan
 - 400.6.2.3 Pengembangan dan Pemanfaatan
 - 400.6.2.4 Eksplorasi dan Dokumentasi
- 400.6.3 Pembinaan Kesenian dan Perfilman
 - 400.6.3.1 Pembinaan Seni Pertunjukan
 - 400.6.3.2 Pembinaan Seni Rupa
 - 400.6.3.3 Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film
 - 400.6.3.4 Dokumentasi dan Publikasi
- 400.6.4 Sejarah dan Nilai Budaya
 - 400.6.4.1 Sejarah
 - 400.6.4.2 Pemetaan nilai
 - 400.6.4.3 Verifikasi dan Perumusan Nilai
 - 400.6.4.4 Dokumentasi dan Publikasi
 - 400.6.4.5 Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah
 - 400.6.4.6 Publikasi sejarah dan nilai sejarah
- 400.6.5 Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
 - 400.6.5.1 Internalisasi nilai budaya
 - 400.6.5.2 Kekayaan budaya
 - 400.6.5.3 Warisan budaya nasional dan dunia
 - 400.6.5.4 Diplomasi budaya

400.7 KESEHATAN

- 400.7.1 Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.7.2 Upaya Kesehatan Dasar
 - 400.7.2.1 Pelayanan kedokteran keluarga
 - 400.7.2.2 Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer
 - 400.7.2.3 Pelaksanaan kesehatan primer
 - 400.7.2.4 Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
 - 400.7.2.5 Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
 - 400.7.2.6 ICD 10, Destistry & Stomatology
 - 400.7.2.7 Infeksi menular lewat transfusi darah
 - 400.7.2.8 Penyakit mulut di tingkat primer

- 400.7.2.9 Pembiayaan darah
- 400.7.2.10 Penggunaan darah rasional
- 400.7.2.11 Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah
- 400.7.2.12 Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan
- 400.7.2.13 Akreditasi puskesmas
- 400.7.2.14 Puskesmas berprestasi
- 400.7.3 Upaya Kesehatan Rujukan
 - 400.7.3.1 Pelayanan kesehatan rujukan
 - 400.7.3.2 Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)
 - 400.7.3.3 Pelayanan rumah sakit privat
 - 400.7.3.4 Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
 - 400.7.3.5 Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan
 - 400.7.3.6 Pelayanan pasien jaminan kesehatan
 - 400.7.3.7 Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
 - 400.7.3.8 Badan pengawas rumah sakit
 - 400.7.3.9 Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)
 - 400.7.3.10 Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
- 400.7.4 Keperawatan dan keteknisian medik
 - 400.7.4.1 Pelayanan Keperawatan Dasar
 - 400.7.4.2 Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit
 - 400.7.4.3 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
 - 400.7.4.4 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
 - 400.7.4.5 Bina pelayanan kebidanan
- 400.7.5 Penunjang medik dan sarana kesehatan
 - 400.7.5.1 Mikrobiologi dan imunologi

- 400.7.5.2 Patologi dan toksilogi
- 400.7.5.3 Radiologi
- 400.7.5.4 Perizinan dan sertifikasi
- 400.7.5.5 Sarana dan prasarana kesehatan
- 400.7.5.6 Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
- 400.7.5.7 Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
- 400.7.6 Kesehatan Jiwa
 - 400.7.6.1 Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
 - 400.7.6.2 Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
 - 400.7.6.3 Etikolegal dan asesmen
 - 400.7.6.4 Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
 - 400.7.6.5 Etikolegal dan asesmen
 - 400.7.6.6 Kesehatan jiwa kelompok beresiko
- 400.7.7 Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
 - 400.7.7.1 Surveilans dan respon kejadian luar biasa
 - 400.7.7.2 Imunisasi
 - 400.7.7.3 Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
 - 400.7.7.4 Kesehatan matra
- 400.7.8 Pengendalian penyakit menular langsung
 - 400.7.8.1 Pengendalian tuberkolosis
 - 400.7.8.2 Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
 - 400.7.8.3 Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut
 - 400.7.8.4 Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
 - 400.7.8.5 Pengendalian kusta dan frambusia
- 400.7.9 Pengendalian penyakit bersumber binatang
 - 400.7.9.1 Pengendalian malaria
 - 400.7.9.2 Pengendalian arbovirosis
 - 400.7.9.3 Pengendalian zoonosis

- 400.7.9.4 Pengendalian filariasis dan kecacingan
- 400.7.10 Pengendalian penyakit tidak menular
 - 400.7.10.1 Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
 - 400.7.10.2 Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
 - 400.7.10.3 Penyakit kanker
 - 400.7.10.4 Penyakit kronis dan generatif
 - 400.7.10.5 Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
- 400.7.11 Penyehatan lingkungan
 - 400.7.11.1 Penyehatan air dan sanitasi dasar
 - 400.7.11.2 Pemukiman dan tempat umum
 - 400.7.11.3 Kawasan dan sanitasi darurat
 - 400.7.11.4 Higien sanitasi pangan
 - 400.7.11.5 Pengamanan limbah, udara, radiasi
- 400.7.12 Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan
- 400.7.13 Gizi
 - 400.7.13.1 Gizi makro
 - 400.7.13.2 Gizi mikro
 - 400.7.13.3 Gizi klinik dan diatetik
 - 400.7.13.4 Konsumsi makanan dan jasa makanan
 - 400.7.13.5 Kewaspadaan gizi
- 400.7.14 Kesehatan ibu
 - 400.7.14.1 Kesehatan ibu hamil
 - 400.7.14.2 Kesehatan ibu bersalin dan nifas
 - 400.7.14.3 Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
 - 400.7.14.4 Keluarga berencana
 - 400.7.14.5 Perlindungan kesehatan reproduksi
- 400.7.15 Kesehatan anak
 - 400.7.15.1 Kelangsungan hidup bayi
 - 400.7.15.2 Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
 - 400.7.15.3 Kewaspadaan penanganan balita beresiko

- 400.7.15.4 Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
- 400.7.15.5 Perlindungan kesehatan anak
- 400.7.16 Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer
 - 400.7.16.1 Kesehatan tradisional keterampilan
 - 400.7.16.2 Kesehatan tradisional ramuan
 - 400.7.16.3 Kesehatan alternatif dan komplementer
 - 400.7.16.4 Penapisan dan kemitraan
- 400.7.17 Kesehatan kerja dan Olah raga
 - 400.7.17.1 Pelayanan kesehatan kerja
 - 400.7.17.2 Kapasitas kerja
 - 400.7.17.3 Lingkungan kerja
 - 400.7.17.4 Kemitraan kesehatan kerja
 - 400.7.17.5 Kesehatan perkotaan
 - 400.7.17.6 Kesehatan olahraga
- 400.7.18 Obat Publik dan perbekalan kesehatan
 - 400.7.18.1 Harga obat publik
 - 400.7.18.2 Pengadaan obat
 - 400.7.18.3 Perbekalan kesehatan
- 400.7.19 Produksi dan distribusi alat kesehatan
 - 400.7.19.1 Alat kesehatan
 - 400.7.19.2 Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
 - 400.7.19.3 Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
- 400.7.20 Kefarmasian
 - 400.7.20.1 Pelayanan kefarmasian
 - 400.7.20.2 Farmasi klinis
 - 400.7.20.3 Farmasi Komunitas
 - 400.7.20.4 Penggunaan obat rasional
- 400.7.21 Produksi dan distribusi kefarmasian
 - 400.7.21.1 Obat tradisional
 - 400.7.21.2 Kosmetik dan makanan
 - 400.7.21.3 Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
 - 400.7.21.4 Kemandirian obat dan bahan baku obat

- 400.7.22 Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan
 - 400.7.22.1 Surat keterangan
 - 400.7.22.2 Sertifikasi dan perijinan
- 400.7.23 Penanggulangan Krisis Kesehatan
 - 400.7.23.1 Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
 - 400.7.23.2 Tanggap darurat dan pemulihan
 - 400.7.23.3 Pemantauan dan informasi
 - 400.7.23.4 Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
 - 400.7.23.5 Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana
- 400.7.24 Pengembangan dan Jaminan Kesehatan
 - 400.7.24.1 Tersedianya data NHA setiap tahun
 - 400.7.24.2 Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
- 400.7.25 Intelegensia Kesehatan
 - 400.7.25.1 Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia kesehatan
 - 400.7.25.2 Penanggulangan masalah intelegensia kesehatan
- 400.7.26 Kesehatan Haji
 - 400.7.26.1 Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji
 - 400.7.26.2 Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji
- 400.7.27 Promosi Kesehatan
 - 400.7.27.1 Sarana Promosi Kesehatan
 - 400.7.27.2 Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran
 - 400.7.27.3 Pengembangan pesan promosi kesehatan
 - 400.7.27.4 Hari Kesehatan
- 400.7.28 Data dan Informasi
 - 400.7.28.1 Statistik kesehatan
 - 400.7.28.2 Analisis dan diseminasi informasi
 - 400.7.28.3 Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan

- 400.7.29 Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen
 - 400.7.29.1 Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik
 - 400.7.29.2 Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
 - 400.7.29.3 Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
 - 400.7.29.4 Obat Asli Indonesia
- 400.7.30 Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
 - 400.7.30.1 Penilaian keamanan pangan
 - 400.7.30.2 Standardisasi produk pangan
 - 400.7.30.3 Inspeksi dan sertifikasi produk pangan
 - 400.7.30.4 Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan
 - 400.7.30.5 Pengawasan produk dan bahan berbahaya
- 400.7.31 Rekam Medis
- 408.8 AGAMA DAN KEPERCAYAAN
 - 400.8.1 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.8.2 Fasilitas
 - 400.8.2.1 Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota
 - 400.8.2.2 Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
 - 400.8.2.3 Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan
 - 400.8.2.4 Kasus Keagamaan
 - 400.8.2.5 Kasus Aliran Keagamaan
 - 400.8.3 Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME
 - 400.8.3.1 Kelembagaan dan kepercayaan
 - 400.8.3.2 Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
 - 400.8.3.3 Komunitas Kepercayaan
 - 400.8.3.4 Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional
 - 400.8.3.5 Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial

400.9 SOSIAL

- 400.9.1 Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.9.2 Kesejahteraan Sosial Anak
 - 400.9.2.1 Kesejahteraan sosial anak balita
 - 400.9.2.2 Kesejahteraan sosial anak terlantar
 - 400.9.2.3 Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
 - 400.9.2.4 Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan
 - 400.9.2.5 Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus
- 400.9.3 Rehabilitasi Sosial
 - 400.9.3.1 Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental
 - 400.9.3.2 Kelembagaan dan advokasi social
 - 400.9.3.3 Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan social
- 400.9.4 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
 - 400.9.4.1 Gelandangan, pengemis dan pemulung
 - 400.9.4.2 Tuna susila dan korban trafficking perempuan
 - 400.9.4.3 Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi
 - 400.9.4.4 Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas
- 400.9.5 Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
- 400.9.6 Pelayanan sosial lanjut usia
 - 400.9.6.1 Pelayanan sosial dalam dan luar panti
 - 400.9.6.2 Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga
 - 400.9.6.3 Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan
- 400.9.7 Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial

- 400.9.8 Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
- 400.9.9 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - 400.9.9.1 Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya
 - 400.9.9.2 Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
 - 400.9.9.3 Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
 - 400.9.9.4 Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah
- 400.9.10 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - 400.9.10.1 Kesiapsiagaan dan mitigasi
 - 400.9.10.2 Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
 - 400.9.10.3 Pemulihan sosial dan penguatan sosial
 - 400.9.10.4 Kerjasama
- 400.9.11 Jaminan Sosial
 - 400.9.11.1 Seleksi dan verifikasi
 - 400.9.11.2 Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi
 - 400.9.11.3 Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
 - 400.9.11.4 Kerjasama
- 400.9.12 Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial
 - 400.9.12.1 Ketahanan keluarga
 - 400.9.12.2 Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
 - 400.9.12.3 Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial
 - 400.9.12.4 Kemitraan dunia usaha
 - 400.9.12.5 Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
- 400.9.13 Pemberdayaan komunitas adat terpencil
 - 400.9.13.1 Persiapan pemberdayaan
 - 400.9.13.2 Pemberdayaan sumber daya manusia

- 400.9.13.3 Penggalian dan pengembangan potensi
- 400.9.13.4 Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil
- 400.9.13.5 Kerjasama kelembagaan
- 400.9.14 Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan
 - 400.9.14.1 Identifikasi dan analisis
 - 400.9.14.2 Pengembangan kapasitas
 - 400.9.14.3 Penataan sosial lingkungan kumuh
 - 400.9.14.4 Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas
 - 400.9.14.5 Bantuan Langsung
 - 400.9.14.6 Kerjasama Kelembagaan
- 400.9.15 Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
 - 400.9.15.1 Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan
 - 400.9.15.2 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan
 - 400.9.15.3 Pengembangan kesetiakawanan sosial
 - 400.9.15.4 Pengelolaan taman makam pahlawan
- 400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 - 400.10.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.10.2 Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - 400.10.2.1 Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan
 - 400.10.2.2 Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - 400.10.2.3 Fasilitasi Permusyawaratan Desa
 - 400.10.2.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - 400.10.2.5 Pengembangan Kapasitas Desa
 - 400.10.3 Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
 - 400.10.3.1 Lembaga Masyarakat
 - 400.10.3.2 Pembangunan Partisipatif
 - 400.10.3.3 Pendataan Potensi Masyarakat

- 400.10.3.4 Pengembangan Kawasan Perdesaan
 - 400.10.3.5 Pelatihan Masyarakat
 - 400.10.4 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
 - 400.10.4.1 Budaya Nusantara
 - 400.10.4.2 Pemberdayaan Perempuan
 - 400.10.4.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 400.10.4.4 Kesejahteraan Sosial
 - 400.10.4.5 Tenaga Kerja Perdesaan
 - 400.10.5 Usaha Ekonomi Masyarakat
 - 400.10.5.1 Usaha Pertanian dan Pangan
 - 400.10.5.2 Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
 - 400.10.5.3 Produksi dan Pemasaran
 - 400.10.5.4 Usaha Ekonomi dan Keluarga
 - 400.10.5.5 Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal
 - 400.10.6 Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
 - 400.10.6.1 Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan
 - 400.10.6.2 Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan
 - 400.10.6.3 Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan
 - 400.10.6.4 Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan
 - 400.10.6.5 Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan
 - 400.10.7 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
- 400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
- 400.11.1 Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.11.2 Pertamanan
 - 400.11.2.1 Perencanaan Pertamanan
 - 400.11.2.2 Taman Kota
 - 400.11.2.3 Tata Hias dan Ornamen Kota
 - 400.11.3 Pemakaman
 - 400.11.3.1 Perencanaan Pemakaman

- 400.11.3.2 Pemakaman
- 400.11.3.3 Pelayanan Pemakaman
- 400.11.4 Jalur Hijau
 - 400.11.4.1 Perencanaan Jalur Hijau
 - 400.11.4.2 Jalur Hijau Jalan
 - 400.11.4.3 Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air
- 400.11.5 Peran Serta Masyarakat
- 400.11.6 Pengawasan dan Penindakan
- 400.11.7 Pengelolaan Data
- 400.11.8 Evaluasi dan Pelaporan
- 400.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
 - 400.12.1 Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - 400.12.2 Pendaftaran Penduduk
 - 400.12.2.1 Identitas Penduduk
 - 400.12.2.2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
 - 400.12.2.3 Pindah Datang Penduduk Antar Negara
 - 400.12.2.4 Pendataan Penduduk Rentan
 - 400.12.2.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
 - 400.12.3 Pencatatan Sipil
 - 400.12.3.1 Kelahiran dan Kematian
 - 400.12.3.2 Perkawinan dan Perceraian
 - 400.12.3.3 Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan
 - 400.12.3.4 Pencatatan Kewarganegaraan
 - 400.12.3.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
 - 400.12.4 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.2 Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.3 Pengelolaan data Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.4 Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan

- 400.12.4.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
- 400.12.5 Pengembangan Kebijakan Kependudukan
 - 400.12.5.1 Kuantitas Penduduk
 - 400.12.5.2 Kualitas Penduduk
 - 400.12.5.3 Mobilitas Penduduk
 - 400.12.5.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
 - 400.12.5.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
- 400.12.6 Penyerasian Kependudukan
 - 400.12.6.1 Indikator Kependudukan
 - 400.12.6.2 Proyeksi Penduduk
 - 400.12.6.3 Perencanaan Kependudukan
 - 400.12.6.4 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah
 - 400.12.6.5 Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah
- 400.13 KELUARGA BERENCANA
 - 400.13.1 Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.13.2 Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
 - 400.13.2.1 Pengumpulan dan pengolahan data
 - 400.13.2.2 Evaluasi dan pelaporan
 - 400.13.3 Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
 - 400.13.3.1 Penyiapan fasilitas
 - 400.13.3.2 Evaluasi dan pelaporan
 - 400.13.4 Profil dan proyeksi penduduk
 - 400.13.4.1 Data profil dan proyeksi penduduk
 - 400.13.4.2 Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk
 - 400.13.5 Penetapan parameter pengendalian penduduk
 - 400.13.5.1 Penetapan sasaran parameter
 - 400.13.5.2 Evaluasi sasaran parameter
 - 400.13.6 Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk
 - 400.13.6.1 Pemanfaatan profil dan proyeksi
 - 400.13.6.2 Pemanfaatan parameter

- 400.13.7 Pengembangan Sistem
 - 400.13.7.1 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
 - 400.13.7.2 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.13.8 Pengembangan Materi
 - 400.13.8.1 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal
 - 400.13.8.2 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.13.9 Monitoring dan Evaluasi
 - 400.13.9.1 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
 - 400.13.9.2 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.13.10 Analisis Sosial
- 400.13.11 Analisis Ekonomi
- 400.13.12 Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan
- 400.13.13 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
- 400.13.14 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah
- 400.13.15 Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana
- 400.13.16 Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah
 - 400.13.16.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
 - 400.13.16.2 Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
- 400.13.17 Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta
- 400.13.18 Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta
- 400.13.19 Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta
 - 400.13.19.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
 - 400.13.19.2 Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta

- 400.13.20 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan
 - 400.13.20.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
 - 400.13.20.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
- 400.13.21 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
 - 400.13.21.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
 - 400.13.21.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
- 400.13.22 Kesertaan keluarga berencana pria
 - 400.13.22.1 Peningkatan akses keluarga berencana pria
 - 400.13.22.2 Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
- 400.13.23 Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak
- 400.13.24 Pencegahan PMS dan HIV/AIDS
- 400.13.25 Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas
- 400.13.26 Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak
 - 400.13.26.1 Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak
 - 400.13.26.2 Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak
- 400.13.27 Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak
 - 400.13.27.1 Monitoring bina keluarga Balita dan anak
 - 400.13.27.2 Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak
- 400.13.28 Pelembagaan bina ketahanan remaja
 - 400.13.28.1 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
 - 400.13.28.2 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat

- 400.13.29 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja
 - 400.13.29.1 Monitoring bina ketahanan remaja
 - 400.13.29.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja
- 400.13.30 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.30.1 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
 - 400.13.30.2 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan
- 400.13.31 Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.31.1 Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.31.2 Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.32 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.32.1 Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.32.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.33 Pengembangan program usaha ekonomi keluarga
- 400.13.34 Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga
- 400.13.35 Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga
 - 400.13.35.1 Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
 - 400.13.35.2 Pengemangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga
- 400.13.36 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga
- 400.13.37 Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera
- 400.13.38 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.38.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

- 400.13.38.2 Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
- 400.13.39 Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.39.1 Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.39.2 Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
- 400.13.40 Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
 - 400.13.40.1 Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
 - 400.13.40.2 Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
- 400.13.41 Advokasi dan pencitraan
- 400.13.42 Komunikasi, Informasi dan Edukasi
 - 400.13.42.1 Promosi
 - 400.13.42.2 Sarana produksi media komunikasi
 - 400.13.42.3 Produk media komunikasi
- 400.13.43 Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi
- 400.13.44 Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
 - 400.13.44.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
 - 400.13.44.2 Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
- 400.13.45 Hubungan dengan lembaga nonpemerintah
 - 400.13.45.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
 - 400.13.45.2 Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
- 400.13.46 Tenaga Lini Lapangan
 - 400.13.46.1 Pengembangan tenaga lini lapangan
 - 400.13.46.2 Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan
- 400.13.47 Institusi Masyarakat Pedesaan

- 400.13.47.1 Pengembangan institusi masyarakat pedesaan
- 400.13.47.2 Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan
- 400.13.48 Mekanisme Operasional lini lapangan
 - 400.13.48.1 Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
 - 400.13.48.2 Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan
- 400.13.49 Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan
 - 400.13.49.1 Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
 - 400.13.49.2 Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan
- 400.13.50 Pengumpulan dan pengolahan data
- 400.13.51 Analisis dan evaluasi
 - 400.13.51.1 Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk
 - 400.13.51.2 Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- 400.13.52 Sistem aplikasi dan bank data
 - 400.13.52.1 Pengembangan sistem aplikasi
 - 400.13.52.2 Pengelolaan bank data
- 400.13.53 Infrastruktur teknologi informasi
 - 400.13.53.1 Pengembangan infrastruktur teknologi informasi
 - 400.13.53.2 Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi
- 400.13.54 Dokumentasi dan penyebarluasan informasi
 - 400.13.54.1 Dokumentasi dan perpustakaan
 - 400.13.54.2 Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi
- 400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT
 - 400.14.1 Keprotokolan
 - 400.14.1.1 Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan

- jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)
- 400.14.1.2 Buku tamu Keprotokolan
- 400.14.1.3 Agenda kegiatan pimpinan daerah
- 400.14.1.4 Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
- 400.14.2 Daftar nama/alamat kantor /pejabat
- 400.14.3 Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas, foto/ video/ rekaman suara/ multi media
- 400.14.4 Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan
 - 400.14.4.1 Kliping koran
 - 400.14.4.2 Brosur /Leaflet/poster /plakat
 - 400.14.4.3 Pengumuman /pemberitaan
- 400.14.5 Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah
 - 400.14.5.1 Hubungan antar lembaga pemerintah
 - 400.14.5.2 Hubungan dengan organisasi sosial / LSM
 - 400.14.5.3 Hubungan dengan perusahaan
 - 400.14.5.4 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapang (PKL)
 - 400.14.5.5 Forum Kehumasan
 - 400.14.5.6 Hubungan dengan Media Massa
- 400.14.6 Dengar pendapat/hearing DPRD
- 400.14.7 Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/ Kabupaten
- 400.14.8 Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal
- 400.14.9 Publikasi melalui media cetak maupun elektronik
- 400.14.10 Pameran/sayembara/lomba/festival, pembuatan spanduk dan iklan
- 400.14.11 Penghargaan/tanda kenang-kenangan
- 400.14.12 Ucapan Terima kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf

500 PEREKONOMIAN

500.1 KETAHANAN PANGAN

- 500.1.1 Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah
- 500.1.2 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - 500.1.2.1 Ketersediaan Pangan
 - 500.1.2.2 Akses Pangan
 - 500.1.2.3 Kerawanan Pangan
- 500.1.3 Distribusi dan Cadangan Pangan
 - 500.1.3.1 Distribusi Pangan
 - 500.1.3.2 Harga Pangan
 - 500.1.3.3 Cadangan Pangan
- 500.1.4 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan
 - 500.1.4.1 Konsumsi Pangan
 - 500.1.4.2 Penganekaragaman Pangan
 - 500.1.4.3 Keamanan Pangan Segar
- 500.1.5 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
 - 500.1.5.1 Dewan Ketahanan Pangan
 - 500.1.5.2 Penghargaan Ketahanan Pangan
- 500.1.6 Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)
- 500.1.7 Bimbingan Teknis
- 500.1.8 Evaluasi

500.2 PERDAGANGAN

- 500.2.1 Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.2.2 Perdagangan Dalam Negeri
 - 500.2.2.1 Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
 - 500.2.2.2 Bina Usaha Jasa Perdagangan
 - 500.2.2.3 Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan
 - 500.2.2.4 Informasi Perusahaan
 - 500.2.2.5 Pelaku Pasar
 - 500.2.2.6 Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
 - 500.2.2.7 Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah

- 500.2.2.8 Pengembangan Produk Lokal
- 500.2.2.9 Pencitraan Produk Dalam Negeri
- 500.2.2.10 Pengembangan Sarana Distribusi
- 500.2.2.11 Pengelolaan Sarana Distribusi
- 500.2.2.12 Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik
- 500.2.2.13 Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia
Jasa Logistik
- 500.2.2.14 Informasi Pasar
- 500.2.2.15 Informasi Hasil Industri
- 500.2.2.16 Barang Strategis
- 500.2.2.17 Bahan Pokok Agro
- 500.2.3 Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
 - 500.2.3.1 Kelembagaan dan informasi standar
 - 500.2.3.2 Kerjasama Standarisasi
 - 500.2.3.3 Perumusan dan penerapan standar
 - 500.2.3.4 Tata usaha
 - 500.2.3.5 Kerjasama, informasi, dan publikasi
 - 500.2.3.6 Analisa penyelenggaraan perlindungan
konsumen
 - 500.2.3.7 Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
 - 500.2.3.8 Fasilitas kelembagaan
 - 500.2.3.9 Produk pertambangan dan aneka
industri
 - 500.2.3.10 Produk pertanian, kimia dan kehutanan
 - 500.2.3.11 Jasa
 - 500.2.3.12 Kerjasama
 - 500.2.3.13 Sarana dan Kerjasama
 - 500.2.3.14 Kelembagaan dan dan penilaian
 - 500.2.3.15 UTP dan Standar Ukuran
 - 500.2.3.16 Pengawasan
 - 500.2.3.17 Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan
Ukuran
 - 500.2.3.18 Balai Pengujian UTP
- 500.2.4 Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 500.2.4.1 Pengkajian pasar
 - 500.2.4.2 Pengawasan Transaksi
 - 500.2.4.3 Pengawasan Keuangan dan Audit

- 500.2.4.4 Pengkajian pasar
- 500.2.4.5 Pengembangan Pasar
- 500.2.4.6 Sistem informasi
- 500.2.4.7 Pembinaan pasar lelang dan system resi gudang
- 500.2.4.8 Pengawasan pasar lelang
- 500.2.4.9 Pengawasan sistem gudang
- 500.2.5 Bimbingan Teknis
- 500.2.6 Evaluasi

500.3 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

- 500.3.1 Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.3.2 Kelembagaan Koperasi dan UKM
 - 500.3.2.1 Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
 - 500.3.2.2 Tata Laksana Koperasi dan UKM
 - 500.3.2.3 Keanggotaan Koperasi
 - 500.3.2.4 Pengendalian dan Akuntabilitas
 - 500.3.3.1 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 500.3.3.2 Kehutanan dan Perkebunan
 - 500.3.3.3 Perikanan dan Peternakan
 - 500.3.3.4 Industri Kerajinan dan Pertambangan
 - 500.3.3.5 Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
- 500.3.4 Pembiayaan
 - 500.3.4.1 Program Pendanaan
 - 500.3.4.2 Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
 - 500.3.4.3 Urusan Permodalan
 - 500.3.4.4 Asuransi dan Jasa Keuangan
 - 500.3.4.5 Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
 - 500.3.4.6 Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
- 500.3.5 Pemasaran dan Jaringan Usaha
 - 500.3.5.1 Perdagangan Dalam Negeri
 - 500.3.5.2 Ekspor dan Impor
 - 500.3.5.3 Sarana dan Prasarana Pemasaran

- 500.3.5.4 Kemitraan dan Jaringan Usaha
- 500.3.5.5 Informasi dan Publikasi Bisnis
- 500.3.5.6 Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM
- 500.3.6 Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 500.3.6.1 Pengembangan Kewirausahaan
 - 500.3.6.2 Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
 - 500.3.6.3 Peran Serta Masyarakat
 - 500.3.6.4 Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
 - 500.3.6.5 Advokasi
- 500.3.7 Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
 - 500.3.7.1 Produktifitas dan Mutu
 - 500.3.7.2 Restrukturisasi Usaha
 - 500.3.7.3 Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
 - 500.3.7.4 Fasilitasi Investasi UKMK
 - 500.3.7.5 Pengembangan Sarana Bisnis
- 500.3.8 Pengkajian Sumber Daya UKMK
 - 500.3.8.1 Penelitian Koperasi
 - 500.3.8.2 Penelitian UKM
 - 500.3.8.3 Penelitian Sumber Daya
 - 500.3.8.4 Pengembangan Perkaderan UMK
- 500.3.9 Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga
- 500.3.10 Pedagang Kaki Lima (PKL)
 - 500.3.10.1 Peraturan Perundang-Undangan
 - 500.3.10.2 Sarana dan Prasarana
- 500.3.11 Monitoring dan Evaluasi

500.4 KEHUTANAN

- 500.4.1 Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.4.2 Penyuluhan
 - 500.4.2.1 Program Kerja Penyuluhan
 - 500.4.2.2 Materi Penyuluhan
 - 500.4.2.3 Program Penyuluhan
 - 500.4.2.4 Sarana Penyuluhan

- 500.4.2.5 Pengembangan Tenaga Penyuluhan
- 500.4.2.6 Pelaksanaan Penyuluhan
- 500.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat
- 500.4.2.8 Deseminasi
- 500.4.2.9 Evaluasi, dan Laporan
- 500.4.3 Planologi Kehutanan
 - 500.4.3.1 Perencanaan Makro Kawasan Hutan
 - 500.4.3.2 Penataan Ruang Kawasan Hutan
 - 500.4.3.3 Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan
 - 500.4.3.4 Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan
 - 500.4.3.5 Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
 - 500.4.3.6 Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
 - 500.4.3.7 Inventarisasi Sumber Daya Hutan
 - 500.4.3.8 Pemantauan Sumber Daya Hutan
 - 500.4.3.9 Pemetaan Sumber Daya Hutan
 - 500.4.3.10 Jaringan Data Spasial
 - 500.4.3.11 Penggunaan Kawasan Hutan
 - 500.4.3.12 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan
 - 500.4.3.13 Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
 - 500.4.3.14 Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
 - 500.4.3.15 Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
 - 500.4.3.16 Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
- 500.4.4 Bina Usaha Kehutanan
 - 500.4.4.1 Data areal HPH /HTI/IUPHHK
 - 500.4.4.2 SK HPH/HTI/IUPHHK
 - 500.4.4.3 Kerjasama
 - 500.4.4.4 Pembatalan/Penolakan
 - 500.4.4.5 Perpanjangan
 - 500.4.4.6 Modal dan Peralatan
 - 500.4.4.7 Investasi Industri

- 500.4.4.8 Peralatan
- 500.4.4.9 Tenaga Kerja
- 500.4.4.10 Pemegang Saham
- 500.4.4.11 Neraca Perusahaan
- 500.4.4.12 Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
- 500.4.4.13 Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
- 500.4.4.14 Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
- 500.4.4.15 Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
- 500.4.4.16 Target Produksi RKT dan Beban Kerja
- 500.4.4.17 Produksi Kayu
- 500.4.4.18 Produksi non kayu
- 500.4.4.19 Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
- 500.4.4.20 Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK
- 500.4.4.21 Industri Non Kayu
- 500.4.4.22 Hutan Tanaman Industri Pulp
- 500.4.4.23 Hutan Tanaman Industri Pertukangan
- 500.4.4.24 Pelanggaran dan Sanksi
- 500.4.4.25 Pemblokiran
- 500.4.4.26 Denda
- 500.4.4.27 Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK
- 500.4.4.28 Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
- 500.4.4.29 Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
- 500.4.4.30 Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
- 500.4.4.31 Pengembangan Investasi Usaha
- 500.4.4.32 Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
- 500.4.4.33 Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil
- 500.4.4.34 Produksi Hutan Alam
- 500.4.4.35 Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
- 500.4.4.36 Pengembangan Hutan Tanaman Industri
- 500.4.4.37 Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat

- 500.4.4.38 Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi
- 500.4.4.39 Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
- 500.4.4.40 Pembiayaan Hutan Tanaman
- 500.4.4.41 Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan
- 500.4.4.42 Peredaran Hasil Hutan
- 500.4.4.43 Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
- 500.4.4.44 Penertiban Peredaran Hasil Hutan
- 500.4.4.45 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
- 500.4.4.46 Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
- 500.4.4.47 Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
- 500.4.4.48 Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
- 500.4.4.49 Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur
- 500.4.5 Standardisasi dan Lingkungan
 - 500.4.5.1 Standardisasi
 - 500.4.5.2 Sarana Pengujian Hasil Hutan
 - 500.4.5.3 Pengembangan
 - 500.4.5.4 Pemasaran Hasil Hutan
 - 500.4.5.5 Pengendalian Lingkungan
 - 500.4.5.6 Angkutan Hasil Hutan
 - 500.4.5.7 Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan
 - 500.4.5.8 Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
 - 500.4.5.9 Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan
 - 500.4.5.10 Pass Angkutan Hasil Hutan
 - 500.4.5.11 Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
- 500.4.6 Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
 - 500.4.6.1 Flora dan Fauna yang Dilindungi
 - 500.4.6.2 Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
 - 500.4.6.3 Lembaga Konservasi/Kebun Binatang
 - 500.4.6.4 Konvensi Keanekaragaman Hayati
 - 500.4.6.5 Kawasan Konservasi

- 500.4.6.6 Pengamanan Hutan
- 500.4.6.7 Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan
- 500.4.6.8 Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan
- 500.4.6.9 Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- 500.4.6.10 Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
- 500.4.6.11 Bina Cinta Alam
- 500.4.6.12 Kader Konservasi Sumber Daya Alam
- 500.4.6.13 Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA
- 500.4.7 Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial
 - 500.4.7.1 Pengelolaan Benih
 - 500.4.7.2 Kebun Benih
 - 500.4.7.3 Tegakan Benih
 - 500.4.7.4 Pengadaan Benih
 - 500.4.7.5 Pengujian dan Penyimpanan Benih
 - 500.4.7.6 Lalu Lintas Angkutan Benih
 - 500.4.7.7 Pembibitan
 - 500.4.7.8 Lalu Lintas Angkutan Benih
 - 500.4.7.9 Pengembangan Usaha Perbenihan
 - 500.4.7.10 Pengendalian Peredaran Benih
 - 500.4.7.11 Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - 500.4.7.12 Tanaman Reboisasi
 - 500.4.7.13 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
 - 500.4.7.14 Perhutanan Sosial
 - 500.4.7.15 Pengendalian Perladangan
- 500.4.8 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
 - 500.4.8.1 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan
 - 500.4.8.2 Monitoring dan Evaluasi Penelitian
 - 500.4.8.3 Diseminasi
 - 500.4.8.4 Gelar Teknologi

500.4.8.5 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan

500.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN

500.5.1 Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.5.2 Perikanan Tangkap

500.5.2.1 Data dan Statistik Perikanan Tangkap

500.5.2.2 Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan

500.5.2.3 Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan

500.5.2.4 Pendaftaran Kapal Perikanan

500.5.2.5 Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan

500.5.2.6 Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

500.5.2.7 Alokasi Usaha Penangkapan Ikan

500.5.2.8 Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan

500.5.2.9 Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan

500.5.2.10 Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan

500.5.2.11 Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan

500.5.2.12 Kelembagaan Usaha Penangkapan

500.5.2.13 Investasi dan Permodalan Usaha

500.5.2.14 Kenelayanan

500.5.2.15 Pembinaan Pengelolaan Usaha

500.5.2.16 Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan

500.5.3 Perikanan Budidaya

500.5.3.1 Potensi Lahan dan Air

500.5.3.2 Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar

500.5.3.3 Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar

500.5.3.4 Perbenihan Skala Kecil

500.5.3.5 Informasi dan Distribusi Pembenihan

500.5.3.6 Budidaya Air Tawar

- 500.5.3.7 Budidaya Ikan Hias
- 500.5.3.8 Sertifikasi Budidaya Perikanan
- 500.5.3.9 Data dan Statistik Perikanan Budidaya
- 500.5.3.10 Hama dan Penyakit Ikan
- 500.5.3.11 Perlindungan Lingkungan Budidaya
- 500.5.3.12 Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
- 500.5.3.13 Kewirausahaan Budidaya
- 500.5.3.14 Pelayanan Usaha Budidaya
- 500.5.3.15 Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan
- 500.5.3.16 Promosi Usaha dan Budaya
- 500.5.4 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - 500.5.4.1 Standarisasi Pengolahan Hasil
 - 500.5.4.2 Pengembangan Produk
 - 500.5.4.3 Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
 - 500.5.4.4 Industri Pengolahan
 - 500.5.4.5 Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
 - 500.5.4.6 Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi
 - 500.5.4.7 Promosi dan Jaringan Ikan Hias
 - 500.5.4.8 Pengembangan Industri
 - 500.5.4.9 Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
 - 500.5.4.10 Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
 - 500.5.4.11 Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
 - 500.5.4.12 Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
 - 500.5.4.13 Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
 - 500.5.4.14 Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
 - 500.5.4.15 Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
 - 500.5.4.16 Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri

- 500.5.4.17 Pengembangan Ekspor
- 500.5.4.18 Pengembangan Impor
- 500.5.4.19 Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
- 500.5.4.20 Pelayanan Usaha
- 500.5.4.21 Kemitraan Usaha
- 500.5.4.22 Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
- 500.5.4.23 Investasi dan Permodalan
- 500.5.4.24 Informasi dan Promosi
- 500.5.5 Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
 - 500.5.5.1 Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi
 - 500.5.5.2 Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
 - 500.5.5.3 Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
 - 500.5.5.4 Informasi dan Evaluasi Spasial
 - 500.5.5.5 Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
 - 500.5.5.6 Konservasi Wawasan
 - 500.5.5.7 Konservasi Jenis Ikan
 - 500.5.5.8 Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
 - 500.5.5.9 Mitigasi Bencana Lingkungan
 - 500.5.5.10 Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
 - 500.5.5.11 Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
 - 500.5.5.12 Rehabilitasi dan Reklamasi
 - 500.5.5.13 Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
 - 500.5.5.14 Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil
 - 500.5.5.15 Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
 - 500.5.5.16 Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil
 - 500.5.5.17 Akses Permodalan
 - 500.5.5.18 Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - 500.5.5.19 Sosial Budaya Masyarakat
 - 500.5.5.20 Pengembangan Usaha

- 500.5.6 Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
 - 500.5.6.1 Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
 - 500.5.6.2 Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
 - 500.5.6.3 Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran
 - 500.5.6.4 Pengawasan Usaha Budidaya
 - 500.5.6.5 Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
 - 500.5.6.6 Pengawasan Pencemaran Perairan
 - 500.5.6.7 Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
 - 500.5.6.8 Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya NonHayati
 - 500.5.6.9 Logistik dan Operasional Wilayah Barat
 - 500.5.6.10 Logistik dan Operasional Wilayah Timur
 - 500.5.6.11 Perawatan Kapal Pengawas
 - 500.5.6.12 Pengawakan Kapal Pengawas
 - 500.5.6.13 Sistem Pemantauan
 - 500.5.6.14 Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
 - 500.5.6.15 Pemantauan Sumber Daya Perikanan
 - 500.5.6.16 Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
 - 500.5.6.17 Penyidikan
 - 500.5.6.18 Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
 - 500.5.6.19 Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
 - 500.5.6.20 Pemantauan dan Evaluasi Penanganan
- 500.5.7 Karantina Ikan
 - 500.5.7.1 Pemeriksaan Ikan
 - 500.5.7.2 Penahanan
 - 500.5.7.3 Pengasingan
 - 500.5.7.4 Pengamatan
 - 500.5.7.5 Pengakuan
 - 500.5.7.6 Penolakan
 - 500.5.7.7 Pemusnahan
 - 500.5.7.8 Persyaratan lalu Lintas Pemasukan

- 500.5.7.9 Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
- 500.5.7.10 Permohonan Sertifikat
- 500.5.7.11 Pemasukan Formulir
- 500.5.7.12 Pemasukan Sertifikat
- 500.5.7.13 Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
- 500.5.7.14 Surat Perintah
- 500.5.7.15 Rekomendasi
- 500.5.7.16 Penutupan Suatu Area
- 500.5.7.17 Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
- 500.5.7.18 Pengawasan Peraturan Perkarantinaaan
- 500.5.7.19 Pengawasan Pelaksanaan Operasional
- 500.5.7.20 Instalasi Karantina Sementara
- 500.5.7.21 Lokasi Karantina

500.6 PERTANIAN

- 500.6.1 Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.6.2 Perlindungan hortikultura
 - 500.6.2.1 Perlindungan Tanaman Buah
 - 500.6.2.2 Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
 - 500.6.2.3 Perlindungan Tanaman Florikultura
 - 500.6.2.4 Dampak iklim dan Persyaratan Teknis
- 500.6.3 Perbenihan Hortikultura
 - 500.6.3.1 Penilaian Varietas
 - 500.6.3.2 Pengawasan Mutu Benih
 - 500.6.3.3 Budidaya dan Pascapanen Florikultura
- 500.6.4 Perluasan dan Pengelolaan Lahan
 - 500.6.4.1 Basis Data Lahan
 - 500.6.4.2 Pengendalian Lahan
 - 500.6.4.3 Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
 - 500.6.4.4 Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
 - 500.6.4.5 Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
- 500.6.5 Pengelolaan Air Irigasi
 - 500.6.5.1 Pengembangan Sumber Air

- 500.6.5.2 Pengembangan Jaringan dan Optimalisasi Air
- 500.6.5.3 Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
- 500.6.5.4 Kelembagaan
- 500.6.6 Pembiayaan Pertanian
 - 500.6.6.1 Pembiayaan Program
 - 500.6.6.2 Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
 - 500.6.6.3 Pembiayaan agribisnis
 - 500.6.6.4 Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis
- 500.6.7 Pupuk Pestisida
 - 500.6.7.1 Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
 - 500.6.7.2 Pupuk Anorganik
 - 500.6.7.3 Pestisida
 - 500.6.7.4 Pengawasan Pupuk dan Pestisida
- 500.6.8 Alat dan Mesin Pertanian
 - 500.6.8.1 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
 - 500.6.8.2 Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
 - 500.6.8.3 Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
- 500.6.9 Perbenihan Tanaman Pangan
 - 500.6.9.1 Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
 - 500.6.9.2 Produksi Benih Serealia
 - 500.6.9.3 Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
 - 500.6.9.4 Kelembagaan Benih
- 500.6.10 Budidaya Serealia
 - 500.6.10.1 Padi Irigasi dan Rawa
 - 500.6.10.2 Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
 - 500.6.10.3 Jagung
 - 500.6.10.4 Serealia Lain
- 500.6.11 Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
 - 500.6.11.1 Kedelai
 - 500.6.11.2 Ubi Kayu
 - 500.6.11.3 Aneka Kacang
 - 500.6.11.4 Aneka Umbi

- 500.6.12 Tanaman Pangan
 - 500.6.12.1 Pengeloaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan
 - 500.6.12.2 Dampak Perubahan Iklim
 - 500.6.12.3 Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
 - 500.6.12.4 Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu
- 500.6.13 Pascapanen Tanaman Pangan
 - 500.6.13.1 Padi
 - 500.6.13.2 Jagung dan Serealialin
 - 500.6.13.3 Kedelai dan Aneka Kacang
 - 500.6.13.4 Aneka Umbi
- 500.6.14 Pengolahan Hasil Pertanian
 - 500.6.14.1 Tanaman Pangan
 - 500.6.14.2 Holtikultura
 - 500.6.14.3 Perkebunan
 - 500.6.14.4 Peternakan
- 500.6.15 Mutu dan Standariasi
 - 500.6.15.1 Standardisasi
 - 500.6.15.2 Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
 - 500.6.15.3 Akreditasi dan Kelembagaan
 - 500.6.15.4 Kerjasama dan Harmonisasi
- 500.6.16 Pengembangan Usaha dan Investasi
 - 500.6.16.1 Kemitraan dan Kewirausahaan
 - 500.6.16.2 Investasi
 - 500.6.16.3 Promosi Dalam Negeri
 - 500.6.16.4 Promosi Luar Negeri
- 500.6.17 Pemasaran Domestik
 - 500.6.17.1 Informasi Pasar
 - 500.6.17.2 PemantauanPasar dan Stabilisasi Harga
 - 500.6.17.3 Sarana dan Kelembagaan Pasar
 - 500.6.17.4 Jaringan Pemasaran
- 500.6.18 Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, TOR/Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat

- 500.6.19 Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
 - 500.6.19.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan
 - 500.6.19.2 Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
- 500.6.20 Diseminasi
- 500.6.21 Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian
 - 500.6.21.1 Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop
 - 500.6.21.2 Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya
- 500.6.22 Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
- 500.6.23 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
- 500.6.24 Data Penelitian dan Pengembangan
- 500.6.25 Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan
- 500.6.26 Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - 500.6.26.1 Hak Cipta
 - 500.6.26.2 Hak Paten Sederhana
 - 500.6.26.3 Hak Paten Biasa
 - 500.6.26.4 Hak Merek
 - 500.6.26.5 Pendaftaran Varietas Tanaman
 - 500.6.26.6 Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
 - 500.6.26.7 Permohonan HKI yang ditolak
- 500.6.27 Pelayanan Perijinan Pertanian
 - 500.6.27.1 Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)
 - 500.6.27.2 Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
 - 500.6.27.3 Sarana III (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
- 500.6.28 Pelayanan Hukum
 - 500.6.28.1 Sertifikasi

- 500.6.28.2 Pertimbangan Hukum
- 500.6.29 Karantina Pertanian
 - 500.6.29.1 Karantina Tumbuhan
 - 500.6.29.2 Karantina Hewan
- 500.6.30 Bimbingan Teknis
- 500.6.31 Evaluasi
- 500.7 PETERNAKAN
 - 500.7.1 Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.7.2 Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 500.7.2.1 Perbibitan Ternak, Antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran
 - 500.7.2.2 Pakan Ternak
 - 500.7.2.3 Budidaya Ternak
 - 500.7.2.4 Kesehatan Hewan, Antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan Dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan
 - 500.7.2.5 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran
 - 500.7.3 Bimbingn Teknis
 - 500.7.4 Evaluasi
- 500.8 PERKEBUNAN
 - 500.8.1 Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

- 500.8.2 Tanaman Semusim
 - 500.8.2.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim
 - 500.8.2.2 Perbenihan Tanaman Semusim
 - 500.8.2.3 Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim
 - 500.8.2.4 Pemberdayaan Tanaman Semusim
- 500.8.3 Tanaman Rempah & Penyegar
 - 500.8.3.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar
 - 500.8.3.2 Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar
 - 500.8.3.3 Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar
 - 500.8.3.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar
- 500.8.4 Tanaman Tahunan
 - 500.8.4.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan
 - 500.8.4.2 Perbenihan Tanaman Tahunan
 - 500.8.4.3 Budidaya Tanaman Tahunan
 - 500.8.4.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan
- 500.8.5 Perlindungan Perkebunan
 - 500.8.5.1 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan
 - 500.8.5.2 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar
 - 500.8.5.3 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan
 - 500.8.5.4 Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
- 500.8.6 Pascapanen dan Pembinaan Usaha
 - 500.8.6.1 Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar

- 500.8.6.2 Pascapanen Tanaman Tahunan
- 500.8.6.3 Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
- 500.8.6.4 Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik
- 500.8.7 Bimbingan Teknis Perkebunan
- 500.8.8 Evaluasi Perkebunan
- 500.9 PERINDUSTRIAN
 - 500.9.1 Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.9.2 Iklim Usaha dan Kerja Sama
 - 500.9.2.1 Industri Manufaktur
 - 500.9.2.2 Industri Agro
 - 500.9.2.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
 - 500.9.2.4 Industri Kecil dan Menengah
 - 500.9.3 Promosi Industri
 - 500.9.3.1 Industri Manufaktur
 - 500.9.3.2 Promosi Industri Agro
 - 500.9.3.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
 - 500.9.3.4 Industri Kecil dan Menengah
 - 500.9.4 Standarisasi dan Teknologi
 - 500.9.4.1 Industri Manufaktur
 - 500.9.4.2 Industri Agro
 - 500.9.4.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
 - 500.9.4.4 Industri Kecil dan Menengah
 - 500.9.5 Hak dan Kekayaan Intelektual
 - 500.9.5.1 Industri Manufaktur
 - 500.9.5.2 Industri Agro
 - 500.9.5.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
 - 500.9.5.4 Industri Kecil dan Menengah
 - 500.9.6 Industri Hijau
 - 500.9.6.1 Industri Manufaktur
 - 500.9.6.2 Industri Agro

- 500.9.6.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
- 500.9.6.4 Industri Kecil dan Menengah
- 500.9.7 Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota
- 500.9.8 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
- 500.9.9 Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri
- 500.9.10 Fasilitas Pengembangan Kawasan Industri
- 500.9.11 Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional
- 500.9.12 Standarisasi
 - 500.9.12.1 Standar
 - 500.9.12.2 Penyiapan Penerapan
 - 500.9.12.3 Infrastruktur Standar
- 500.9.13 Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
 - 500.9.13.1 Kebijakan Industri
 - 500.9.13.2 Perpajakan dan Tarif
 - 500.9.13.3 Pengembangan Model Industrial
- 500.9.14 Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri (Industri Hijau dan Lingkungan Hidup)
 - 500.9.14.1 Industri Hijau
 - 500.9.14.2 Lingkungan Hidup
 - 500.9.14.3 Energi
- 500.9.15 Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
 - 500.9.15.1 Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
 - 500.9.15.2 Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
 - 500.9.15.3 Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
- 500.9.16 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri
- 500.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 - 500.10.1 Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.10.2 Rekomendasi Kegeologian
 - 500.10.2.1 Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah

- 500.10.2.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
- 500.10.2.3 Pertambangan
- 500.10.2.4 Panas Bumi
- 500.10.2.5 Geosains
- 500.10.2.6 Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)
- 500.10.2.7 Kelayakan Lingkungan
- 500.10.3 Penelitian Kegeologian
 - 500.10.3.1 Administrasi pelaksanaan penelitian
 - 500.10.3.2 Administrasi tenaga penelitian
 - 500.10.3.3 Administrasipenggunaan peralatan penelitian
 - 500.10.3.4 Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi
 - 500.10.3.5 Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian
 - 500.10.3.6 Sumber Daya Geologi
 - 500.10.3.7 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
 - 500.10.3.8 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
 - 500.10.3.9 Survei Geologi
- 500.10.4 Inventarisasi dan evaluasi kegeologian
 - 500.10.4.1 Sumber Daya Geologi
 - 500.10.4.2 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
 - 500.10.4.3 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
 - 500.10.4.4 Survei Geologi
 - 500.10.4.5 Konservasi
- 500.10.5 Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi
 - 500.10.5.1 Peta potensi dan sebaran
 - 500.10.5.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
 - 500.10.5.3 Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami,

- Semburan Lumpur/Gas Serta kebakaran Batubara
- 500.10.5.4 Survei Geologi
- 500.10.6 Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
 - 500.10.6.1 Rencana Induk Jaringan Gas Bumi
 - 500.10.6.2 Rencana dan Realisasi Investasi
 - 500.10.6.3 Penetapan Harga Minyak Mentah
 - 500.10.6.4 Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi
 - 500.10.6.5 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
 - 500.10.6.6 Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
 - 500.10.6.7 Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri
 - 500.10.6.8 Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)
- 500.10.7 Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
 - 500.10.7.1 Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)
 - 500.10.7.2 Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)
 - 500.10.7.3 Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data

- Eksplorasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)
- 500.10.7.4 Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)
 - 500.10.7.5 Perpanjangan Kontrak KKS
 - 500.10.7.6 Penetapan Alokasi dan Harga Gas
 - 500.10.7.7 Partisipasi Interest
 - 500.10.7.8 Tumpang Tindih Lahan
 - 500.10.8 Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
 - 500.10.8.1 Perumusan pedoman, prosedur, Layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, Antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasahan), Pengawasan
 - 500.10.8.2 Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran
 - 500.10.8.3 Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
 - 500.10.9 Teknik dan Lingkungan
 - 500.10.9.1 Perumusan pelaksanaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
 - 500.10.9.2 Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), Antara lain: Berkas permohonan,

- Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT
- 500.10.9.3 Buku Register Welding Procedure Specification(WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)
- 500.10.9.4 Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las
- 500.10.9.5 Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
- 500.10.9.6 Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
- 500.10.9.7 Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
- 500.10.9.8 Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, Antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan Penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi
- 500.10.9.9 Penghargaan Keselamatan Kerja, Antara lain: surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
- 500.10.9.10 Usaha penunjang

- 500.10.10 Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
 - 500.10.10.1 Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
 - 500.10.10.2 Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
 - 500.10.10.3 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
 - 500.10.10.4 Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- 500.10.11 Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
 - 500.10.11.1 Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
 - 500.10.11.2 Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga
 - 500.10.11.3 Penyiapan Program Pemanfaatan Energi
 - 500.10.11.4 Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT
 - 500.10.11.5 Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT
 - 500.10.11.6 Penyusunan Neraca Energi
 - 500.10.11.7 Road Map di Bidang EBT
- 500.10.12 Panas Bumi
 - 500.10.12.1 Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
 - 500.10.12.2 Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
 - 500.10.12.3 Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
 - 500.10.12.4 Rekomendasi Bahan Peledak
 - 500.10.12.5 Perizinan penggunaan gudang bahan peledak
 - 500.10.12.6 Izin Tangki Bahan Bakar Cair
 - 500.10.12.7 Persetujuan sertifikasi Welding Procedure Specification (WPS) dan Procedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las
 - 500.10.12.8 Penerbitan Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
 - 500.10.12.9 Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)

- 500.10.12.10Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
- 500.10.12.11Penetapan kapasitas usaha panas bumi
- 500.10.12.12Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
- 500.10.12.13Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
- 500.10.12.14Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
- 500.10.12.15Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi
- 500.10.12.16Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
- 500.10.12.17Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
- 500.10.13 Bioenergi
 - 500.10.13.1 Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)
 - 500.10.13.2 Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)
 - 500.10.13.3 Penerbitan Rekomendasi Ekspor-Import
 - 500.10.13.4 Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
 - 500.10.13.5 Evaluasi/Revisi HIP BBN
 - 500.10.13.6 Database Pengusahaan Bioenergi
 - 500.10.13.7 Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik
 - 500.10.13.8 Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
 - 500.10.13.9 Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga
- 500.10.14 Aneka Energi
 - 500.10.14.1 Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
 - 500.10.14.2 Penetapan Kapasitas Usaha
 - 500.10.14.3 Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

- 500.10.14.4 Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
- 500.10.14.5 Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)
- 500.10.15 Konservasi Energi
 - 500.10.15.1 Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi
 - 500.10.15.2 Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi
 - 500.10.15.3 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE
 - 500.10.15.4 Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast
 - 500.10.15.5 Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi
 - 500.10.15.6 Penyusunan emisi energi gas rumah kaca
 - 500.10.15.7 Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi
 - 500.10.15.8 Profil investasi efisiensi energi
 - 500.10.15.9 Investment Grade Audit (IGA)
 - 500.10.15.10 Bimbingan Teknis Bidang EBTKE
- 500.10.16 Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE
 - 500.10.16.1 Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga
 - 500.10.16.2 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
 - 500.10.16.3 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE
 - 500.10.16.4 Evaluasi Program Kerja
- 500.10.17 Bina Program Tenaga Listrik
 - 500.10.17.1 Investasi dan pendanaan tenaga listrik, Antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan Infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan

infrastruktur penyediaan tenaga listrik,
Laporan kegiatan investasi dan pendanaan
tenaga listrik

500.10.17.2 Pengembangan listrik pedesaan, Antara
lain: Data program listrik perdesaan, Data
rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa
Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi
listrik pedesaan, Listrik untuk
masyarakat tidak mampu

500.10.17.3 Data dan Informasi Ketenagalistrikan

500.10.18 Bina Usaha Ketenagalistrikan

500.10.18.1 Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan,
Antara lain: Pelayanan izin usaha
penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan
IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan,
Data laporan berkala pemegang Izin

500.10.18.2 Harga dan Subsidi Listrik

500.10.18.3 Hubungan komersial tenaga listrik

500.10.18.4 Perlindungan konsumen listrik, Antara
lain: Penanganan pengaduan Konsumen
listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu
pelayanan Tenaga listrik, Dokumen
Evaluasi Realisasi tingkat mutu pelayanan
Tenaga listrik, Dokumen
evaluasi pemberian kompensasi pinalti
tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)

500.10.19 Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

500.10.19.1 Kelaikan teknik dan keselamatan Ketenaga
listrikan

500.10.19.2 Penyiapan kompetensi dan
pengawasan tenaga teknik
ketenagalistrikan

500.10.19.3 Usaha penunjang ketenagalistrikan,
Antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa
Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL),
Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan
Tenaga Listrik untuk Kepentingan

Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)

500.10.19.2 Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sector ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan factor emisi Clean Development Mechansim (CDM)

500.10.20 Sertifikasi

500.10.20.1 Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik

500.10.20.2 Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)

500.10.20.3 Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik

500.10.20.4 Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik

500.10.20.5 Registrasi Sertifikasi

500.10.21 Akreditasi Ketenagalistrikan

500.10.22 Standarisasi Kompetensi

500.10.23 Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan

500.10.23.1 Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan

500.10.23.2 Forum consensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan

500.10.23.3 Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan

500.10.23.4 Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan

500.10.24 Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan

- 500.10.24.1 Klasifikasi usaha penunjang
ketenagalistrikan
- 500.10.24.2 Kualifikasi usaha penunjang
ketenagalistrikan
- 500.10.24.3 Dokumen penunjukan LIT (Lembaga
Inspeksi Teknis)
- 500.10.24.4 Laporan berkala pemegang penunjukan
LIT
- 500.10.24.5 Laporan hasil pengawasan penunjukan
- 500.10.25 Bina Program Mineral dan Batubara
 - 500.10.25.1 Penyiapan dan Perencanaan Program
Mineral dan Batubara
 - 500.10.25.2 Rencana Induk Mineral dan Batubara
 - 500.10.25.3 Pengembangan Investasi dan Kerja
Sama Bidang Mineral dan Batubara
 - 500.10.25.4 Data dan Informasai Mineral dan Batubara
 - 500.10.25.5 Pelaporan Program Mineral dan Batubara
 - 500.10.25.6 Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran
Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara
melalui lelang reguler
 - 500.10.25.7 Data dan Informasi Wilayah Mineral dan
Batubara
 - 500.10.25.8 Perencanaan Produksi Mineral dan
Batubara
 - 500.10.25.9 Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral
dan Batubara
- 500.10.26 Pembinaan Pengusahaan Mineral
 - 500.10.26.1 Ketenagakerjaan
 - 500.10.26.2 Pemberdayaan masyarakat sekitar
tambang
 - 500.10.26.3 Penyelesaian perselisihan usaha
pertambangan mineral
 - 500.10.26.4 Rekomendasi kegiatan usaha
pertambangan mineral
 - 500.10.26.5 Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral

- 500.10.26.6 Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)
- 500.10.26.7 Perizinan usaha pertambangan mineral
- 500.10.26.8 Kontrak Karya (KK)
- 500.10.26.9 Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)
- 500.10.26.10 Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
- 500.10.26.11 Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral
- 500.10.26.12 Teguran kepada pengusaha Kontrak Karya (KK)
- 500.10.26.13 Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral
- 500.10.26.14 Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
- 500.10.26.15 Pelaporan usaha pertambangan mineral
- 500.10.26.16 Penghargaan usaha pertambangan mineral
- 500.10.26.17 Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
- 500.10.27 Pembinaan Pengusahaan Batubara
 - 500.10.27.1 Ketenagakerjaan
 - 500.10.27.2 Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
 - 500.10.27.3 Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara
 - 500.10.27.4 Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara
 - 500.10.27.5 Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara
 - 500.10.27.6 Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut), Antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara

- PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara
- 500.10.27.7 Perizinan Usaha Pertambangan Batubara
- 500.10.27.8 Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
- 500.10.27.9 Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), Antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist)
- 500.10.27.10 Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
- 500.10.27.11 Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
- 500.10.27.12 Teguran kepada pengusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
- 500.10.27.13 Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara
- 500.10.27.14 Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
- 500.10.27.15 Pelaporan usaha pertambangan batubara
- 500.10.27.16 Penghargaan usaha pertambangan batubara
- 500.10.27.17 Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara
- 500.10.28 Penerimaan Negara
 - 500.10.28.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - 500.10.28.2 Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - 500.10.28.3 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
- 500.10.29 Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
 - 500.10.29.1 Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional

- Indonesia), Antara lain: Draft Rancangan,
Rancangan Standar Nasional
- 500.10.29.2 Pengawasan Standardisasi
- 500.10.29.3 Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil
Kepala Teknik Tambang
- 500.10.29.4 Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan
Keselamatan Pekerja, Antara lain: Laporan
Kecelakaan Tambang/Statistik hingga
Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3)
- 500.10.29.5 Pemeriksaan teknis dan pengujian
instalasi dan peralatan tambang, Antara
lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi
dan Peralatan
- 500.10.29.6 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL)
- 500.10.29.7 Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan
Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
- 500.10.29.8 Rekomendasi bahan kimia
- 500.10.29.9 Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan, Antara lain:
Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan
Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan
Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan
Jaminan Pasca Tambang
- 500.10.29.10 Laporan berkala teknik dan lingkungan
pertambangan/ laporan tahunan, Antara
lain: Laporan Bulanan Terjadinya
Pencemaran (LPL- 5) pelaksanaan
reklamasi
- 500.10.29.11 Pemberian Penghargaan, Antara lain:
Pemberian Penghargaan Lingkungan
Pertambangan, Pemberian Penghargaan
Keselamatan Kerja, Dokumen Pengajuan
dan Penilaian Tanda Penghargaan
lingkungan Pertambangan, Dokumen

Pengajuan dan Penilaian Tanda
Penghargaan Keselamatan

500.10.29.12 Pengawasan lingkungan pertambangan

500.10.29.13 Usaha Jasa Mineral dan Batubara

500.10.29.14 Pembinaan dan pengawasan usaha jasa
mineral dan batubara

500.10.29.15 Rekomendasi Teknis, Antara lain:
Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil
Evaluasi

500.10.29.16 Persetujuan Teknis, Antara lain:
Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil
Evaluasi

500.10.29.17 Pengawasan Teknis

500.10.29.18 Pengawasan Konservasi Mineral dan
Batubara

500.10.29.19 Peminaan Teknik dan Lingkungan
Mineral dan Batubara, Antara lain:
Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan
Teknis

500.10.30 Program Penelitian dan Pengembangan

500.10.30.1 Rencana Penelitian dan Pengembangan

500.10.30.2 Pengembangan dan inovasi

500.10.30.3 Dokumen penerapan/pemanfaatan
/pendayagunaan/replikasi /prototipe Hasil
penelitian/pengkajian/pengembangan/ino
vasi

500.10.30.4 Advokasi dan fasilitasi penelitian,
pengembangan dan inovasi

500.10.30.5 Diseminasi hasil penelitian,
pengembangan dan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi

500.10.30.6 Pembinaan penelitian/Pengembangan,
pengkajian, dan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi

500.10.30.7 Jaringan Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi

- 500.10.30.8 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 500.10.30.9 Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 500.10.30.10 Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
- 500.10.30.11 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 500.10.30.12 Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK
- 500.10.30.13 Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral
- 500.10.31 Sarana Litbang
 - 500.10.31.1 Administrasi penggunaan peralatan
 - 500.10.31.2 Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi
- 500.10.32 Afiliasi
 - 500.10.32.1 Proyek Percontohan
 - 500.10.32.2 Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
 - 500.10.32.3 Pembinaan Penelitian dan Pengembangan Penyajian Informasi
- 500.10.33 Penelitian dan Pengembangan Kegeologian
 - 500.10.33.1 Pemetaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan
 - 500.10.33.2 Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai
 - 500.10.33.3 Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan
 - 500.10.33.4 Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan
- 500.10.34 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi
 - 500.10.34.1 Teknologi Eksplorasi
 - 500.10.34.2 Teknologi Eksploitasi
 - 500.10.34.3 Laboratorium
 - 500.10.34.4 Study

- 500.10.34.5 Teknologi Proses
- 500.10.34.6 Teknologi Aplikasi Produk
- 500.10.34.7 Teknologi Gas
- 500.10.35 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara
 - 500.10.35.1 Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya
 - 500.10.35.2 Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral
 - 500.10.35.3 Teknologi Pemanfaatan Batubara
- 500.10.36 Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan
 - 500.10.36.1 Energi baru terbarukan
 - 500.10.36.2 Teknologi Ketenagalistrikan
 - 500.10.36.3 Lingkungan dan Konservasi Energi
 - 500.10.36.4 Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi
- 500.11 PERHUBUNGAN
 - 500.11.1 Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.11.2 Jaringan Prasarana dan Pelayanan
 - 500.11.2.1 Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang
 - 500.11.2.2 Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
 - 500.11.2.3 Penetapan lokasi terminal barang utama
 - 500.11.2.4 Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
 - 500.11.2.5 Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi
 - 500.11.2.6 Jaringan lintas pada jaringan jalan primer
 - 500.11.2.7 Penetapan kelas jalan primer
 - 500.11.2.8 Kualifikasi teknis petugas terminal
 - 500.11.2.9 Jaringan transportasi jalan sekunder
 - 500.11.3 Pengembangan Transportasi Jalan

- 500.11.3.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
- 500.11.3.2 Pengembangan transportasi jalan
- 500.11.4 Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 500.11.4.1 Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
 - 500.11.4.2 Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
 - 500.11.4.3 Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
 - 500.11.4.4 Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
- 500.11.5 Teknologi Kendaraan Bermotor
 - 500.11.5.1 Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
 - 500.11.5.2 Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
 - 500.11.5.3 Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
 - 500.11.5.4 Harmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan bermotor
- 500.11.6 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - 500.11.6.1 Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan
 - 500.11.6.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional
- 500.11.7 Perlengkapan Jalan
 - 500.11.7.1 Pedoman teknis perlengkapan jalan
 - 500.11.7.2 Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
 - 500.11.7.3 Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
 - 500.11.7.4 Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor
 - 500.11.7.5 Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional
- 500.11.8 Angkutan Penumpang
 - 500.11.8.1 Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi

- 500.11.8.2 Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
- 500.11.8.3 Izin trayek antar kota antar provinsi
- 500.11.8.4 Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi
- 500.11.8.5 Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
- 500.11.8.6 Pemberian subsidi angkutan umum
- 500.11.8.7 Angkutan perintis
- 500.11.8.8 Penghargaan perusahaan angkutan umum
- 500.11.9 Angkutan Barang
 - 500.11.9.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
 - 500.11.9.2 Tarif angkutan barang
 - 500.11.9.3 Izin operasi angkutan barang tertentu
 - 500.11.9.4 Pembinaan angkutan barang
 - 500.11.9.5 Izin dispensasi angkutan jalan
- 500.11.10 Monitoring Operasional
 - 500.11.10.1 Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 500.11.10.2 Pengawasan, penertiban dan pemberian Sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan
 - 500.11.10.3 Berkas Pelanggaran Perda
- 500.11.11 Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - 500.11.11.1 Pedoman Teknis
 - 500.11.11.2 Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
 - 500.11.11.2 Bimtek PPNS
 - 500.11.11.3 Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

- 500.11.12 Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.12.1 Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
 - 500.11.12.2 Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan
- 500.11.13 Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.13.1 Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)
 - 500.11.13.2 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.14 Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- 500.11.15 Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
 - 500.11.15.1 Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.15.2 Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan
- 500.11.16 Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.16.1 Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.16.2 Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan
 - 500.11.16.3 Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional

- 500.11.16.4 Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.17 Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.18 Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.18.1 Manajemen lalu lintas
 - 500.11.18.2 Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.18.3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau
 - 500.11.18.4 Sertifikasi inspektur sungai dan danau Dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau
- 500.11.19 Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.19.1 Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan
 - 500.11.19.2 Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau
 - 500.11.19.3 Perambuan sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.20 Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.20.1 Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.20.2 Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional
- 500.11.21 Tarif dan Keperintisan
 - 500.11.21.1 Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.21.2 Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan
- 500.11.22 Bina Sistem Transportasi Perkotaan
 - 500.11.22.1 Jaringan Transportasi Perkotaan

- 500.11.22.2 Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
- 500.11.22.3 Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
- 500.11.23 Lalu Lintas Perkotaan
 - 500.11.23.1 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
 - 500.11.23.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
 - 500.11.23.3 Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
- 500.11.24 Angkutan Perkotaan
 - 500.11.24.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
 - 500.11.24.2 Jaringan trayek perkotaan
 - 500.11.24.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
- 500.11.25 Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan
 - 500.11.25.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang
 - 500.11.25.2 Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
 - 500.11.25.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi

- 500.11.26 Dampak Transportasi Perkotaan
 - 500.11.26.1 Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan
 - 500.11.26.2 Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
 - 500.11.26.3 Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan
 - 500.11.26.4 Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan Kota
 - 500.11.26.5 Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
 - 500.11.26.6 Masterplan transportasi perkotaan
- 500.11.27 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan
 - 500.11.27.1 Monitoring dan evaluasi data kecelakaan
 - 500.11.27.2 Kualifikasi unit pengkajian
 - 500.11.27.3 Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.28 Pengembangan Keselamatan
 - 500.11.28.1 Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
 - 500.11.28.2 Harmonisasi kebijakan
- 500.11.29 Promosi dan Kemitraan Keselamatan
 - 500.11.29.1 Promosi Keselamatan: penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.29.2 Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan

- 500.11.30 Bina Keselamatan Angkutan Umum
 - 500.11.30.1 Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum
 - 500.11.30.2 Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau
- 500.11.31 Audit Keselamatan
 - 500.11.31.1 Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia
 - 500.11.31.2 Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.31.3 Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
- 500.11.32 Inspeksi Keselamatan
 - 500.11.32.1 Pedoman keselamatan
 - 500.11.32.2 Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberanga
 - 500.11.32.3 Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
- 500.11.33 Parkir
 - 500.11.33.1 Surat Tugas Juru Parkir
 - 500.11.33.2 Izin tempat khusus parkir swasta
 - 500.11.33.3 Surat Tugas TKP Pemerintah
- 500.12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 - 500.12.1 Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.12.2 Telekomunikasi
 - 500.12.2.1 Layanan Jaringan Telekomunikasi
 - 500.12.2.2 Layanan Jasa Telekomunikasi
 - 500.12.2.3 Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
 - 500.12.2.4 Kelayakan Sistem Telekomunikasi

- 500.12.3 Penyiaran
 - 500.12.3.1 Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi
 - 500.12.3.2 Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi
- 500.12.4 Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal
 - 500.12.4.1 Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah
 - 500.12.4.2 Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah
 - 500.12.4.3 Layanan Khusus Penyiaran
 - 500.12.4.4 Pelayanan Kewajiban Universal
 - 500.12.4.5 Pengembangan Infrastruktur
- 500.12.5 Pengendalian Informatika
 - 500.12.5.1 Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi
 - 500.12.5.2 Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
 - 500.12.5.3 Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
 - 500.12.5.4 Pencegahan dan Penertiban
- 500.12.6 e- Government
 - 500.12.6.1 Tata Kelola e-Government
 - 500.12.6.2 Teknologi dan Infrastruktur e-Government
 - 500.12.6.3 Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government
 - 500.12.6.4 Aplikasi Layanan Pemerintahan
 - 500.12.6.5 Aplikasi Layanan Publik
- 500.12.7 e- Business
 - 500.12.7.1 Tata Kelola e-Business
 - 500.12.7.2 Teknologi dan Infrastruktur e-Business
 - 500.12.7.3 Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business
 - 500.12.7.4 Aplikasi Layanan e-Business

- 500.12.8 Pemberdayaan Informatika Masyarakat
 - 500.12.8.1 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
 - 500.12.8.2 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
- 500.12.9 Pemberdayaan Industri Informatika
 - 500.12.9.1 Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
 - 500.12.9.2 Industri Perangkat Informatika Pengguna
 - 500.12.9.3 Industri Perangkat Lunak
 - 500.12.9.4 Industri Konten Multimedia
- 500.12.10 Keamanan Informasi
 - 500.12.10.1 Tata Kelola Keamanan Informasi
 - 500.12.10.2 Teknologi Keamanan Informasi
 - 500.12.10.3 Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
 - 500.12.10.4 Penyidikan dan Penindakan
 - 500.12.10.5 Budaya Keamanan Informasi
- 500.12.11 Komunikasi Publik
 - 500.12.11.1 Tata Kelola Komunikasi Publik
 - 500.12.11.2 Pengelolaan Opini Publik
 - 500.12.11.3 Layanan Komunikasi Publik
- 500.12.12 Pengolahan dan Penyediaan Informasi
 - 500.12.12.1 Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
 - 500.12.12.2 Informasi Perekonomian
 - 500.12.12.3 Informasi Kesejahteraan Rakyat
- 500.12.13 Pengelolaan Media Publik
 - 500.12.13.1 Media Cetak
 - 500.12.13.2 Media Online
 - 500.12.13.3 Media Luar Ruang dan Audio Visual
- 500.12.14 Kemitraan Komunikasi
 - 500.12.14.1 Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
 - 500.12.14.2 Kemitraan Media dan Dunia Usaha
 - 500.12.14.3 Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi

- 500.12.15 Infrastruktur Informatika
 - 500.12.15.1 Jaringan
 - 500.12.15.2 Piranti Teknologi Informatika
 - 500.12.15.3 Keamanan Informatika
- 500.12.16 Sistem dan Data
 - 500.12.16.1 Portal dan Konten
 - 500.12.16.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data
 - 500.12.16.3 Pengembangan Aplikasi
- 500.12.17 Pusat Kerjasama
 - 500.12.17.1 Kerja Sama daerah
 - 500.12.17.2 Kerja Sama Bilateral
- 500.12.18 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
 - 500.12.18.1 Pelayanan Informasi
 - 500.12.18.2 Hubungan Masyarakat
 - 500.12.18.3 Bimbingan Teknis
- 500.12.19 Evaluasi

500.13 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

- 500.13.1 Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.13.2 Pengembangan Destinasi Wisata
 - 500.13.2.1 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
 - 500.13.2.2 Pengembangan Daya Tarik Wisata
 - 500.13.2.3 Industri Pariwisata
 - 500.13.2.4 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
 - 500.13.2.5 Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event
- 500.13.3 Pemasaran Pariwisata
 - 500.13.3.1 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
 - 500.13.3.2 Promosi Pariwisata Luar Negeri
 - 500.13.3.3 Promosi Pariwisata Dalam Negeri
 - 500.13.3.4 Pencitraan Indonesia
- 500.13.4 Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
 - 500.13.4.1 Pengembangan industri Perfilman

- 500.13.4.2 Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
- 500.13.4.3 Pengembangan Seni Rupa
- 500.13.5 Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK
 - 500.13.5.1 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
 - 500.13.5.2 Desain dan Arsitektur
 - 500.13.5.3 Kerjasama dan Fasilitas
- 500.13.6 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 500.13.6.1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata
 - 500.13.6.2 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
 - 500.13.6.3 Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 500.13.6.4 Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

500.14 STATISTIK

- 500.14.1 Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.14.2 Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi
 - 500.14.2.1 Perencanaan
 - 500.14.2.2 Persiapan, Antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan Kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan

- koordinasi (intern dan ekstern),
Pelaksanaan Pelatihan instruktur (TOT),
Pelaksanaan pelatihan petugas,
Penyusunan program pengolahan (rule
validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi),
Pelatihan petugaspengolahan Perancangan
tabel, Pelaksanaan Ujicoba pengolahan,
Perancangan tabel, Pelaksanaan Uji coba
- 500.14.2.3 Pelaksanaan Lapangan
- 500.14.2.4 Pengolahan, Antara lain : Pengelolaan
dokumen (penerimaan/pengiriman,
pengelompokkan/ Batching), Pemeriksaan
dokumen dan pengkodean
(Editing/Coding), Perekaman data (entri,
scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan
tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi
- 500.14.2.5 Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
- 500.14.2.6 Diseminasi hasil sensus
- 500.14.3 Survei
 - 500.14.3.1 Perencanaan
 - 500.14.3.2 Persiapan
 - 500.14.3.3 PelaksanaanLapangan, Antara lain:
Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel,
Pengumpulan data, Pemeriksaan,
Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas
 - 500.14.3.4 Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan
dokumen (penerimaan/ pengiriman,
pengelompokkan/ Batching),
Pemeriksaan dokumen dan
pengkodean (Editing/Coding), Perekaman
data (entri, scanner), Tabulasi Data,
Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi
tabulasi
 - 500.14.3.5 Analisis dan Penyajian Hasil Survei, Antara
lain: Pembahasan angka hasil pengolahan,
Penyusunan
 - 500.14.3.6 Diseminasi hasil Survei

- 500.14.4 Konsolidasi Data Statistik
 - 500.14.4.1 Kompilasi Data
 - 500.14.4.2 Analisis data
 - 500.14.4.3 Penyusunan Publikasi
- 500.14.5 Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik

500.15 KETENAGAKERJAAN

- 500.15.1 Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.15.2 Perencanaan Tenaga Kerja
 - 500.15.2.1 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
 - 500.15.2.2 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
- 500.15.3 Pengembangan Standarisasi Kompetensi
 - 500.15.3.1 Penerapan Standar Kompetensi
 - 500.15.3.2 Pengembangan Standarisasi Kompetensi
 - 500.15.3.3 Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
 - 500.15.3.4 Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
 - 500.15.3.5 Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
- 500.15.4 Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja
 - 500.15.4.1 Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
 - 500.15.4.2 Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
 - 500.15.4.3 Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
 - 500.15.4.4 Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
- 500.15.5 Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
 - 500.15.5.1 Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
 - 500.15.5.2 Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
 - 500.15.5.3 Tenaga Pelatihan

- 500.15.5.4 Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
- 500.15.6 Bina Pemagangan
 - 500.15.6.1 Pemagangan Dalam Negeri
 - 500.15.6.2 Pemagangan Luar Negeri
 - 500.15.6.3 Perizinan dan Advokasi Pemagangan
 - 500.15.6.4 Promosi dan Jenjang Pemagangan
- 500.15.7 Produktivitas dan Kewirausahaan
 - 500.15.7.1 Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
 - 500.15.7.2 Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
 - 500.15.7.3 Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
 - 500.15.7.4 Pengembangan Kewirausahaan
- 500.15.8 Pengembangan Pasar Kerja
 - 500.15.8.1 Informasi Pasar Kerja
 - 500.15.8.2 Analisis Pasar Kerja
 - 500.15.8.3 Bursa Kerja
 - 500.15.8.4 Analisis Jabatan
- 500.15.9 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
 - 500.15.9.1 Antar Kerja
 - 500.15.9.2 Penempatan Tenaga Kerja Khusus
 - 500.15.9.3 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
 - 500.15.9.4 Pemberdayaan Pengantar Kerja
- 500.15.10 Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal
 - 500.15.10.1 Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal
 - 500.15.10.2 Pengembangan Padat Karya
 - 500.15.10.3 Terapan Teknologi Tepat Guna
 - 500.15.10.4 Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga
- 500.15.11 Standardisasi Profesi
 - 500.15.11.1 Sistem Informasi dan Registrasi
 - 500.15.11.2 Pembakuan Akreditasi

- 500.15.12 Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi
 - 500.15.12.1 Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
 - 500.15.12.2 Perjanjian Kerja
 - 500.15.12.3 Kesejahteraan Pekerja
 - 500.15.12.4 Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
- 500.15.13 Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
 - 500.15.13.1 Organisasi Pekerja dan Pengusaha
 - 500.15.13.2 Kelembagaan Hubungan Industrial
 - 500.15.13.3 Pemasyarakatan Hubungan Industrial
- 500.15.14 Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - 500.15.14.1 Pengupahan
 - 500.15.14.2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
- 500.15.15 Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial
 - 500.15.15.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
 - 500.15.15.2 Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - 500.15.15.3 Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- 500.15.16 Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - 500.15.16.1 Pengawasan Norma Kerja
 - 500.15.16.2 Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
 - 500.15.16.3 Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
- 500.15.17 Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
 - 500.15.17.1 Pengawasan Norma Kerja Perempuan
 - 500.15.17.2 Pengawasan Norma Kerja Anak
 - 500.15.17.3 Kerjasama Lintas Sektoral

- 500.15.17.4 Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
- 500.15.18 Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 500.15.18.1 Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
 - 500.15.18.2 Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakara
 - 500.15.18.3 Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
 - 500.15.18.4 Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
 - 500.15.18.5 Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
- 500.15.19 Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan
- 500.15.20 Bina Penegakan Hukum
 - 500.15.20.1 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
 - 500.15.20.2 Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
 - 500.15.20.3 Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - 500.15.20.4 Kerjasama Penegakan Hukum
- 500.15.21 Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 500.15.21.1 Analisis dan Standardisasi bidang K3
 - 500.15.21.2 Hasil kajian, perekayasa dan penerapan teknologi dan alih teknologi K3
 - 500.15.21.3 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3
 - 500.15.21.4 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
- 500.15.22 Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.1 Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.2 Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.3 Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.4 Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

- 500.15.22.5 Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
- 500.15.22.6 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

500.16 PENANAMAN MODAL

- 500.16.1 Kebijakan dibidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.16.2 Perencanaan Penanaman Modal
 - 500.16.2.1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
 - 500.16.2.2 Perencanaan Industri Manufaktur
 - 500.16.2.3 Perencanaan Jasa dan Kawasan
 - 500.16.2.4 Perencanaan Infrastruktur
- 500.16.3 Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 500.16.3.1 Deregulasi Penanaman Modal
 - 500.16.3.2 Pengembangan Potensi Daerah
 - 500.16.3.3 Pemberdayaan Usaha
 - 500.16.3.4 Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
 - 500.16.3.5 Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
 - 500.16.3.6 Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
- 500.16.4 Promosi Penanaman Modal
 - 500.16.4.1 Pengembangan Promosi
 - 500.16.4.2 Analisis Strategi Promosi
 - 500.16.4.3 Fasilitasi Promosi Luar Negeri
 - 500.16.4.4 Promosi Sektoral
 - 500.16.4.5 Fasilitasi Promosi Daerah
 - 500.16.4.6 Pameran dan Sarana Promosi
- 500.16.5 Kerja Sama Penanaman Modal
 - 500.16.5.1 Kerja Sama Bilateral dan Multilateral
 - 500.16.5.2 Kerja Sama Regional
 - 500.16.5.3 Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
- 500.16.6 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 500.16.6.1 Pemantauan Penanaman Modal
 - 500.16.6.2 Data Realisasi Penanaman Modal

- 500.16.6.3 Bimbingan Sosialisasi Ketentuan
Penanaman Modal
- 500.16.6.4 Fasilitas Penyelesaian Masalah
- 500.16.6.5 Pengawasan Penanaman Modal
- 500.16.6.6 Pencabutan/Pembatalan Perizinan
Penanaman Modal
- 500.16.7 Pelayanan Penanaman Modal
 - 500.16.7.1 Pelayanan Aplikasi
 - 500.16.7.2 Pelayanan Perijinan
 - 500.16.7.3 Pelayanan Konsultasi Perijinan
 - 500.16.7.4 Pelayanan Non Perijinan
 - 500.16.7.5 Pelayanan Fasilitas
- 500.17 PERTANAHAN
 - 500.17.1 Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah
 - 500.17.2 Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan
 - 500.17.2.1 Fasilitas Pengadaan Tanah
 - 500.17.2.2 Pembinaan dan Pengendalian
Administrasi Pertanahan
 - 500.17.2.3 Data dan Informasi Pertanahan
 - 500.17.2.4 Advokasi dan Pengendalian
 - 500.17.3 Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah
 - 500.17.3.1 Penatagunaan Tanah
 - 500.17.3.2 Data dan Pemetaan Tematik
 - 500.17.3.3 Penguatan Atas Tanah
 - 500.17.4 Sengketa Tanah
 - 500.17.4.1 Pengkajian dan Penanganan Sengketa
 - 500.17.4.2 Advokasi dan Pengendalian
- 500.18 TRANSMIGRASI
 - 500.18.1 Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah
 - 500.18.2 Penyediaan Tanah Transmigrasi
 - 500.18.2.1 Fasilitas Pengadaan Tanah
 - 500.18.2.2 Pengurusan Legalitas Tanah
 - 500.18.2.3 Dokumentasi Pertanahan

- 500.18.2.4 Advokasi Pertanahan
- 500.18.3 Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi
 - 500.18.3.1 Penyiapan Lahan
 - 500.18.3.2 Penyiapan Sarana
 - 500.18.3.3 Penyiapan Prasarana
 - 500.18.3.4 Evaluasi Kelayakan Permukiman
- 500.18.4 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi
 - 500.18.4.1 Penyiapan Calon Transmigrasi
 - 500.18.4.2 Penyiapan Perpindahan
 - 500.18.4.3 Pelaksanaan Perpindahan
 - 500.18.4.4 Penataan dan Adaptasi
- 500.18.5 Partisipasi Masyarakat
 - 500.18.5.1 Promosi dan Motivasi
 - 500.18.5.2 Kerjasama Kelembagaan
 - 500.18.5.3 Kerjasama Antar Daerah
 - 500.18.5.4 Pelayanan Investasi
- 500.18.6 Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
 - 500.18.6.1 Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
 - 500.18.6.2 Bina Sistem Informasi
 - 500.18.6.3 Perencanaan Pengembangan Kawasan
 - 500.18.6.4 Perencanaan Pengembangan Masyarakat
 - 500.18.6.5 Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan
- 500.18.7 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat
 - 500.18.7.1 Bantuan Pangan dan Kesehatan
 - 500.18.7.2 Fasilitas Sosial Budaya
 - 500.18.7.3 Pengembangan Kelembagaan
 - 500.18.7.4 Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi
- 500.18.8 Pengembangan Usaha
 - 500.18.8.1 Kewirausahaan
 - 500.18.8.2 Produksi

- 500.18.8.3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran
- 500.18.8.4 Lembaga Ekonomi dan permodalan
- 500.18.9 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
 - 500.18.9.1 Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
 - 500.18.9.2 Pengembangan Sarana
 - 500.18.9.3 Pengembangan Prasarana
 - 500.18.9.4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
- 500.18.10 Penyerasian Lingkungan
 - 500.18.10.1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
 - 500.18.10.2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
 - 500.18.10.3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
 - 500.18.10.4 Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan
- 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
 - 600.1 PEKERJAAN UMUM
 - 600.1.1 Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 600.1.2 Penatagunaan Sumber Daya Air
 - 600.1.2.1 Perencanaan Wilayah Sungai
 - 600.1.2.2 Kelembagaan
 - 600.1.2.3 Pemanfaatan Sumber Daya Air
 - 600.1.2.4 Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
 - 600.1.2.5 Pengaturan dan Pemantauan
 - 600.1.3 Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
 - 600.1.3.1 Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
 - 600.1.3.2 Manajemen Mutu
 - 600.1.3.3 Informasi dan Data Sumber Daya Air
 - 600.1.3.4 Keterpaduan Pemrograman
 - 600.1.4 Pengelolaan Sumber Daya Air
 - 600.1.4.1 Pengelolaan Sungai dan Pantai
 - 600.1.4.2 Pengelolaan Irigasi dan Rawa

- 600.1.4.3 Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
- 600.1.4.4 Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
- 600.1.5 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
 - 600.1.5.1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai
 - 600.1.5.2 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa
 - 600.1.5.3 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
 - 600.1.5.4 Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku
 - 600.1.5.5 Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
- 600.1.6 Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional)
 - 600.1.6.1 Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
 - 600.1.6.2 Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo
 - 600.1.6.3 Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
 - 600.1.6.4 Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo
 - 600.1.6.5 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 600.1.7 Pengembangan Jaringan Jalan
 - 600.1.7.1 Keterpaduan Perencanaan
 - 600.1.7.2 Sistem Jaringan Jalan
 - 600.1.7.3 Lingkungan dan Keselamatan Jalan
- 600.1.8 Pembangunan Jalan
 - 600.1.8.1 Standar dan Pedoman
 - 600.1.8.2 Manajemen Konstruksi
 - 600.1.8.3 Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage
 - 600.1.8.4 Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng

- 600.1.9 Preservasi Jalan Jalan
 - 600.1.9.1 Standar dan Pedoman
 - 600.1.9.2 Perencanaan Teknis
 - 600.1.9.3 Teknik Rekonstruksi
 - 600.1.9.4 Teknik Pemeliharaan
- 600.1.10 Pengelolaan Jembatan
 - 600.1.10.1 Standar dan Pedoman
 - 600.1.10.2 Perencanaan Teknis
 - 600.1.10.3 Teknik Jembatan
 - 600.1.10.4 Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus
- 600.1.11 Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah
 - 600.1.11.1 Bimbingan Teknik Jalan Daerah
 - 600.1.11.2 Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
 - 600.1.11.3 Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan
- 600.1.12 Pengaturan Jalan Tol
 - 600.1.12.1 Persiapan pengusaha jalan tol
 - 600.1.12.2 Pengadaan Investasi Jalan Tol
 - 600.1.12.3 Teknik Pengaturan Jalan Tol
 - 600.1.12.4 Pengambilalihan hak pengusaha jalan tol
- 600.1.13 Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
 - 600.1.13.1 Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
 - 600.1.13.2 Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan
- 600.1.14 Pengembangan Kawasan Permukiman
 - 600.1.14.1 Perencanaan Teknis
 - 600.1.14.2 Kawasan Permukiman Perkotaan
 - 600.1.14.3 Kawasan Permukiman Pedesaan
 - 600.1.14.4 Kawasan Permukiman Khusus
 - 600.1.14.5 Kelembagaan
- 600.1.15 Pembinaan Penataan Bangunan
 - 600.1.15.1 Perencanaan Teknis
 - 600.1.15.2 Penataan Bangunan Gedung

- 600.1.15.3 Pengelolaan Rumah Negara
 - 600.1.15.4 Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
 - 600.1.15.5 Kelembagaan
 - 600.1.16 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 600.1.16.1 Perencanaan Teknis
 - 600.1.16.2 Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
 - 600.1.16.3 Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan
 - 600.1.16.4 Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
 - 600.1.16.5 Kelembagaan
 - 600.1.16.6 Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 600.1.16.7 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
 - 600.1.17 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
 - 600.1.17.1 Perencanaan Teknis
 - 600.1.17.2 Pengelolaan Air Limbah
 - 600.1.17.3 Pengelolaan Persampahan
 - 600.1.17.4 Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
 - 600.1.17.5 Kelembagaan
 - 600.1.17.6 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
 - 600.1.18 Pemantauan dan Evaluasi
- 600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
- 600.2.1 Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 600.2.2 Perencanaan Pembiayaan Perumahan
 - 600.2.2.1 Keterpaduan Perencanaan
 - 600.2.2.2 Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan
 - 600.2.2.3 Kemitraan
 - 600.2.3 Pola Pembiayaan Perumahan
 - 600.2.3.1 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum

- 600.2.3.2 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
- 600.2.3.3 Pola Investasi Perumahan
- 600.2.4 Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
 - 600.2.4.1 Sumber Pembiayaan Primer
 - 600.2.4.2 Sumber Pembiayaan Sekunder
 - 600.2.4.3 Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
 - 600.2.4.4 Sistem Pembiayaan Perumahan
 - 600.2.4.5 Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
- 600.2.5 Perencanaan Penyediaan Perumahan
 - 600.2.5.1 Keterpaduan Perencanaan
 - 600.2.5.2 Analisa Teknik
 - 600.2.5.3 Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
 - 600.2.5.4 Kemitraan dan Kelembagaan
- 600.2.6 Penyediaan Rumah Susun
 - 600.2.6.1 Perencanaan Teknik
 - 600.2.6.2 Penyediaan
 - 600.2.6.3 Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan
 - 600.2.6.4 Pengelolaan
- 600.2.7 Penyediaan Rumah Khusus
 - 600.2.7.1 Perencanaan Teknik
 - 600.2.7.2 Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
 - 600.2.7.3 Bimbingan teknis dan supervisi
 - 600.2.7.4 Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
 - 600.2.7.5 Perencanaan Teknik
 - 600.2.7.6 Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni
 - 600.2.7.7 Pelaksanaan Bantuan Simultan
- 600.2.8 Penyediaan Rumah Umum dan Komersial
 - 600.2.8.1 Perencanaan Teknik
 - 600.2.8.2 Pemberian Bantuan Rumah Umum
 - 600.2.8.3 Fasilitasi Hunian Berimbang
 - 600.2.8.4 Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan

- 600.2.9 Investasi Infrastruktur
 - 600.2.9.1 Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
 - 600.2.9.2 Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
 - 600.2.9.3 Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
 - 600.2.9.4 Pasar Infrastruktur
- 600.2.10 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 - 600.2.10.1 Sistem Penyelenggaraan
 - 600.2.10.2 Kontrak Konstruksi
 - 600.2.10.3 Konstruksi Berkelanjutan
 - 600.2.10.4 Manajemen Mutu
- 600.2.11 Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
 - 600.2.11.1 Kelembagaan
 - 600.2.11.2 Material dan Peralatan Konstruksi
 - 600.2.11.3 Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
 - 600.2.11.4 Usaha Jasa Konstruksi
- 600.2.12 Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
 - 600.2.12.1 Standar dan Materi Kompetensi
 - 600.2.12.2 Penerapan Kompetensi
 - 600.2.12.3 Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
 - 600.2.12.4 Pengembangan Produktivitas
- 600.2.13 Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi)
 - 600.2.13.1 Peningkatan Kerjasama
 - 600.2.13.2 Pemberdayaan Jasa Konstruksi
- 600.2.14 Peningkatan Jasa Konstruksi
 - 600.2.14.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
 - 600.2.14.2 Pelaksanaan Pengendalian Mutu
- 600.2.15 Penerapan Teknologi Konstruksi
 - 600.2.15.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi
 - 600.2.15.2 Pengembangan Materi
 - 600.2.15.3 Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi

- 600.2.16 Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)
 - 600.2.16.1 Antar Sektor
 - 600.2.16.2 Antar Wilayah
- 600.2.17 Pengembangan Kawasan Strategis
 - 600.2.17.1 Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
 - 600.2.17.2 Pengembangan Infrastruktur Antar kawasan Strategis
- 600.2.18 Pengembangan Kawasan Perkotaan
 - 600.2.18.1 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan
 - 600.2.18.2 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru
 - 600.2.18.3 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan
 - 600.2.18.4 Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan
 - 600.2.18.5 Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)
- 600.2.19 Pemantauan dan Evaluasi

600.3 TATA RUANG (TATA KOTA)

- 600.3.1 Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah
- 600.3.2 Perencanaan
 - 600.3.2.1 Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)
 - 600.3.2.2 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
 - 600.3.2.3 Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten
 - 600.3.2.4 Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)
 - 600.3.2.5 Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten
 - 600.3.2.6 Rencana Teknis Prasarana Kota
 - 600.3.2.7 Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota

- 600.3.3 Pemanfaatan dan Pengendalian
 - 600.3.3.1 Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
 - 600.3.3.2 Ijin Pemanfaatan Ruang
 - 600.3.3.3 Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang
- 600.3.4 Pemetaan
 - 600.3.4.1 Peta Dasar
 - 600.3.4.2 Survey Pemetaan Ruang Darat
 - 600.3.4.3 Survey Pemetaan Ruang Air
 - 600.3.4.4 Survey Pemetaan Ruang Udara

600.4 LINGKUNGAN HIDUP

- 600.4.1 Kebijakan dibidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 600.4.2 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - 600.4.2.1 Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
 - 600.4.2.2 Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
- 600.4.3 Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor
 - 600.4.3.1 Evaluasi Penerapan
 - 600.4.3.2 Perencanaan Lingkungan Hidup
- 600.4.4 Ekonomi Lingkungan
- 600.4.5 Dampak Lingkungan
 - 600.4.5.1 Bimtek Dampak Lingkungan
 - 600.4.5.2 Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan
 - 600.4.5.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut
- 600.4.6 Pemantauan dan Pengawasan
 - 600.4.6.1 Manufaktur Prasarana dan Jasa
 - 600.4.6.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
 - 600.4.6.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
 - 600.4.6.4 Udara Sumber Bergerak
- 600.4.7 Evaluasi dan Pengembangan
 - 600.4.7.1 Manufaktur, Prasarana, dan Jasa
 - 600.4.7.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
 - 600.4.7.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil

- 600.4.7.4 Udara Sumber Bergerak
- 600.4.8 Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan
 - 600.4.8.1 Pengembangan
 - 600.4.8.2 Pemanfaatan
 - 600.4.8.3 Pengelolaan Sumber Daya Genetik
 - 600.4.8.4 Keamanan Hayati
 - 600.4.8.5 Pengendalian kerusakan Lahan
- 600.4.9 Kerusakan Ekosistem Perairan Darat
 - 600.4.9.1 Kerusakan Ekosistem
 - 600.4.9.2 Rawa
- 600.4.10 Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer
 - 600.4.10.1 Perangkat mitigasi
 - 600.4.10.2 Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
 - 600.4.10.3 Pengendalian Bahan Perusak Ozon
 - 600.4.10.4 Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
- 600.4.11 Adaptasi Perubahan Iklim
 - 600.4.11.1 Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim
 - 600.4.11.2 Kerentanan Perubahan Iklim
- 600.4.12 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
 - 600.4.12.1 Registrasi dan Notifikasi
 - 600.4.12.2 Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
 - 600.4.12.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut
- 600.4.13 Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun
 - 600.4.13.1 Pengumpulan dan pemanfaatan
 - 600.4.13.2 Pengangkutan dan Pengolahan
 - 600.4.13.3 Penimbunan dan Dumping
 - 600.4.13.4 Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas
- 600.4.14 Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3

- 600.4.14.1 Pemantauan
- 600.4.14.2 Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi
- 600.4.15 Pengelolaan Sampah
 - 600.4.15.1 Pembatasan sampah
 - 600.4.15.2 Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
 - 600.4.15.3 Pembentukan Dewan Adipura
 - 600.4.15.4 Penetapan pemenang adipura
- 600.4.16 Hukum Administrasi Lingkungan
 - 600.4.16.1 Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
 - 600.4.16.2 Penataan hukum administrasi lingkungan
- 600.4.17 Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 - 600.4.17.1 Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
 - 600.4.17.2 Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
- 600.4.18 Penegakan hukum pidana lingkungan
 - 600.4.18.1 Penyidikan
 - 600.4.18.2 Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut
 - 600.4.18.3 Koordinasi pembinaan penyidik PNS
- 600.4.19 Komunikasi Lingkungan
 - 600.4.19.1 Pengembangan Komunikasi
 - 600.4.19.2 Publikasi dan Kampanye
- 600.4.20 Penguatan Inisiatif Masyarakat
 - 600.4.20.1 Komunitas Pendidikan Lingkungan
 - 600.4.20.2 Kearifan Lingkungan
- 600.4.21 Peningkatan Peran Masyarakat
 - 600.4.21.1 Masyarakat Perkotaan
 - 600.4.21.2 Masyarakat Pedesaan
- 600.4.22 Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
 - 600.4.22.1 Organisasi Sosial Masyarakat
 - 600.4.22.2 Organisasi Profesi Dunia Usaha
- 600.4.23 Data dan Informasi Lingkungan
 - 600.4.23.1 Pengelolaan Data

- 600.4.23.2 Pengelolaan Informasi
- 600.4.23.3 Pengembangan Perangkat Lunak
- 600.4.23.4 Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
- 600.4.24 Kelembagaan Lingkungan
 - 600.4.24.1 Kelembagaan dan Tata Laksana
 - 600.4.24.2 Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
- 600.4.25 Standarisasi dan teknologi
 - 600.4.25.1 Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan
 - 600.4.25.2 Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
 - 600.4.25.3 Teknologi Ramah Lingkungan
- 600.4.26 Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan
 - 600.4.26.1 Pemantauandan Kajian Kualitas Lingkungan
 - 600.4.26.2 Laboratorium Rujukan dan Pengujian

700 PENGAWASAN

700.1 PENGAWASAN INTERNAL

- 700.1.1 Rencana Pengawasan
 - 700.1.1.1 Rencana Strategis Pengawasan
 - 700.1.1.2 Rencana Kerja Pengawas Tahunan
 - 700.1.1.3 Rencana Kinerja Tahunan
 - 700.1.1.4 Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
 - 700.1.1.5 Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
- 700.1.2 Pelaksanaan Pengawasan
 - 700.1.2.1 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)
 - 700.1.2.2 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut

- 700.1.2.3 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
- 700.1.2.4 Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
- 700.1.2.5 Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
- 700.1.2.6 Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
- 700.1.2.7 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
- 700.1.2.8 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
- 700.1.2.9 Good Corporate Governance (GCG)

800 KEPEGAWAIAN

800.1 SUMBER DAYA MANUSIA

- 800.1.1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
 - 800.1.1.1 Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan data kebutuhan
 - 800.1.1.2 Perencanaan Pertimbangan Formasi Antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas
 - 800.1.1.3 Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
 - 800.1.1.4 Standarisasi Jabatan Antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan
- 800.1.2 Formasi dan Pengadaan Pegawai
 - 800.1.2.1 Formasi ASN Antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan

- Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus
- 800.1.2.2 Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN Antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN
- 800.1.2.3 Pengumuman Kelulusan ASN
- 800.1.2.4 Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
- 800.1.2.5 Pengangkatan ASN
- 800.1.2.6 Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)
- 800.1.2.7 Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
- 800.1.2.8 Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
- 800.1.3 Mutasi Pegawai
 - 800.1.3.1 Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
 - 800.1.3.2 Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
 - 800.1.3.3 Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
 - 800.1.3.4 Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai
 - 800.1.3.5 Peninjauan Masa Kerja
 - 800.1.3.6 Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
- 800.1.4 Pengembangan Karir
 - 800.1.4.1 Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta
 - 800.1.4.2 Penyesuaian ijazah
 - 800.1.4.3 Penyusunan Sistem Karier
 - 800.1.4.4 Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja

- 800.1.4.5 Angka Kredit Antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit
- 800.1.5 Kinerja Aparatur Sipil Negara
 - 800.1.5.1 Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
 - 800.1.5.2 Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
 - 800.1.5.3 Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
- 800.1.6 Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
 - 800.1.6.1 Kode Etik Pegawai
 - 800.1.6.2 Disiplin
 - 800.1.6.3 Pemberhentian Dengan Hormat
 - 800.1.6.4 Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
 - 800.1.6.5 Pemberhentian Sementara
 - 800.1.6.6 Pensiun ASN Antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/Dudanya
- 800.1.7 Bantuan Hukum
- 800.1.8 Status dan Kedudukan Pegawai
 - 800.1.8.1 Status Kepegawaian
 - 800.1.8.2 Kedudukan Kepegawaian
 - 800.1.8.3 Keberatan Pegawai
 - 800.1.8.4 Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
- 800.1.9 Sistem Informasi Kepegawaian
 - 800.1.9.1 Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
 - 800.1.9.2 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 800.1.9.3 Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik
 - 800.1.9.4 Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik

- 800.1.10 Pengawasan dan pengendalian
 - 800.1.10.1 Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
 - 800.1.10.2 Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan
 - 800.1.10.3 Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
 - 800.1.10.4 Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
 - 800.1.10.5 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
 - 800.1.10.6 Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
- 800.1.11 Administrasi Pegawai
 - 800.1.11.1 Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
 - 800.1.11.2 Cuti Sakit
 - 800.1.11.3 Cuti Bersalin
 - 800.1.11.4 Cuti Tahunan
 - 800.1.11.5 Cuti Alasan Penting
 - 800.1.11.6 Cuti Besar
 - 800.1.11.7 Cuti Di luar Tanggungan Negara
 - 800.1.11.8 Karpeg/KPE/Karis/Karsu
 - 800.1.11.9 Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan
 - 800.1.11.10 Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
 - 800.1.11.11 Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
 - 800.1.11.12 Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
 - 800.1.11.13 Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan
- 800.1.12 Kesejahteraan Pegawai
 - 800.1.12.1 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
 - 800.1.12.2 Asuransi Pegawai/BPJS
 - 800.1.12.3 Tabungan Perumahan
 - 800.1.12.4 Bantuan Sosial
 - 800.1.12.5 Pakaian Dinas
 - 800.1.12.6 Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas

- 800.1.12.7 Pemberian Tali Kasih
- 800.1.12.8 Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
- 800.1.12.9 Olahraga dan Rekreasi
- 800.1.12.10 Rekam Medis
- 800.1.13 Administrasi Perseorangan
 - 800.1.13.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - 800.1.13.2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
 - 800.1.13.3 Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
 - 800.1.13.4 Sekretaris Daerah
 - 800.1.13.5 ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
- 800.1.14 Penilaian Kompetensi
 - 800.1.14.1 Penilaian Kompetensi
 - 800.1.14.2 Hasil Penilaian Kompetensi

800.2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- 800.2.1 Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 800.2.2 Pendidikan dan Pelatihan
 - 800.2.2.1 Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
 - 800.2.2.2 Pedoman-pedoman kediklatan
 - 800.2.2.3 Kurikulum-kurikulum diklat
 - 800.2.2.4 Modul-modul diklat
 - 800.2.2.5 Panduan fasilitator
 - 800.2.2.6 Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
 - 800.2.2.7 Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
 - 800.2.2.8 Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
 - 800.2.2.9 Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
- 800.2.3 Widyaiswara
 - 800.2.3.1 Seleksi dan pengembangan Widyaiswara

- 800.2.3.2 Sertifikasi Widyaiswara
- 800.2.3.3 Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
- 800.2.3.4 Penilaian Widyaiswara
- 800.2.3.5 Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
- 800.2.3.6 Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara
- 800.2.4 Penyelenggaraan Diklat
 - 800.2.4.1 Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
 - 800.2.4.2 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat
 - 800.2.4.3 Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
 - 800.2.4.4 Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
 - 800.2.4.5 Sistem informasi diklat
 - 800.2.4.6 Monitoring Penyelenggara Diklat
 - 800.2.4.7 Monitoring dan evaluasi Pasca diklat
- 800.2.5 Alumni

900 KEUANGAN

900.1 KEUANGAN DAERAH

- 900.1.1 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)
 - 900.1.1.1 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA))
 - 900.1.1.2 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)
 - 900.1.1.3 Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
 - 900.1.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)
- 900.1.2 Penyusunan Anggaran
 - 900.1.2.1 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan

- 900.1.2.2 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota
- 900.1.2.3 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
- 900.1.2.4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
- 900.1.3 Pelaksanaan Anggaran
 - 900.1.3.1 Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
 - 900.1.3.2 Pendapatan
 - 900.1.3.3 Belanja
 - 900.1.3.4 Pembiayaan Daerah
 - 900.1.3.5 Dokumen Penatausahaan Keuangan
 - 900.1.3.6 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
 - 900.1.3.7 Daftar Gaji
 - 900.1.3.8 Kartu Gaji
 - 900.1.3.9 Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
 - 900.1.3.10 Laporan Keuangan
- 900.1.4 Pinjaman/Hibah Luar Negeri
 - 900.1.4.1 Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)
 - 900.1.4.2 Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)
 - 900.1.4.3 Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya
 - 900.1.4.4 Dokumen Loan Agreement (PHLN) Antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender
 - 900.1.4.5 Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana
 - 900.1.4.6 Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya

- 900.1.4.7 Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
- 900.1.4.8 Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l.: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.
- 900.1.4.9 Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA),
- 900.1.4.10 Staff Appraisal Report
- 900.1.4.11 Report /Laporan
- 900.1.4.12 Laporan Hutang Daerah
- 900.1.4.13 Completion Report/Annual Report
- 900.1.4.14 Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
- 900.1.5 Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)
- 900.1.6 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
 - 900.1.6.1 Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
 - 900.1.6.2 Dokumen Kebijakan Akuntansi
 - 900.1.6.3 Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
 - 900.1.6.4 Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan /Triwulanan /Semesteran
- 900.1.7 Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan
 - 900.1.7.1 Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan
 - 900.1.7.2 Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil,

- Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l.: Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
- 900.1.7.3 Buku Rekening Bank
- 900.1.7.4 Keputusan Pembukuan Rekening
- 900.1.7.5 Pembukuan anggaran terdiri antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran
- 900.1.8 Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan
 - 900.1.8.1 Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya
 - 900.1.8.2 Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan
- 900.1.9 Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD meliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD
- 900.1.10 Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu
- 900.1.10.1 Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu
- 900.1.10.2 Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu
- 900.1.10.3 Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank
- 900.1.10.4 Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya
- 900.1.11 Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah
- 900.1.11.1 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
- 900.1.11.2 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
- 900.1.11.3 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
- 900.1.11.4 Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
- 900.1.12 Anggaran Daerah
- 900.1.12.1 Anggaran Daerah
- 900.1.12.2 Dukungan Teknis Anggaran Daerah
- 900.1.13 Pendapatan dan Investasi Daerah
- 900.1.13.1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi

daerah, penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah

900.1.13.2 Badan Usaha Milik Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah

900.1.13.3 Badan Layanan Umum Daerah Antara lain: analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah

900.1.13.4 Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah

900.1.13.5 Pinjam Dan Obligasi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah

900.1.14 Fasilitasi Dana Perimbangan

900.1.14.1 Fasilitasi Dana Alokasi Umum Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum

900.1.14.2 Fasilitasi Dana Alokasi Khusus Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus

900.1.14.3 Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan

evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam

900.1.14.4 Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya Antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya

900.1.14.5 Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan

900.1.15 Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

900.1.15.1 Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggung jawaban keuangan daerah

900.1.15.2 Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah

900.1.15.3 Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi

rancangan peraturan daerah
pertanggungjawaban keuangan daerah

900.1.15.4 Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan
Ahli Antara lain: Penyiapan bahan bantuan
keterangan ahli di bidang keuangan
daerah, Penyiapan evaluasi rancangan
peraturan daerah pertanggungjawaban
keuangan daerah

900.1.15.5 Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan
Daerah Antara lain: Penyiapan sinkronisasi
kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban
pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan
data dan informasi untuk penyusunan
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
keuangan daerah, Pengelolaan sistem
informasi pengelolaan keuangan daerah

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI
KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
I	000	UMUM							
		000.1	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN						
			000.1.1	Telekomunikasi		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.1.2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri					
				000.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				000.1.2.2	Perjalanan Dinas DPRD	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.1.2.3	Perjalanan Dinas Pegawai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.1.3	Perjalanan Dinas Luar Negeri					
				000.1.3.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.1.3.2	Perjalanan Dinas DPRD	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.1.3.3	Perjalanan Dinas Pegawai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			000.1.4	Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya)		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.1.5	Rapat pimpinan (antara lain: Notula/Risalah Rapat)		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.1.6	Penyediaan Konsumsi		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.1.7	Pengurusan Kendaraan Dinas					
				000.1.7.1	Pengurusan surat-surat kendaraan dinas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.1.7.2	Pemeliharaan dan perbaikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.1.7.3	Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			000.1.8	Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor					
				000.1.8.1	Pertamanan/ Landscape	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.1.8.2	Penghijauan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.1.8.3	Perbaikan Gedung	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.1.8.4	Perbaikan Peralatan Kantor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.1.8.5	Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				000.1.8.6	Kebersihan Gedung dan Taman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.1.9	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer					
				000.1.9.1	Perbaikan / Pemeliharaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.1.9.2	Pemasangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.1.10	Ketertiban dan Keamanan					
				000.1.10.1	Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.1.10.2	Laporan Ketertiban dan Keamanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			000.1.11	Administrasi Pengelolaan Parkir		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.1.12	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
2		000.2		PERLENGKAPAN					
			000.2.1	Inventarisasi dan Penyimpanan					
				000.2.1.1	Data hasil inventarisasi dan penyimpanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.2.1.2	Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.2.2	Pemeliharaan peralatan kantor					
				000.2.2.1	Data hasil pemeliharaan kantor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3		000.3		PENGADAAN				
			000.3.1	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK),Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.3.2	Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia,penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.3.3	Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaankontrak)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.3.4	Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			000.3.5	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan (antara lain: <i>Data base</i> pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, <i>Data Base</i> kontrak, <i>Data Base</i> PengadaanBarang/jasa)		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.3.6	Monitoring dan Evaluasi (antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi)		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
4		000.4		PERPUSTAKAAN					
			000.4.1	Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
			000.4.2	Deposit Bahan Pustaka		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.4.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				000.4.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman	Biasa	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				000.4.2.3	Terbitan Internasional dan Regional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.4.2.4	Pemantauan Wajib SerahSimpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.4.2.5	Bibliografi dan Katalog	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.4.3	Koleksi Pustaka					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				000.4.3.1	Pembelian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.4.3.2	Hibah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.4.3.3	Hadiah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.4.3.4	Tukar Menukar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.4.3.5	Implementasi Undang-Undang KCKR	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.4.3.6	Terbitan Internal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				000.4.3.7	Pendistribusian bahan pustaka surplus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.4.3.8	Inventarisasi koleksi (Buku Induk)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.4.4	Pengolahan Bahan Pustaka		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.4.5	Pangkalan Data Katalog Koleksi		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.4.6	Layanan Perpustakaan					
				000.4.6.1	Keanggotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.4.6.2	Peminjaman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				000.4.6.3	Pengembangan gemar baca	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.4.7	Kerjasama Perpustakaan					
				000.4.7.1	MoU	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				000.4.7.2	Perjanjian kerjasama	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				000.4.7.3	Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama Internasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
			000.4.8	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan					
				000.4.8.1	Pengembangan situs web	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
				000.4.8.2	Pengembangan kemas ulang informasi multimedia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
				000.4.8.3	Pengembangan program aplikasi perpustakaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
				000.4.8.4	Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			000.4.9	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.4.10	Konservasi					
				000.4.10.1	Perawatan Bahan Perpustakaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.4.10.2	Perbaikan Bahan Perpustakaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.4.10.3	Penjilidan Bahan Perpustakaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.4.11	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.4.12	Transformasi Digital		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			000.4.13	Kurasi Digital		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.4.14	Pengembangan Perpustakaan					
				000.4.14.1	Perpustakaan Umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.4.14.2	Perpustakaan Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.4.14.3	Perpustakaan Sekolah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.4.14.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
5		000.5	KEARSIPAN						

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			000.5.1	Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
			000.5.2	Pembinaan Arsiparis					
				000.5.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis (antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
				000.5.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
				000.5.2.3	Penilaian Arsiparis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan(antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.5.2.5	<i>Data Base</i> Arsiparis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi (antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.5.2.8	<i>Data Base</i> Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				000.5.2.9	Fasilitas Kearsipan (antara lain: Fasilitas SDM Kearsipan, Fasilitas Prasarana dan Sarana Kearsipan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip (antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.5.3	Pengelolaan Arsip Dinamis					
				000.5.3.1	Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					Pengantar/Buku Ekspedisi)				
				000.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.5.3.4	Penggunaan (antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Pemimjaman Arsip)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.5.3.5	Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					Autentisitas Arsip Dinamis)				
			000.5.4	Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital)		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.5.5	Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga)		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.5.6	Penyusutan Arsip					
				000.5.6.1	Pemindahan Arsip (antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				000.5.6.2	Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusanahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar arsip Yang Dimusnahkan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				000.5.6.3	Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.5.7	Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alihmedia, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.5.8	<i>Data Base</i> Pengelolaan Arsip Dinamis					
				000.5.8.1	<i>Data Base</i> Pengelolaan Arsip Aktif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				000.5.8.2	Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.5.9	Pengelolaan Arsip Statis					
				000.5.9.1	Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip , Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar arsip yang diserahkan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.5.9.2	Penghargaan dan Imbalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				000.5.9.3	Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/media lain sesuai perkembangan TI) dan Transkrip)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.5.9.4	Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.5.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.5.9.6	Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media))	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				000.5.9.7	Preservasi Kuratif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.5.9.8	Autentikasi Arsip Statis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.5.9.9	Akses Arsip Statis (antaratlain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.5.10	Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.5.11	Pengelolaan SIKN dan JIKN		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			000.5.12	Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.5.13	Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.5.14	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.5.15	Pengawasan Kearsipan					
				000.5.15.1	Pengawasan Kearsipan Internal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.5.15.2	Pengawasan Kearsipan Eksternal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				000.5.15.3	Sanksi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
6		000.6	PERSANDIAN						
			000.6.1	Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.6.2	Pengamanan persandian					
				000.6.2.1	Pengamanan sinyal: teknik sandi dan krypto	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				000.6.2.2	Analisis sinyal: teknik sandi dan krypto	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				000.6.2.3	Materiil sandi: sistem dan peralatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			000.6.3	Pengkajian persandian: Kriptografi,Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi					
				000.6.3.1	Perencanaan Pengkajian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.6.3.2	Administrasi Pengkajian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.6.3.3	Pelaksanaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.6.3.4	Pelaporan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.6.4	Pembinaan dan Pengendalian Persandian					
				000.6.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				000.6.4.2	Jaring Komunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.6.5	Layanan Sertifikasi Elektronik					
				000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.6.5.2	Pelaksanaan Verifikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				000.6.5.7	Pelaporan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		000.7	PERENCANAAN PEMBANGUNAN						
			000.7.1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang					
				000.7.1.1	Musrenbang Provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.7.1.2	Musrenbang Nasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				000.7.1.3	Musrenbang Kab/Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.7.1.4	Musrenbang Kecamatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.7.1.5	Musrenbang Kelurahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.7.1.6	Musrenbang Desa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.7.2	Perencanaan Pembangunan Daerah					
				000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.7.2.6	Program kerja tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.7.2.7	Penetapan / Kontrak Kinerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.7.2.8	Laporan Berkala	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				000.7.2.9	Laporan Insidental	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.7.2.10	Evaluasi Program	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.7.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.7.4	Konsultasi Perencanaan Pembangunan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.7.5	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.7.6	Aksi Strategis Daerah					
				000.7.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi strategi Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				000.7.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.7.6.3	Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.7.6.5	Penerapan perencana aksi strategi daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.7.7	Perencanaan Pendanaan Pembangunan					
				000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.7.7.2	Pendanaan Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				000.7.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.7.7.4	Surat Berharga Syariah Negara	Biasa	Pengguna internal dan Eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
				000.7.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
8		000.8	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA						
			000.8.1	Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota					
				000.8.1.1	Pembentukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.8.1.2	Pengubahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				000.8.1.3	Pembubaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.8.2	Uraian Jabatan dan Tata Kerja					
				000.8.2.1	Analisa Jabatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.8.2.2	Analisa Beban Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.8.3	Ketatalaksanaan					
				000.8.3.1	Proses Bisnis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.8.3.2	Standar Pelayanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				000.8.3.3	Standar Operasional Prosedur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.8.3.4	Pelayanan Publik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.8.4	Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.8.5	Evaluasi Kelembagaan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.8.6	Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi					
				000.8.6.1	Budaya Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				000.8.6.2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.8.6.3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
9		000.9	PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN						
			000.9.1	Kebijakan di bidang penelitian, pengkajiandan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.9.2	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan (antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan,Rekomendasi)		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.9.3	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			000.9.4	Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.9.5	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.9.6	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi					
				000.9.6.1	Data	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.9.6.2	Statistik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				000.9.6.3	Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			000.9.7	Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.9.8	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.9.9	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			000.9.10	Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
II	100	PEMERINTAHAN						
1		100.1	OTONOMI DAERAH					
			100.1.1	Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			100.1.2	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan , Pengawasan,Monitoring dan Evaluasi)		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			100.1.3	Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)		Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			100.1.4	Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi,Monitoring, dan Evaluasi)					
				100.1.4.1	Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				100.1.4.2	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
							serta penegak hukum	terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
				100.1.4.3	Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				100.1.4.4	Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				100.1.4.5	Assosiasi Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			100.1.5	Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)					
				100.1.5.1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				100.1.5.2	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				100.1.5.3	Pengembangan Kapasitas Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
							eksternal serta penegak hukum	mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
			100.1.6	LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
2		100.2		PEMERINTAHAN UMUM					
			100.2.1	Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			100.2.2	Dekonsentrasi dan Kerjasama					
				100.2.2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan TugasPembantuan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				100.2.2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				100.2.2.3	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				100.2.2.4	Fasilitasi Kecamatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				100.2.2.5	Fasilitasi Pelayanan Umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			100.2.3	Wilayah Administrasi dan Perbatasan					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
3		100.3	HUKUM						
			100.3.1	Program Legislasi					
				100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				100.3.1.2	Program Legislasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (antara lain Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan)		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah					
				100.3.3.1	Keputusan/Ketetapan Gubernur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				100.3.3.2	Keputusan/Ketetapan Bupati	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				100.3.3.3	Keputusan/Ketetapan Walikota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				100.3.3.4	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				100.3.3.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				100.3.3.6	Keputusan Sekretaris Daerah Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			100.3.4	Instruksi/Surat Edaran					
				100.3.4.1	Instruksi/Surat Edaran Provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				100.3.4.2	Instruksi/Surat Edaran Kabupaten	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				100.3.4.3	Instruksi/Surat Edaran Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				100.3.4.4	Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			100.3.5	Surat Perintah					
				100.3.5.1	Surat Perintah Gubernur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				100.3.5.2	Surat Perintah Bupati	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
				100.3.5.3	Surat Perintah Walikota	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			100.3.6	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
								merugikan siapapun.	
			100.3.7	Nota Kesepakatan/ <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama					
				100.3.7.1	Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				100.3.7.2	Luar Negeri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			100.3.8	Dokumentasi Hukum (antara lain: Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yangdijadikan referensi)		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			100.3.9	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			100.3.10	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)		Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsilembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			100.3.11	Kasus/ Sengketa Hukum					
				100.3.11.1	Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
							serta penegak hukum	pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
				100.3.11.2	Perdata Kasus/sengketa perdata	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				100.3.11.3	Tata Usaha Negara	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				100.3.11.4	Perburuhan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal sertapenegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunyapela ksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				100.3.11.5	Arbitrase	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atauketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				100.3.11.6	Sengketa Adat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			100.3.12	Perijinan		Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			100.3.13	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				100.3.13.1	Hak Cipta	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				100.3.13.2	Hak Paten	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				100.3.13.3	Hak Desain Industri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				100.3.13.5	Hak Merk	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			100.3.14	Permohonan HaKI yang ditolak		Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
III	200	POLITIK							
1		200.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
			200.1.1	Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
			200.1.2	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan					
				200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.1.2.3	Bela Negara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			200.1.3	Kewaspadaan Nasional					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
				200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negera dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
				200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
			200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan					
				200.1.4.1	Ketahanan Seni	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.1.4.2	Ketahanan Budaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.1.4.6	Fasilitasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan,	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
							serta penegak hukum	lembaga dan negara.	
				200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
				200.1.4.11	Fasilitasi Ormas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
			200.1.5	Politik Dalam Negeri					
				200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.1.5.6	Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.1.5.7	Database Parpol	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
				200.1.5.9	Pemilihan Umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
			200.1.6	Ketahanan Ekonomi					
				200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
				200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
2		200.2	PEMILU						
			200.2.1	Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			200.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih					
				200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu					
				200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			200.2.4	Penetapan Peserta Pemilu					
				200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.2.4.5	Peta Daerah Pemilihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			200.2.5	Pencalonan Pemilu					
				200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.2.5.2	Surat pencalonan Pendaftaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				200.2.5.3	Daftar bakal calon	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			200.2.6	Kampanye Pemilu					
				200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.2.6.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
			200.2.7	Dana Kampanye					
				200.2.7.1	Pedoman audit dana kampanye	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
				200.2.7.2	Laporan dana kampanye peserta Pemilu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
				200.2.7.3	Laporan hasil audit dana kampanye	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
			200.2.8	Pemungutan dan Penghitungan Suara					
				200.2.8.1	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				200.2.8.2	Master surat suara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.2.8.3	Surat suara yang terpakai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.2.8.4	Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.2.8.5	Formulir pemilu di Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			200.2.9	Penetapan Hasil Pemilu		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			200.2.10	Perselisihan Hasil Pemilu					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				200.2.10.1	Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.2.10.2	Jawaban dan kesimpulan termohon	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				200.2.10.3	Salinan Putusan lembaga peradilan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			200.2.11	Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
IV	300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN							
1		300.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			300.1.1	Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			300.1.2	Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja					
				300.1.2.1	Tata Operasional Polisi Pamong Praja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				300.1.2.2	Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			300.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			300.1.4	Perlindungan Masyarakat		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			300.1.5	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
			300.1.6	Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
2	300.2		PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN							
			300.2.1	Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			300.2.2	Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan						
				300.2.2.1	Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
				300.2.2.2	Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
				300.2.2.3	Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
				300.2.2.4	Permasyarakatan pencarian dan pertolongan,	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					sertifikasi pencarian dan pertolongan				
				300.2.2.5	Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan,tempat latihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				300.2.2.6	Registrasi BEACON	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			300.2.3	Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			300.2.4	Potensi Pencarian dan Pertolongan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			300.2.5	Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				300.2.5.1	Rencana Pendidikan dan Pelatihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				300.2.5.2	Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				300.2.5.3	Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				300.2.5.4	Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				300.2.5.5	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			300.2.6	Operasi Pencarian dan Pertolongan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			300.2.7	Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			300.2.8	Operasi Komunikasi					
				300.2.8.1	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				300.2.8.2	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				300.2.8.3	Registrasi BEACON	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			300.2.9	Inventarisasi dan Pemeliharaan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			300.2.10	Pengembangan Sistem Informasi		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			300.2.11	Penyajian dan Layanan Informasi		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			300.2.12	Pelapooran dan Evaluasi					
				300.2.12.1	Laporan Harian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				300.2.12.2	Laporan Bulanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				300.2.12.3	Laporoan Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				300.2.12.4	Evaluasi	Biasa	Pengguna internal daneksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
V	400	KESEJAHTERAAN RAKYAT							
1		400.1		PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			400.1.1	Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.1.2	Pembangunan Sumber Daya					
				400.1.2.1	Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.2.2	Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.2.3	Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.2.4	Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.2.5	Fasilitasi Teknologi dan inovasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.1.2.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.2.7	Pemantauan dan evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.1.3	Peningkatan Infrastruktur					
				400.1.3.1	Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.3.2	Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.3.3	Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.3.4	Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								merugikan siapapun.	
				400.1.3.5	Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.3.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.3.7	Pemantauan dan evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.1.4	Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha					
				400.1.4.1	Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.4.2	Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.1.4.3	Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.4.4	Fasilitasi Kemitraan usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.4.5	Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.4.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.4.7	Pemantauan dan evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.4.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan Tertinggal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.1.4.9	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.4.11	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.4.12	Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.4.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			400.1.5	Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya					
				400.1.5.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.5.2	Penguatan organisasi masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.5.3	Pemberdayaan masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.5.4	Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.5.5	Ketenagakerjaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.5.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					lembaga sosial dan budaya				
				400.1.5.7	Pemantauan dan evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.1.6	Pengembangan Daerah Khusus					
				400.1.6.1	Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.6.2	Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.6.3	Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.6.4	Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.1.6.5	Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.6.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.1.6.7	Pemantauan dan evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
2		400.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
			400.2.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.2.2	Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum					
				400.2.2.1	Data gender	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								merugikan siapapun.	
				400.2.2.2	Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
			400.2.3	Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)					
				400.2.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.2.3.2	Data perlindungan perempuan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				400.2.3.3	Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				400.2.3.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.2.3.5	Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.2.3.6	Analisis dan penyajian informasi gender	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.2.3.7	Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.2.4	Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)					
				400.2.4.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.2.4.2	Data perlindungan anak	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				400.2.4.3	Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				400.2.4.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.2.4.5	Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.2.5	Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)					
				400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.2.5.2	Data Klaster Hak Anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.2.5.3	Data tumbuh kembang anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.2.5.4	Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				400.2.5.5	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
				400.2.5.6	Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.2.6	Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.2.7	Penghargaan Kabupaten Layak Anak		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			400.2.8	Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
3		400.3		PENDIDIKAN					
			400.3.1	Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.3.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal					
				400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.2.2	Pelatihan Sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.2.3	Peringatan Hari anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.3.2.4	Block Grant	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.3.3	Pendidikan Masyarakat					
				400.3.3.1	Penyelenggaraan Program	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.3.2	Penilaian dan pemberian bantuansosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.3.3	Pembinaan Program	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.3.5	Pameran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.3.3.6	Rakor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.3.7	Sosialisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.3.4	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.3.5	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama					
				400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.3.5.2	Block Grant	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.3.6	Pendidikan khusus/Layanan Khusus					
				400.3.6.1	Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.3.6.2	Block Grant	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.6.3	Lomba, festival	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.6.4	Sosialisasi, bimtek	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.6.5	Pendataan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.6.6	Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.3.7.1	Pendataan dan Pemeetaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.7.3	Sertifikasi Guru	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.3.7.7	Block Grant	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.3.8	Sekolah Menengah Atas					
				400.3.8.1	Kurikulum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.8.2	Bahan Ajar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.8.3	Pelatihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.8.4	Block grant	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.3.8.6	Lomba , Sayembara, festival	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.8.8	Bantuan siswa miskin	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus					
				400.3.9.1	Bahan ajar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.9.2	Petunjuk Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.9.3	Block grant	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.9.8	Pendataan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik					
				400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.10.3	Setifikasi Guru	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.10.5	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.10.7	Block grant	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.3.11	Penilaian Pendidikan					
				400.3.11.1	Penilaian Akademik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.3.11.2	Penilaian Non Akademik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				400.3.11.3	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
			400.3.12	Data dan Statistik Pendidikan					
				400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.3.13	Prasarana dan Sarana Pendidikan					
				400.3.13.1	Prasarana Pendidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.13.2	Sarana Pendidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
4		400.4	KEOLAHRAGAAN						
			400.4.1	Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.4.2	Pengelolaan Olahraga Pendidikan					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.4.2.1	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.4.2.2	Olahraga Pendidikan Tinggi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.4.2.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.4.3	Pengelolaan Olahraga Rekreasi					
				400.4.3.1	Olahraga Massal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.4.3.2	Olahraga Tradisional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.4.3.3	Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			400.4.4	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga					
				400.4.4.1	Olahraga Pendidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.4.4.2	Olahraga Rekreasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.4.4.3	Olahraga Prestasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.4.4.4	Sekolah Khusus Olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.4.5	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus					
				400.4.5.1	Olahraga Tradisional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.4.5.2	Layanan Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.4.6	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga					
				400.4.6.1	Kemitraan Keolahragaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.4.6.2	Penghargaan Olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.4.7	Pembibitan dan IPTEK Olahraga					
				400.4.7.1	Pembibitan Olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.4.7.2	Kompetisi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.4.7.3	IPTEK Olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.4.8	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan					
				400.4.8.1	Tenaga Keolahragaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.4.8.2	Organisasi Keolahragaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.4.9	Industri dan Promosi Olahraga					
				400.4.9.1	Industri Olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.4.9.2	Promosi Olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.4.10	Olahraga Prestasi					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.4.10.1	Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.4.10.2	Nasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.4.10.3	Internasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.4.11	Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga					
				400.4.11.1	Standardisasi Keolahragaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.4.11.2	Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.4.11.3	Infrastruktur Olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
5		400.5	KEPEMUDAAN						
			400.5.1	Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.5.2	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda					
				400.5.2.1	Penelusuran (Duta Kepemudaan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.5.2.2	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.5.2.3	Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.5.3	Peningkatan Wawasan Pemuda					
				400.5.3.1	Wawasan Kebangsaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.5.3.2	Wawasan Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.5.3.3	Wawasan Sosial dan Hukum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.5.4	Peningkatan Kapasitas Pemuda					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.5.4.1	Kapasitas Iman dan Taqwa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
				400.5.4.2	Kapasitas IPTEK	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.5.4.3	Pemanfaatan IPTEK	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.5.5	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)					
				400.5.5.1	Pengkajian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.5.5.2	Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.5.5.3	Pendayagunaan (fasilitasi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.5.6	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda					
				400.5.6.1	Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan,Pendayagunaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.5.6.2	Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawananan.Pengembangan kepedulian, pendampingan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.5.7	Kewirausahaan					
				400.5.7.1	Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.5.7.2	Pengaderan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.5.7.3	Perintisan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.5.8	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan					
				400.5.8.1	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan :Kelembagaan dan Sumberdaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.5.8.2	Pemberdayaan Organisasi Mahasiswa :Kelembagaan dan Sumberdaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.5.8.3	Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran:Kelembagaan dan Sumberdaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.5.8.4	Pengawasan Kepramukaan :Kelembagaan, Program dan Sumberdaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.5.9	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.5.9.1	Standardisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.5.10	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda					
				400.5.10.1	Kemitraan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.5.10.2	Penghargaan Pemuda	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
6		400.6	KEBUDAYAAN						

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			400.6.1	Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.6.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman					
				400.6.2.1	Registrasi Nasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.6.2.2	Pelindungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.6.2.3	Pengembangan dan Pemanfaatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.6.2.4	Eksplorasi dan Dokumentasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.6.3	Pembinaan Kesenian dan Perfilman					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.6.3.1	Pembinaan Seni Pertunjukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.6.3.2	Pembinaan Seni Rupa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.6.3.3	Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.6.3.4	Dokumentasi dan Publikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.6.4	Sejarah dan Nilai Budaya					
				400.6.4.1	Sejarah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.6.4.2	Pemetaan nilai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.6.4.4	Dokumentasi dan Publikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.6.4.5	Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.6.4.6	Publikasi sejarah dan nilai sejarah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.6.5	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya					
				400.6.5.1	Internalisasi nilai budaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.6.5.2	Kekayaan budaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.6.5.3	Warisan budaya nasional dan dunia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.6.5.4	Diplomasi budaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
7		400.7	KESEHATAN						
			400.7.1	Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.7.2	Upaya Kesehatan Dasar					
				400.7.2.1	Pelayanan kedokteran keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.2.2	Praktek klinis dokter dipelayanan kesehatan primer	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								merugikan siapapun.	
				400.7.2.3	Pelaksanaan kesehatan primer	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.2.4	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.2.5	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.2.6	ICD10, Destistry & Stomatology	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.2.7	Infeksi menular lewat transfusi darah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.7.2.8	Penyakit mulut di tingkat primer	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.2.9	Pembiayaan darah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.2.10	Penggunaan darah rasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.2.11	Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.2.12	Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.2.13	Akreditasi puskesmas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.7.2.14	Puskesmas berprestasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.7.3	Upaya Kesehatan Rujukan					
				400.7.3.1	Pelayanan kesehatan rujukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.3.2	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dankonsorsium upaya kesehatan (KUK)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatanlainnya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			400.7.4	Keperawatan dan Keteknisian Medik					
				400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.7.5	Penunjang medik dan sarana kesehatan					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.5.2	Patologi dan toksilologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.5.3	Radiologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.7.6	Kesehatan Jiwa					
				400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkoba dan sejenisnya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra					
				400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.7.2	Imunisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								merugikan siapapun.	
				400.7.7.4	Kesehatan matra	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.7.8	Pengendalian penyakit menular langsung					
				400.7.8.1	Pengendalian tuberkolosis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.7.9	Pengendalian penyakit bersumber binatang					
				400.7.9.1	Pengendalian malaria	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.9.3	Pengendalian zoonosis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.7.10	Pengendalian penyakit tidak menular					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.10.3	Penyakit kanker	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.7.11	Penyehatan lingkungan					
				400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.11.4	Higien sanitasi pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.7.12	Pengembangan teknologi laboratorium dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.7.13	Gizi					
				400.7.13.1	Gizi makro	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.7.13.2	Gizi mikro	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.13.5	Kewaspadaan gizi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.7.14	Kesehatan ibu					
				400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.7.14.3	Kesehatan maternaldengan pencegahan komplikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.14.4	Keluarga berencana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.7.15	Kesehatan anak					
				400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balitaberesiko	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.7.16	Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer					
				400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								merugikan siapapun.	
			400.7.17	Kesehatan Kerja dan Olah raga					
				400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.17.2	Kapasitas kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.17.3	Lingkungan kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.17.5	Kesehatan perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.7.17.6	Kesehatan olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.7.18	Obat Publk dan perbekalan kesehatan					
				400.7.18.1	Harga obat publik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.18.2	Pengadaan obat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.18.3	Perbekalan kesehatan	Biasa	Pengguna internal daneksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.7.19	Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan					
				400.7.19.1	Alat kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.7.20	Kefarmasian					
				400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.20.2	Farmasi klinis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.20.3	Farmasi Komunitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.20.4	Penggunaan obat rasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								merugikan siapapun.	
			400.7.21	Produksi dan Distribusi Kefarmasian					
				400.7.21.1	Obat tradisional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.21.2	Kosmetik dan makanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.7.22	Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan					
				400.7.22.1	Surat keterangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								merugikan siapapun.	
				400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.7.23	Penanggulangan Krisis Kesehatan					
				400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.23.3	Pemantauan dan informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasibencana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan					
				400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.7.25	Intelegensia Kesehatan					
				400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatankemampuan inteligensia kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensiakesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.7.26	Kesehatan Haji					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.7.27	Promosi Kesehatan					
				400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.27.4	Hari kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								merugikan siapapun.	
			400.7.28	Data dan Informasi					
				400.7.28.1	Statistik kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.7.29	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen					
				400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.29.4	Obat Asli Indonesia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.7.30	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya					
				400.7.30.1	Penilaian keamanan pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.30.2	Standardisasi produk pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.30.4	Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.7.30.5	Pengawasan produk dan bahan berbahaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.7.31	Rekam Medis		Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
8		400.8	AGAMA DAN KEPERCAYAAN						

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			400.8.1	Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.8.2	Fasilitasi					
				400.8.2.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)Prov/Kab/Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.8.2.4	Kasus Keagamaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			400.8.3	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME					
				400.8.3.1	Kelembagaan dan kepercayaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.8.3.2	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.8.3.4	Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
9		400.9		SOSIAL					
			400.9.1	Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.9.2	Kesejahteraan Sosial Anak					
				400.9.2.1	Kesejahteraan sosial anak balita	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.9.2.2	Kesejahteraan sosial anak terlanjar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.9.2.3	Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.9.2.4	Kesejahteraan sosial anak dengan catatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.9.2.5	Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.9.3	Rehabilitasi Sosial					
				400.9.3.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan runguwicara, mental	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan	
				400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi social	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan social	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial					
				400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.9.4.2	Tuna susila dan korban trafficking perempuan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				400.9.4.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.9.6	Pelayanan sosial lanjut usia					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan SumberDaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuandarurat, advokasi sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatansosial, reintegrasi sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.9.9.4	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama nonpemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam					
				400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.9.10.4	Kerjasama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.9.11	Jaminan Sosial					
				400.9.11.1	Seleksi dan verifikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi lembaga, pengelolaan premi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh public tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.9.11.4	Kerjasama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.9.12	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial					
				400.9.12.1	Ketahanan keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.9.13	Pemberdayaan komunitas adat terpencil					
				400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.9.13.3	Penggalian dan pengembangan potensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			400.9.14	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan					
				400.9.14.1	Identifikasi dan analisis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.9.14.2	Pengembangan kapasitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.9.14.3	Penataan sosial lingkungan kumuh	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.9.14.4	Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.9.14.5	Bantuan Langsung	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.9.14.6	Kerjasama Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.9.15	Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial					
				400.9.15.1	Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.9.15.2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.9.15.3	Pengembangan kesetiakawanan sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.9.15.4	Pengelolaan taman makam pahlawan		Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah terkait
10		400.10	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			400.10.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.10.2	Pemerintahan Desa dan Kelurahan					
				400.10.2.1	Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.10.2.2	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.10.2.3	Fasilitasi Permasyarakatan Desa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.10.2.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.10.2.5	Pengembangan Kapasitas Desa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								merugikan siapapun.	
			400.10.3	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat					
				400.10.3.1	Lembaga Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.10.3.2	Pembangunan Partisipatif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.10.3.3	Pendataan Potensi Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.10.3.4	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.10.3.5	Pelatihan Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			400.10.4	Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat					
				400.10.4.1	Budaya Nusantara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.10.4.2	Pemberdayaan Perempuan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.10.4.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.10.4.4	Kesejahteraan Sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.10.4.5	Tenaga Kerja Perdesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.10.5	Usaha Ekonomi Masyarakat					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.10.5.1	Usaha Pertanian dan Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.10.5.2	Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.10.5.3	Produksi dan Pemasaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.10.5.4	Usaha Ekonomi dan Keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.10.5.5	Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.10.6	Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan					

[illegible]

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
11		400.11	PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN						
			400.11.1	Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.11.2	Pertamanan					
				400.11.2.1	Perencanaan Pertamanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.11.2.2	Taman Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.11.2.3	Tata Hias dan Ornamen Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.11.3	Pemakaman					
				400.11.3.1	Perencanaan Pemakaman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.11.3.2	Pemakaman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.11.3.3	Pelayanan Pemakaman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.11.4	Jalur Hijau					
				400.11.4.1	Perencanaan Jalur Hijau	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.11.4.2	Jalur Hijau Jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.11.4.3	Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.11.5	Peran Serta Masyarakat		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			400.11.6	Pengawasan dan Penindakan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.11.7	Pengelolaan Data		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.11.8	Evaluasi dan Pelaporan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
12		400.12		KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					
			400.12.1	Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.12.2	Pendaftaran Penduduk					
				400.12.2.1	Identitas Penduduk	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
							serta penegak hukum	tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
				400.12.2.2	Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				400.12.2.3	Pindah Datang Penduduk Antar Negara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.12.2.4	Pendataan Penduduk Rentan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				400.12.2.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
			400.12.3	Pencatatan Sipil					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.12.3.1	Kelahiran dan Kematian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				400.12.3.2	Perkawinan dan Perceraian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				400.12.3.3	Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				400.12.3.4	Pencatatan Kewarganegaraan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				400.12.3.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			400.12.4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
				400.12.4.1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				400.12.4.2	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.12.4.3	Pengelolaan data Administrasi Kependudukan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.12.4.4	Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				400.12.4.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.12.5	Pengembangan Kebijakan Kependudukan					
				400.12.5.1	Kuantitas Penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.12.5.2	Kualitas Penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.12.5.3	Mobilitas Penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.12.5.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.12.5.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.12.6	Penyerasian Kependudukan					
				400.12.6.1	Indikator Kependudukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.12.6.2	Proyeksi Penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.12.6.3	Perencanaan Kependudukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								merugikan siapapun.	
				400.12.6.4	Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.12.6.5	Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
13		400.13	KELUARGA BERENCANA						
			400.13.1	Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.2	Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk					
				400.13.2.1	Pengumpulan dan pengolahan data	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.13.2.2	Evaluasi dan pelaporan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.3	Fasilitas pengaduan kebijakan					
				pengendalian penduduk					
				400.13.3.1	Penyiapan fasilitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.13.3.2	Evaluasi dan pelaporan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.4	Profil dan proyeksi penduduk					
				400.13.4.1	Data profil dan proyeksi penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.13.4.2	Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			400.13.5	Penetapan parameter pengendalian penduduk					
				400.13.5.1	Penetapan sasaran parameter	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.13.5.2	Evaluasi sasaran parameter	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.6	Pemanfaatan perencanaan pengendalianPenduduk					
				400.13.6.1	Pemanfaatan profil dan proyeksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.13.6.2	Pemanfaatan parameter	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.7	Pengembangan Sistem					
				400.13.7.1	Pengembangan Sistem Jalur PendidikanFormal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								merugikan siapapun.	
				400.13.7.2	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.8	Pengembangan Materi					
				400.13.8.1	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.13.8.2	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.9	Monitoring dan Evaluasi					
				400.13.9.1	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.13.9.2	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								merugikan siapapun.	
			400.13.10	Analisis Sosial		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.11	Analisis Ekonomi		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.12	Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.13	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.14	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			400.13.15	Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.16	Kualitas pelayanan keluarga berencana Pemerintah					
				400.13.16.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.13.16.2	Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.17	Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.18	Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.19	Kualitas pelayanan keluarga berencana Swasta					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.13.19.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.13.19.2	Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencanaswasta	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.20	Akses dan kualitas pelayanan keluargaberencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan					
				400.13.20.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.13.20.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil,dan perbatasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.21	Akses dan kualitas pelayanan keluargaberencana wilayah miskin perkotaan					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.13.21.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.13.21.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.22	Kesertaan keluarga berencana pria					
				400.13.22.1	Peningkatan akses keluarga berencana pria	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.13.22.2	Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.23	Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.24	Pencegahan PMS dan HIV/AIDS		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								merugikan siapapun.	
			400.13.25	Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.26	Pelebagaan bina keluarga Balita dan anak					
				400.13.26.1	Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.13.26.2	Pengembangan kemitraan binakeluarga dan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.27	Monitoring dan evaluasi bina keluargaBalita dan anak					
				400.13.27.1	Monitoring binakeluarga Balita dan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.13.27.2	Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.28	Pelebagaan bina ketahanan remaja					
				400.13.28.1	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.13.28.2	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.29	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja					
				400.13.29.1	Monitoring bina ketahanan remaja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.13.29.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			400.13.30	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan					
				400.13.30.1	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.13.30.2	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.31	Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan					
				400.13.31.1	Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.13.31.2	Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.32	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.13.32.1	Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.13.32.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.33	Pengembangan program usaha ekonomi keluarga		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.34	Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.35	Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga					
				400.13.35.1	Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi Keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.13.35.2	Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.36	Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.37	Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.38	Pelebagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera					
				400.13.38.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.13.38.2	Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.39	Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.13.39.1	Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.13.39.2	Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.40	Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi					
				400.13.40.1	Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.13.40.2	Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.41	Advokasi dan pencitraan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.42	Komunikasi, Informasi dan Edukasi					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.13.42.1	Promosi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.13.42.2	Sarana produksi media komunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.13.42.3	Produk media komunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.43	Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.44	Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota					
				400.13.44.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.13.44.2	Penguatan hubungan dengan lembagapemerintah kabupaten dan kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.45	Hubungan dengan lembaga nonpemerintah					
				400.13.45.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.13.45.2	Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.46	Tenaga Lini Lapangan					
				400.13.46.1	Pengembangan tenaga lini lapangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.13.46.2	Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.47	Institusi Masyarakat Pedesaan					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.13.47.1	Pengembangan institusi masyarakat pedesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.13.47.2	Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.48	Mekanisme Operasional lini lapangan					
				400.13.48.1	Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.13.48.2	Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.49	Pengembangan sistem pencatatan dan Pelaporan					
				400.13.49.1	Perumusan pola sistem pencatatan dan Pelaporan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.13.49.2	Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.50	Pengumpulan dan pengolahan data		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.51	Analisis dan evaluasi					
				400.13.51.1	Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.13.51.2	Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.52	Sistem aplikasi dan bank data					
				400.13.52.1	Pengembangan sistem aplikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.13.52.2	Pengelolaan bank data	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.53	Infrastruktur teknologi informasi					
				400.13.53.1	Pengembangan infrastruktur teknologi Informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.13.53.2	Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.13.54	Dokumentasi dan penyebaran informasi					
				400.13.54.1	Dokumentasi dan perpustakaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.13.54.2	Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
14		400.14	HUBUNGAN MASYARAKAT						
			400.14.1	Keprotokolan					
				400.14.1.1	Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.14.1.2	Buku tamu Keprotokolan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.14.1.3	Agenda kegiatan pimpinan daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.14.1.4	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.14.2	Daftar nama/alamat kantor /pejabat		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								merugikan siapapun.	
			400.14.3	Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa- peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas,foto/video/rekaman suara/multi media		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.14.4	Pengumpulan,pengolahan dan penyajianinformasi kelembagaan					
				400.14.4.1	Kliping koran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.14.4.2	Brosur/Leaflet/poster/plakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.14.4.3	Pengumuman/pemberitaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.14.5	Hubungan antar lembaga danPemerintahan Daerah					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				400.14.5.1	Hubungan antar lembaga pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.14.5.2	Hubungan dengan organisasi sosial / LSM	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.14.5.3	Hubungan dengan perusahaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.14.5.4	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/PraktekKerja Lapang (PKL)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.14.5.5	Forum Kehumasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				400.14.5.6	Hubungan dengan Media Massa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								merugikan siapapun.	
			400.14.6	Dengar pendapat/hearing DPRD		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.14.7	Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.14.8	Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.14.9	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.14.10	Pameran/sayemara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			400.14.11	Penghargaan/tanda kenang-kenangan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								merugikan siapapun.	
			400.14.12	Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
VI	500	PEREKONOMIAN							
1		500.1	KETAHANAN PANGAN						
			500.1.1	Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.1.2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan					
				500.1.2.1	Ketersediaan Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.1.2.2	Akses Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.1.2.3	Kerawanan Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.1.3	Distribusi dan Cadangan Pangan					
				500.1.3.1	Distribusi Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.1.3.2	Harga Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.1.3.3	Cadangan Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.1.4	Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan					
				500.1.4.1	Konsumsi Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.1.4.2	Penganekaragaman Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.1.4.3	Keamanan Pangan Segar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.1.5	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan					
				500.1.5.1	Dewan Ketahanan Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.1.5.2	Penghargaan Ketahanan Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.1.6	Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			500.1.7	Bimbingan Teknis		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.1.8	Evaluasi		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
2		500.2	PERDAGANGAN						
			500.2.1	Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.2.2	Perdagangan Dalam Negeri					
				500.2.2.1	Bina Usaha Kelembagaan danPenguatan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.2.2	Bisa Usaha Jasa Perdangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.2.2.3	Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.2.4	Informasi Perusahaan	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
				500.2.2.5	Pelaku Pasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.2.6	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.2.2.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.2.8	Pengembangan Produk Lokal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.2.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.2.10	Pengembangan Sarana Distribusi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.2.12	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan TeknisPenyedia Jasa Logistik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.2.14	Informasi Pasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.2.15	Informasi Hasil Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.2.16	Barang Strategis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.2.17	Bahan Pokok Agro	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.2.3	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.3.4	Tata usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.3.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.3.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.2.3.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.3.9	Produk pertambangan dan aneka industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.3.11	Jasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.3.12	Kerjasama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.3.14	Kelembagaan dan dan penilaian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.3.16	Pengawasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.3.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.3.18	Balai Pengujian UTTP	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			500.2.4	Perdagangan Berjangka Komoditi					
				500.2.4.1	Pengkajian pasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.4.2	Pengawasan Transaksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.4.4	Pengkajian pasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.4.5	Pengembangan Pasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.2.4.6	Sistem informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.4.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.4.8	Pengawasan pasar lelang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.2.4.9	Pengawasan sistem gudang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.2.5	Bimbingan Teknis		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.2.6	Evaluasi		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3		500.3	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH						
			500.3.1	Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.3.2	Kelembagaan Koperasi dan UKM					
				500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.3.2.2	Tata Laksana Koperasi dan UKM	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.3.2.3	Keanggotaan Koperasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.3.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.3.3	Produksi					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.3.4	Pembiayaan					
				500.3.4.1	Program Pendanaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.3.4.3	Urusan Permodalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.3.5	Pemasaran dan Jaringan Usaha					
				500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.3.5.2	Ekspor dan Impor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.3.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia					
				500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.3.6.5	Advokasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			500.3.7	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.3.8	Pengkajian Sumber Daya UKMK					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.3.8.1	Penelitian Koperasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.3.8.2	Penelitian UKM	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.3.9	Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.3.10	Pedagang Kaki Lima (PKL)					
				500.3.10.1	Peraturan Perundang-Undangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.3.10.2	Sarana dan Prasarana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.3.11	Monitoring dan Evaluasi		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
4		500.4	KEHUTANAN						
			500.4.1	Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.4.2	Penyuluhan					
				500.4.2.1	Program Kerja Penyuluhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.2.2	Materi Penyuluhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.4.2.3	Program Penyuluhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.2.4	Sarana Penyuluhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.2.5	Pengembangan Tenaga Penyuluhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.2.6	Pelaksanaan Penyuluhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.2.8	Deseminasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.4.2.9	Evaluasi, dan Laporan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.4.3	Planologi Kehutanan					
				500.4.3.1	Perencanaan Makro Kawasan Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.4.3.2	Penataan Ruang Kawasan Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.4.3.3	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.3.4	Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.4.3.5	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.4.3.6	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.4.3.7	Inventarisasi Sumber Daya Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.4.3.8	Pemantauan Sumber Daya Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				500.4.3.9	Pemetaan Sumber Daya Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.4.3.10	Jaringan Data Spasial	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.4.3.11	Penggunaan Kawasan Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.4.3.12	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.3.13	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.3.14	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				500.4.3.15	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.4.3.16	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
			500.4.4	Bina Usaha Kehutanan					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.4.4.1	Data areal HPH /HTI/IUPHHK	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
						Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat	Unit pengolah terkait
				500.4.4.2	SK HPH/HTI/IUPHHK		internal dan eksternal serta penegak hukum	mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
				500.4.4.3	Kerjasama	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
							serta penegak hukum	tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
				500.4.4.4	Pembatalan/Penolakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.4.4.5	Perpanjangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.4.4.6	Modal dan Peralatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.4.4.7	Investasi Industri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.4.4.8	Peralatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.4.4.9	Tenaga Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.4.10	Pemegang Saham	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.4.11	Neraca Perusahaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
				500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat Mengakibatkan terganggunya	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
							serta penegak hukum	pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
				500.4.4.17	Produksi Kayu	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.4.4.18	Produksi non kayu	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
				500.4.4.21	Industri Non Kayu	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait
				500.4.4.25	Pemblokiran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait
				500.4.4.26	Denda	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
				500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana KerjaUsaha Produksi Hasil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.4.34	Produksi Hutan Alam	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								merugikan siapapun.	
				500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi HutanTanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan UsahaPemanfaatan Hutan Tanaman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
				500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Penentu kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan	
				500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
			500.4.5	Standardisasi dan Lingkungan					
				500.4.5.1	Standardisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.5.3	Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
			500.4.6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam					
				500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.6.4	Konvensi Keanekaragaman Hayati	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.6.5	Kawasan Konservasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.6.6	Pengamanan Hutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.6.7	Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.4.6.8	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.6.9	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.6.10	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.6.11	Bina Cinta Alam	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.6.12	Kader Konservasi Sumber Daya Alam	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.6.13	Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			500.4.7	Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial					
				500.4.7.1	Pengelolaan Benih	Biasa	Pengguna internal daneksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.7.2	Kebun Benih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.7.3	Tegakan Benih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.7.4	Pengadaan Benih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.7.5	Pengujian dan Penyimpanan Benih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.4.7.6	Lalu Lintas Angkutan Benih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.7.7	Pembibitan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.7.8	Lalu Lintas Angkutan Benih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.7.9	Pengembangan Usaha Perbenihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.7.10	Pengendalian Peredaran Benih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.7.11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.4.7.12	Tanaman Reboisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.7.13	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.7.14	Perhutanan Sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.7.15	Pengendalian Perladangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.4.8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan					
				500.4.8.1	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.8.2	Monitoring dan Evaluasi Penelitian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.4.8.3	Diseminasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.8.4	Gelar Teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.4.8.5	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
5		500.5	KELAUTAN DAN PERIKANAN						
			500.5.1	Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.5.2	Perikanan Tangkap					
				500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.2.5	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.2.12	Kelembgaan Usaha Penangkapan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.5.2.14	Kenelayanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.5.3	Perikanan Budidaya					
				500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								merugikan siapapun.	
				500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.3.6	Budidaya Air Tawar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.5.4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan					
				500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.4.2	Pengembangan Produk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.4.4	Industri Pengolahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								merugikan siapapun.	
				500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.4.8	Pengembangan Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.4.17	Pengembangan Ekspor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.4.18	Pengembangan Impor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.4.20	Pelayanan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.4.21	Kemitraan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.4.23	Investasi dan Permodalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.4.24	Informasi dan Promosi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.5			Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil					
				500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi	Sangat Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal sertapenegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara.	Unit pengolah terkait
				500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I	Sangat Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal daneksternal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
							serta penegak hukum	kedaulatan negara.	
				500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II	Sangat Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal sertapenegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara.	Unit pengolah terkait
				500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.5.5.6	Konservasi Wawasan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan	
				500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
				500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil	Sangat Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau- Pulau Terkecil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.5.17	Akses Permodalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.5.5.20	Pengembangan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.5.6	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan					
				500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.5.6.12	Pengawakan Kapal Pengawas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.5.6.13	Sistem Pemantauan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.5.6.17	Penyidikan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
			500.5.7	Karantina Ikan					
				500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.5.7.2	Penahanan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.5.7.3	Pengasingan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.5.7.4	Pengamatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				500.5.7.5	Pengakuan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.5.7.6	Penolakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.5.7.7	Pemusnahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				500.5.7.10	Permohonan Sertifikat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.5.7.11	Pemasukan Formulir	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.5.7.14	Surat Perintah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				500.5.7.15	Rekomendasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.5.7.16	Penutupan Suatu Area	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.5.7.21	Lokasi Karantina	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
6		500.6	PERTANIAN						
			500.6.1	Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			500.6.2	Perlindungan hortikultura					
				500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.6.3	Perbenihan Hortikultura					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.6.3.1	Penilaian Varietas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan					
				500.6.4.1	Basis Data Lahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.4.2	Pengendalian Lahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi					
				500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.5.4	Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
			500.6.6	Pembiayaan Pertanian					
				500.6.6.1	Pembiayaan Program	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.6.7	Pupuk Pestisida					
				500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.6.7.2	Pupuk Anorganik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.7.3	Pestisida	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian					
				500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan					
				500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.9.2	Produksi Benih Serealia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.9.4	Kelembagaan Benih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.6.10	Budidaya Serealia					
				500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.10.3	Jagung	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.10.4	Serealiala Lain	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.6.11	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi					
				500.6.11.1	Kedelai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.11.2	Ubi Kayu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.11.3	Aneka Kacang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.6.11.4	Aneka Umbi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.6.12	Tanaman Pangan					
				500.6.12.1	Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.12.3	Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.6.13	Pascapanen Tanaman Pangan					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.6.13.1	Padi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.13.2	Jagung dan Serealialin	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.13.4	Aneka Umbi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.6.14	Pengolahan Hasil Pertanian					
				500.6.14.1	Tanaman Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.6.14.2	Holtikultura	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.14.3	Perkebunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.14.4	Peternakan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.6.15	Mutu dan Standarasi					
				500.6.15.1	Standardisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.6.16	Pengembangan Usaha dan Investasi					
				500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.16.2	Investasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.16.4	Promosi Luar Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
			500.6.17	Pemasaran Domestik					
				500.6.17.1	Informasi Pasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.17.4	Jaringan Pemasaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.6.18	Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan (antara lain : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat)		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.6.19	Hasil Penelitian, Pengkajian, danPengembangan					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.6.20	Diseminasi		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.6.21	Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian					
				500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			500.6.22	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.6.23	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.6.24	Data Penelitian dan Pengembangan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.6.25	Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.6.26	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)					
				500.6.26.1	Hak Cipta	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				500.6.26.2	Hak Paten Sederhana	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				500.6.26.3	Hak Paten Biasa	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.6.26.4	Hak Merek	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				500.6.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				500.6.26.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				500.6.26.7	Permohonan HKI yang ditolak	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			500.6.27	Pelayanan Perijinan Pertanian					
				500.6.27.1	Sarana I (bidang pupuk,pestisida, alat dan mesin pertanian)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.6.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan sahamperkebunan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.6.27.3	Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber dayagenetik ternak)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.6.28	Pelayanan Hukum					
				500.6.28.1	Sertifikasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				500.6.28.2	Pertimbangan Hukum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			500.6.29	Karantina Pertanian					
				500.6.29.1	Karantina Tumbuhan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				500.6.29.2	Karantina Hewan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			500.6.30	Bimbingan Teknis		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
			500.6.31	Evaluasi		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
7		500.7	PETERNAKAN						
			500.7.1	Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.7.2	Peternakan dan Kesehatan Hewan					
				500.7.2.1	Perbibitan Ternak (antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & PersetujuanPemasukan/ Pengeluaran)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.7.2.2	Pakan Ternak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.7.2.3	Budidaya Ternak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.7.2.4	Kesehatan Hewan (antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan ObatHewan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.7.2.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen (antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran)				
			500.7.3	Bimbingan Teknis		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.7.4	Evaluasi		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
8		500.8	PERKEBUNAN			Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.8.1	Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah					
			500.8.2	Tanaman Semusim					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.8.2.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.8.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.8.2.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.8.3	Tanaman Rempah & Penyegar					
				500.8.3.1	Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.8.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.8.3.3	Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.8.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.8.4	Tanaman Tahunan					
				500.8.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.8.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.8.4.3	Budidaya Tanaman Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.8.4.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.8.5	Perlindungan Perkebunan					
				500.8.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
				500.8.5.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.8.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.8.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.8.6	Pascapanen dan Pembinaan Usaha					
				500.8.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.8.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.8.7	Bimbingan Teknis Perkebunan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			500.8.8	Evaluasi Perkebunan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
9		500.9	PERINDUSTRIAN						
			500.9.1	Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.9.2	Iklim Usaha dan Kerja Sama					
				500.9.2.1	Industri Manufaktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.9.2.2	Industri Agro	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.9.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.9.3	Promosi Industri					
				500.9.3.1	Industri Manufaktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.9.3.2	Promosi Industri Agro	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.9.4	Standarisasi dan Teknologi					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.9.4.1	Industri Manufaktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.9.4.2	Industri Agro	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.9.5	Hak atas Kekayaan Intelektual					
				500.9.5.1	Industri Manufaktur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				500.9.5.2	Industri Agro	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
			500.9.6	Industri Hijau					
				500.9.6.1	Industri Manufaktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.9.6.2	Industri Agro	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.9.7	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.9.8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.9.9	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri		Biasa	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh	Unit pengolah terkait
			500.9.10	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.9.11	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.9.12	Standarisasi					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.9.12.1	Standar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.9.12.2	Penyiapan Penerapan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.9.12.3	Infrastruktur Standar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.9.13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri					
				500.9.13.1	Kebijakan Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.9.13.2	Perpajakan dan Tarif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.9.13.3	Pengembangan Model Industrial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								merugikan siapapun.	
			500.9.14	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup					
				500.9.14.1	Industri Hijau	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.9.14.2	Lingkungan Hidup	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.9.14.3	Energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.9.15	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual					
				500.9.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.9.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.9.15.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.9.16	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
10		500.10	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
			500.10.1	Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.10.2	Rekomendasi Kegeologian					
				500.10.2.1	Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.2.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.10.2.3	Pertambangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.10.2.4	Panas Bumi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				500.10.2.5	Geosains	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.2.6	Pengukuran <i>Time Domain Electromagnetic (TDEM)</i>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.2.7	Kelayakan Lingkungan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
			500.10.3	Penelitian Kegeologian					
				500.10.3.1	Administrasi pelaksanaan penelitian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.3.2	Administrasi tenaga penelitian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.3.3	Administrasi penggunaan peralatan penelitian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.3.4	Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.3.5	Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.10.3.6	Sumber Daya Geologi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.3.7	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.3.8	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.3.9	Survei Geologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.10.4	Inventarisasi dan evaluasi kegeologian					
				500.10.4.1	Sumber Daya Geologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.4.4	Survei Geologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.4.5	Konservasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.10.5	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi					
				500.10.5.1	Peta potensi dan sebaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					sertakebakaran Batubara				
				500.10.5.4	Survei Geologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.10.6	Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi					
				500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.6.4	Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.10.7	Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.7.1	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.10.7.2	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur EksplorasiTahunan)				

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.7.3	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksplorasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.7.4	Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.10.7.5	Perpanjangan Kontrak KKS	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.10.7.6	Penetapan Alokasi dan Harga Gas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.7.7	Partisipasi <i>Interest</i>	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
			500.10.8	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi					
				500.10.8.1	Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain (antara lain: Pedoman dan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/pe nandasahan), Pengawasan)				
				500.10.8.2	Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yangditetapkan dengan Keputusan Menteri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.10.9	Teknik dan Lingkungan					
				500.10.9.1	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)				
				500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) (antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.9.3	Buku Register <i>Welding Procedure Specification (WPS) / Procedure Qualification Record (PQR)</i>	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir (antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja (antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.9.10	Usaha penunjang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.10.10	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi					
				500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.10.2	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
			500.10.11	Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi					
				500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.11.2	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.11.7	<i>Road Map</i> di Bidang EBT	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.10.12	Panas Bumi					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.12.5	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi <i>Welding Prosedure Specification (WPS)</i> dan <i>Prosedure Qualification Record (PQR)</i> dan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
					kualifikasi Juru Las				
				500.10.12.8	Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.12.11	Penetapan kapasitas usaha panas bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.12.12	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada KegiatanPengusahaan Panas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
			500.10.13	Bioenergi					
				500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								merugikan siapapun.	
				500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.13.6	Database Pengusahaan Bioenergi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untukPembangkit Listrik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh public tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.10.14	Aneka Energi					
				500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.10.15	Konservasi Energi					
				500.10.15.1	Audit Energi melalui program kemitraanKonservasi Energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.15.2	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
				500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi diatas 6.000 TOE	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.15.5	Penyusunan daftar peralatan/ teknologi efisiensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.15.8	Profil investasi efisiensi energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.15.9	<i>Investment Grade Audit (IGA)</i>	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.15.10	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.10.16	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE					
				500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.16.4	Evaluasi Program Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.10.17	Bina Program Tenaga Listrik					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.17.1	Investasi dan pendanaan tenaga listrik (antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasidan pendanaan tenaga listrik)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.17.2	Pengembangan listrik pedesaan (antara lain: Data program listrik pedesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik pedesaan, Listrik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					untuk masyarakat tidak mampu)				
				500.10.17.3	Data dan Informasi Ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
			500.10.18	Bina Usaha Ketenagalistikan					
				500.10.18.1	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan (antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S,dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegangIzin)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
				500.10.18.2	Harga dan Subsidi Listrik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.18.3	Hubungan komersial tenaga listrik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.18.4	Perlindungan konsumen listrik (antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.10.19	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.19.1	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.19.2	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.19.3	Usaha penunjang ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik(IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.19.4	Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi <i>Clean Development Mechansim(CDM)</i>	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.10.20	Sertifikasi					
				500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.20.4	Dokumen Pembinaan dan pengawasan Sertifikat Laik Operasi (SLO) instalasi tenaga listrik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.10.21	Akreditasi Ketenagalistrikan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.10.22	Standarisasi Kompetensi		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

[illegible]

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.24.5	Laporan hasil pengawasan penunjukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.10.25	Bina Program Mineral dan Batubara					
				500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.25.4	Data dan Informasi Mineral dan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					dan Batubara melalui lelang reguler				
				500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.10.26	Pembinaan Pengusahaan Mineral					
				500.10.26.1	Ketenagakerjaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.10.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineraljarang)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.26.8	Kontrak Karya (KK)	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
				500.10.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.26.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.26.12	Teguran kepadapengusahaan Kontrak Karya (KK)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.26.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambanganmineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.26.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awalsampul dengan rancangan akhir	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.26.15	Pelaporan usaha pertambangan mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.26.16	Penghargaan usaha pertambangan mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.26.17	Penerbitan sertifikat <i>clear and clean</i> (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.10.27	Pembinaan Pengusahaan Batubara					
				500.10.27.1	Ketenagakerjaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.27.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.27.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.10.27.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.27.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.27.6	Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut) antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara				
				500.10.27.7	Perizinan Usaha Pertambangan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.27.8	Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.27.9	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist) PKP2B hingga Data Asset Perusahaan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
				500.10.27.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.27.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian KaryaPengusahaan Batubara (PKP2B)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.27.12	Teguran kepada pengusaha Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional,dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.27.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
				500.10.27.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awalsampul dengan rancangan akhir	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.27.15	Pelaporan usaha pertambangan batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.27.16	Penghargaan usaha pertambangan batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								merugikan siapapun.	
				500.10.27.17	Penerbitan sertifikat <i>clear and clean (CnC)</i> Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara	Biasa	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.10.28	Penerimaan Negara					
				500.10.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.10.29	Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.29.1	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), dan Standar Nasional Indonesia (SNI)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/ Wakil Kepala Teknik Tambang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja (antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/ Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.29.5	Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang (antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang hingga Berita Acara Hasil Inspeksi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.29.8	Rekomendasi bahan kimia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.29.9	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.29.10	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan pelaksanaan reklamasi (antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) hingga Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.29.11	Pemberian Penghargaan (antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselamatan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					Penghargaan Keselamatan)				
				500.10.29.12	Pengawasan lingkungan pertambangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.29.13	Usaha Jasa Mineral dan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.29.14	Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.29.15	Rekomendasi Teknis (antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Rekomendasi Teknis, Surat Rekomendasi Teknis)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.29.16	Persetujuan Teknis (antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Persetujuan Teknis, Surat Persetujuan Teknis)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
				500.10.29.17	Pengawasan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.29.18	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.29.19	Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara (antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis Lingkungan Pertambangan,	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pertambangan)				
			500.10.30	Program Penelitian dan Pengembangan					
				500.10.30.1	Rencana Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.30.2	Pengembangan dan inovasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.30.3	Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/pengkajian/pengembangan/inovasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.30.4	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangandan inovasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.30.5	Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.30.6	Pembinaan penelitian/ Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.30.8	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.30.9	<i>Master proceeding/</i> jurnal penelitian, pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi			merugikan siapapun.	
				500.10.30.10	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.10.30.11	Forum komunikasi penelitian, pengembangandan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.30.12	Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.30.13	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.10.31	Sarana Litbang					
				500.10.31.1	Administrasi penggunaan peralatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.31.2	Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.10.32	Afiliasi					
				500.10.32.1	Proyek Percontohan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.32.3	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.32.4	Penyajian Informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.10.33	Penelitian dan Pengembangan Kegeologian					
				500.10.33.1	Pemetaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.10.33.2	Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahanpantai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
				500.10.33.3	Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.10.33.4	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			500.10.34	Penelitian dan Pengembangan TeknologiMinyak dan Gas Bumi					
				500.10.34.1	Teknologi Eksplorasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.10.34.2	Teknologi Eksploitasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.34.3	Laboratorium	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.10.34.4	Study	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.34.5	Teknologi Proses	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.34.6	Teknologi Aplikasi Produk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.34.7	Teknologi Gas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			500.10.35	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara					
				500.10.35.1	Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.10.35.2	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.35.3	Teknologi Pemanfaatan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.10.36	Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.10.36.1	Energi baru terbarukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.36.2	Teknologi Ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.36.3	Lingkungan dan Konservasi Energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.10.36.4	Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) danKonservasi Energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
11		500.11	PERHUBUNGAN						
			500.11.1	Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			500.11.2	Jaringan Prasarana dan Pelayanan					
				500.11.2.1	Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.2.2	Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.2.3	Penetapan lokasi terminal barang utama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.2.4	Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
						Biasa	Pengguna	Apabila diketahui	Unit pengolah
				500.11.2.5	Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi		internal dan eksternal	oleh publik tidak merugikan siapapun.	terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.11.2.6	Jaringan lintas pada jaringan jalan primer	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.2.7	Penetapan kelas jalan primer	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.2.8	Kualifikasi teknis petugas terminal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.2.9	Jaringan transportasi jalan sekunder	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.11.3	Pengembangan Transportasi Jalan					
				500.11.3.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.3.2	Pengembangan transportasi jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								merugikan siapapun.	
			500.11.4	Pengujian Kendaraan Bermotor					
				500.11.4.1	Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.4.2	Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.4.3	Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.4.4	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.11.5	Teknologi Kendaraan Bermotor					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.11.5.1	Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.5.2	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.5.3	Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.5.4	Harmonisasi dan standardisasi regulasikendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.11.6	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					
				500.11.6.1	Analisa dampak lalu lintasjalan nasional di luar kawasan perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.6.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			500.11.7	Perlengkapan Jalan					
				500.11.7.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.7.3	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.7.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraanBermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.7.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan, danpemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.11.8	Angkutan Penumpang					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.11.8.1	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.8.7	Angkutan perintis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.11.9	Angkutan Barang					
				500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.9.2	Tarif angkutan barang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.11.10	Monitoring Operasional					
				500.11.10.1	Pengendalian operasionalLalu Lintas dan Angkutan Jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraanangkutan umum yang menjadi kewenangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								merugikan siapapun.	
			500.11.11	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil					
				500.11.11.1	Pedoman Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.11.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.11.3	Bimtek PPNS	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.11.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			500.11.12	Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau danPenyeberangan					
				500.11.12.1	Pendataan jaringan transportasi sungai, danau,dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.12.2	Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai,danau, & penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.11.13	Pengembangan Jaringan JaringanTransportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan					
				500.11.13.1	Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.11.13.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.11.14	Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.11.15	Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan					
				500.11.15.1	Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.15.2	Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.11.16	Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.11.16.1	Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.16.2	Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.16.3	Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.16.4	Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.11.17	Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
			500.11.18	Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan					
				500.11.18.1	Manajemen lalu lintas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.18.2	Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.18.3	Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.18.4	Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.11.19	Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.11.19.1	Pengerukan alur pelayaransungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.19.2	Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.19.3	Perambuan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.11.20	Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan					
				500.11.20.1	Penyelenggaraan angkutansungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.20.2	Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.11.21	Tarif dan Keperintisan					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.11.21.1	Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.21.2	Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.11.22	Bina Sistem Transportasi Perkotaan					
				500.11.22.1	Jaringan Transportasi Perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.22.2	Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.22.3	Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					wilayah administrasi provinsi				
			500.11.23	Lalu Lintas Perkotaan					
				500.11.23.1	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.23.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan Perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.23.3	Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.11.24	Angkutan Perkotaan					
				500.11.24.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.11.24.2	Jaringan trayek perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.24.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.11.25	Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan					
				500.11.25.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/ataubarang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.11.25.2	Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.25.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.11.26	Dampak Transportasi Perkotaan					
				500.11.26.1	Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.11.26.2	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.26.3	Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.26.4	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.26.5	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.26.6	Masterplan transportasi perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.11.27	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.11.27.1	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.27.2	Kualifikasi unit pengkajian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.27.3	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.11.28	Pengembangan Keselamatan					
				500.11.28.1	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.28.2	Harmonisasi kebijakan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.11.29	Promosi dan Kemitraan Keselamatan					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.11.29.1	Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.29.2	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.11.30	Bina Keselamatan Angkutan Umum					
				500.11.30.1	Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			500.11.31	Audit Keselamatan					
				500.11.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber dayamanusia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau danpenyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.11.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau danpenyeberangan serta laik fungsi jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.11.32	Inspeksi Keselamatan					
				500.11.32.1	Pedoman keselamatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
12		500.12	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
			500.12.1	Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.12.2	Telekomunikasi					
				500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.12.3	Penyiaran					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.12.3.2	<i>Database</i> Penyelenggaraan Radio dan Televisi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.12.4	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal					
				500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								merugikan siapapun.	
				500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.12.5	Pengendalian Informatika					
				500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.12.6	<i>e- Government</i>					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.12.6.1	Tata Kelola e-Government	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				500.12.6.2	Teknologi dan Infrastrukture-Government	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				500.12.6.4	Aplikasi Layanan Pemerintahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.12.7	e- Business					
				500.12.7.1	Tata Kelola <i>e-Business</i>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				500.12.7.2	Teknologi dan Infrastrukture- <i>Business</i>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e- <i>Business</i>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Business	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat					
				500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika					
				500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.12.9.4	Industri Konten Multimedia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.12.10	Keamanan Informasi					
				500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			500.12.11	Komunikasi Publik					
				500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi					
				500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.12.12.2	Informasi Perekonomian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.12.13	Pengelolaan Media Publik					
				500.12.13.1	Media Cetak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.12.13.2	Media <i>Online</i>	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.12.13.3	Media Luar Ruang dan <i>Audio Visual</i>	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.12.14	Kemitraan Komunikasi					
				500.12.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.12.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.12.14.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.12.15	Infrastruktur Informatika					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.12.15.1	Jaringan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				500.12.15.2	Piranti Teknologi Informatika	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				500.12.15.3	Keamanan Informatika	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
			500.12.16	Sistem dan Data					
				500.12.16.1	Portal dan Konten	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				500.12.16.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.12.16.3	Pengembangan Aplikasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			500.12.17	Pusat Kerjasama					
				500.12.17.1	Kerja Sama daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.12.17.2	Kerja Sama Bilateral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.12.18	Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat					
				500.12.18.1	Pelayanan Informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			500.12.18.2	Hubungan Masyarakat		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.12.18.3	Bimbingan Teknis		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		500.12.19	Evaluasi			Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
13		500.13	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						
			500.13.1	Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.13.2	Pengembangan Destinasi Wisata					
			500.13.2.1	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.13.2.2	Pengembangan Daya Tarik Wisata	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.13.2.3	Industri Pariwisata	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.13.2.4	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.13.2.5	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan <i>Event</i>	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.13.3	Pemasaran Pariwisata					
				500.13.3.1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.13.3.2	Promosi Pariwisata Luar Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.13.3.3	Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.13.3.4	Pencitraan Indonesia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.13.4	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya					
				500.13.4.1	Pengembangan industri Perfilman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.13.4.2	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.13.4.3	Pengembangan Seni Rupa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.13.5	Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.13.5.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.13.5.2	Desain dan Arsitektur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.13.5.3	Kerjasama dan Fasilitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.13.6	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
				500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan KebijakanKepariwisata	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan KebijakanEkonomi Kreatif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.13.6.3	Pengembangan SDM Kepariwisata dan EkonomiKreatif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								merugikan siapapun.	
				500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
14		500.14	STATISTIK						
			500.14.1	Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.14.2	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi					
				500.14.2.1	Perencanaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.14.2.2	Persiapan (antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan				

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Uji coba				
				500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.14.2.4	Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/ <i>Batching</i>), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (<i>Editing/ Coding</i>), Perekaman data (<i>entri, scanner</i>), Tabulasi Data, Pemeriksaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)				
				500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.14.3	Survei					
				500.14.3.1	Perencanaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.14.3.2	Persiapan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan (antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.14.3.4	Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ <i>Batching</i>), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (<i>Editing/ Coding</i>), Perekaman data (<i>entri, scanner</i>), Tabulasi Data,Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei (antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunanangka sementara, Penyusunan angka tetap, Penyusunan/pembahasan draft publikasi, Analisis data,	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					Penyusunan publikasi)				
				500.14.3.6	Diseminasi hasil Survei	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.14.4	Konsolidasi Data Statistik					
				500.14.4.1	Kompilasi Data	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.14.4.2	Analisis data	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.14.4.3	Penyusunan Publikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
			500.14.5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
15		500.15	KETENAGAKERJAAN						
			500.15.1	Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.15.2	Perencanaan Tenaga Kerja					
				500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.15.3	Pengembangan Standarisasi Kompetensi					
				500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								merugikan siapapun.	
				500.15.3.2	Pengembangan Standarisasi Kompetensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.15.4	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja					
				500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.15.5	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan					
				500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.5.3	Tenaga Pelatihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								merugikan siapapun.	
				500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.15.6	Bina Pemagangan					
				500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.15.7	Produktivitas dan Kewirausahaan					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.15.8	Pengembangan Pasar Kerja					
				500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.8.3	Bursa Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.8.4	Analisis Jabatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.15.9	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri					
				500.15.9.1	Antar Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.15.10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal					
				500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.15.11	Standardisasi Profesi					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.15.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.11.2	Pembakuan Akreditasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.15.12	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi					
				500.15.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.12.2	Perjanjian Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.12.3	Kesejahteraan Pekerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.15.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.15.13	Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial					
				500.15.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.13.3	Pemasyarakatan Hubungan Industrial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.15.14	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial					
				500.15.14.1	Pengupahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.15.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.15.15	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial					
				500.15.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.15.16	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja					
				500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.15.17	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak					
				500.15.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.17.3	Kerjasama Lintas Sektoral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.15.17.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.15.18	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja					
				500.15.18.1	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.18.2	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.18.3	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.18.4	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.15.18.5	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.15.19	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.15.20	Bina Penegakan Hukum					
				500.15.20.1	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				500.15.20.2	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
				500.15.20.3	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				500.15.20.4	Kerjasama Penegakan Hukum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			500.15.21	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)					
				500.15.21.1	Analisis dan Standardisasi bidang K 3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.21.2	Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.21.3	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.21.4	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.15.22	Pengembangan SDM dan Kompetensi K3					
				500.15.22.1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.15.22.2	Penyebarluasan InformasiPengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.22.3	Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDMdan Kompetensi K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.22.4	Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.22.5	Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM danKompetensi K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.15.22.6	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
16		500.16	PENANAMAN MODAL						

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			500.16.1	Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.16.2	Perencanaan Penanaman Modal					
				500.16.2.1	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.16.2.2	Perencanaan Industri Manufaktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.16.2.3	Perencanaan Jasa dan Kawasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.16.2.4	Perencanaan Infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.16.3	Pengembangan Iklim Penanaman Modal					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.16.3.1	Deregulasi Penanaman Modal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.16.3.2	Pengembangan Potensi Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.16.3.3	Pemberdayaan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.16.3.4	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.16.3.5	Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.16.3.6	Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.16.4	Promosi Penanaman Modal					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.16.4.1	Pengembangan Promosi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.16.4.2	Analisis Strategi Promosi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.16.4.3	Fasilitasi Promosi Luar Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.16.4.4	Promosi Sektoral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.16.4.5	Fasilitasi Promosi Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.16.4.6	Pameran dan Sarana Promosi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.16.5	Kerja Sama Penanaman Modal					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.16.5.1	Kerja Sama Bilateral dan Multilateral	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.16.5.2	Kerja Sama Regional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.16.5.3	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
			500.16.6	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					
				500.16.6.1	Pemantauan Penanaman Modal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.16.6.2	Data Realisasi Penanaman Modal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				500.16.6.3	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.16.6.4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.16.6.5	Pengawasan Penanaman Modal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				500.16.6.6	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
			500.16.7	Pelayanan Penanaman Modal					
				500.16.7.1	Pelayanan Aplikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			500.16.7.2	Pelayanan Perijinan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.16.7.3	Pelayanan Konsultasi Perijinan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.16.7.4	Pelayanan Non Perijinan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.16.7.5	Pelayanan Fasilitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
17		500.17	PERTANAHAN					
			500.17.1	Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.17.2	Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan				

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.17.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.17.2.2	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.17.2.3	Data dan Informasi Pertanahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.17.2.4	Advokasi dan Pengendalian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.17.3	Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah					
				500.17.3.1	Penatagunaan Tanah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				500.17.3.2	Data dan Pemetaan Tematik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				500.17.3.3	Penguatan Atas Tanah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			500.17.4	Sengketa Tanah					
				500.17.4.1	Pengkajian dan Penanganan Sengketa	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				500.17.4.2	Advokasi dan Pengendalian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
18		500.18	TRANSMIGRASI						

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			500.18.1	Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			500.18.2	Penyediaan Tanah Transmigrasi					
			500.18.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah		Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.18.2.2	Pengurusan Legalitas Tanah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				500.18.2.3	Dokumentasi Pertanahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				500.18.2.4	Advokasi Pertanahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
			500.18.3	Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi					
				500.18.3.1	Penyiapan Lahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				500.18.3.2	Penyiapan Sarana	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				500.18.3.3	Penyiapan Prasarana	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				500.18.3.4	Evaluasi Kelayakan Permukiman	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			500.18.4	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi					
				500.18.4.1	Penyiapan Calon Transmigrasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				500.18.4.2	Penyiapan Perpindahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.18.4.3	Pelaksanaan Perpindahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				500.18.4.4	Penataan dan Adaptasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			500.18.5	Partisipasi Masyarakat					
				500.18.5.1	Promosi dan Motivasi	Biasa	Penggunainter nal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.18.5.2	Kerjasama Kelembagaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				500.18.5.3	Kerjasama Antar Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				500.18.5.4	Pelayanan Investasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
			500.18.6	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi					
				500.18.6.1	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				500.18.6.2	Bina Sistem Informasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				500.18.6.3	Perencanaan Pengembangan Kawasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.18.6.4	Perencanaan Pengembangan Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.18.6.5	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
			500.18.7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat					
				500.18.7.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.18.7.2	Fasilitas Sosial Budaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.18.7.3	Pengembangan Kelembagaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				500.18.7.4	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.18.8	Pengembangan Usaha					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.18.8.1	Kewirausahaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.18.8.2	Produksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.18.8.3	Pengolahan Hasil dan Pemasaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.18.8.4	Lembaga Ekonomi dan permodalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.18.9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan					
				500.18.9.1	Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.18.9.2	Pengembangan Sarana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.18.9.3	Pengembangan Prasarana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.18.9.4	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			500.18.10	Penyerasian Lingkungan					
				500.18.10.1	Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.18.10.2	Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				500.18.10.3	Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				500.18.10.4	Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
VII	600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN							
1		600.1	PEKERJAAN UMUM						
			600.1.1	Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit pengolah terkait
			600.1.2	Penatagunaan Sumber Daya Air					
				600.1.2.1	Perencanaan Wilayah Sungai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				600.1.2.2	Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.1.2.3	Pemanfaatan Sumber Daya Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.2.4	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.2.5	Pengaturan dan Pemantauan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
			600.1.3	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air					
				600.1.3.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.1.3.2	Manajemen Mutu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.3.3	Informasi dan Data Sumber Daya Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.3.4	Keterpaduan Pemrograman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.1.4	Pengelolaan Sumber Daya Air					
				600.1.4.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.4.2	Pengelolaan Irigasi dan Rawa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air					
				600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.1.5.5	Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.1.6	Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional)					
				600.1.6.1	Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				600.1.6.2	Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.1.6.3	Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				600.1.6.4	Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				600.1.6.5	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
			600.1.7	Pengembangan Jaringan Jalan					
				600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			600.1.8	Pembangunan Jalan					
				600.1.8.1	Standar dan Pedoman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.8.2	Manajemen Konstruksi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				600.1.8.3	Pengelolaan <i>Gedometrik</i> , Perkerasan, dan Drainage	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.8.4	Pengelolaan <i>Geoteknik</i> dan Manajemen Lereng	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.1.9	<i>Preservasi</i> Jalan					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.1.9.1	Standar dan Pedoman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.9.2	Perencanaan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.1.10	Pengelolaan Jembatan					
				600.1.10.1	Standar dan Pedoman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.10.2	Perencanaan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.1.10.3	Teknik Jembatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
			600.1.11	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah					
				600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.1.12	Pengaturan Jalan Tol					
				600.1.12.1	Persiapan pengusahaan jalan tol	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.12.4	Pengambilalihan hak perusahaan jalan tol	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.1.13	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman					
				600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
			600.1.14	Pengembangan Kawasan Permukiman					
				600.1.14.1	Perencanaan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.14.5	Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.1.15	Pembinaan Penataan Bangunan					
				600.1.15.1	Perencanaan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.1.15.5	Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.1.16	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					
				600.1.16.1	Perencanaan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.16.3	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.1.16.5	Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.1.17	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman					
				600.1.17.1	Perencanaan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.17.5	Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.1.17.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.1.18	Pemantauan dan Evaluasi		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
2		600.2	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN						

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			600.2.1	Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.2.2	Perencanaan Pembiayaan Perumahan					
				600.2.2.1	Keterpaduan Perencanaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.2.2.2	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.2.2.3	Kemitraan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
			600.2.3	Pola Pembiayaan Perumahan					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.2.3.1	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.2.3.2	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.2.3.3	Pola Investasi Perumahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.2.4	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan					
				600.2.4.1	Sumber Pembiayaan Primer	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.2.4.2	Sumber Pembiayaan Sekunder	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.2.4.3	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.2.4.4	Sistem Pembiayaan Perumahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.2.4.5	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.2.5	Perencanaan Penyediaan Perumahan					
				600.2.5.1	Keterpaduan Perencanaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.2.5.2	Analisa Teknik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.2.5.4	Kemitraan dan Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.2.6	Penyediaan Rumah Susun					
				600.2.6.1	Perencanaan Teknik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.2.6.2	Penyediaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.2.6.4	Pengelolaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.2.7	Penyediaan Rumah Khusus					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.2.7.1	Perencanaan Teknik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.2.7.5	Perencanaan Teknik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.2.8	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial					
				600.2.8.1	Perencanaan Teknik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.2.9	Investasi Infrastruktur					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.2.9.4	Pasar Infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.2.10	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi					
				600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				600.2.10.2	Kontrak Konstruksi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				600.2.10.4	Manajemen Mutu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.2.11	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi					
				600.2.11.1	Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.2.12	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi					
				600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.2.12.2	Penerapan Kompetensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			600.2.13	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi					
				600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
			600.2.14	Peningkatan Jasa Konstruksi					
				600.2.14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								merugikan siapapun.	
				600.2.14.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.2.15	Penerapan Teknologi Konstruksi					
				600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.2.15.2	Pengembangan Materi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.2.16	Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.2.16.1	Antar Sektor	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				600.2.16.2	Antar Wilayah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
			600.2.17	Pengembangan Kawasan Strategis					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.2.17.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				600.2.17.2	Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
			600.2.18	Pengembangan Kawasan Perkotaan					
				600.2.18.1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.2.18.2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.2.18.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan KotaKecil dan Pedesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.2.18.4	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
					Pembiayaan		eksternal	publik tidak merugikan siapapun.	
				600.2.18.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan InfrastrukturPerumahan Rakyat (PUPR)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.2.19	Pemantauan dan Evaluasi		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3		600.3	TATA RUANG (TATA KOTA)						
			600.3.1	Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.3.2	Perencanaan					
			600.3.2.1		Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			600.3.2.2		Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.3.2.3	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				600.3.2.7	Rencana Tekni Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			600.3.3	Pemanfaatan dan Pengendalian					
				600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.3.3.2	Ijin Pemanfaatan Ruang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.3.3.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.3.4	Pemetaan					
				600.3.4.1	Peta Dasar	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.3.4.2	Survey Pemetaan Ruang Darat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				600.3.4.3	Survey Pemetaan Ruang Air	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				600.3.4.4	Survey Pemetaan Ruang Udara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
4		600.4	LINGKUNGAN HIDUP						
						Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat	Unit Pengolah Terkait
			600.4.1	Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			internal dan eksternal serta penegak hukum	mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
			600.4.2	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.4.2.1	Inventarisasi, Penerapan <i>ekoregion</i> , dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			600.4.3	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor					
				600.4.3.1	Evaluasi Penerapan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.4.4	Ekonomi Lingkungan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.4.5	Dampak Lingkungan					
				600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.4.6	Pemantauan dan Pengawasan					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
						Biasa	Pengguna	Apabila diketahui	Unit pengolah
				600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak		internal dan eksternal	oleh publik tidak merugikan siapapun.	terkait
			600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan					
				600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana dan Jasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan pengendalianKerusakan Lahan					
				600.4.8.1	Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.8.2	Pemanfaatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.8.4	Keamanan Hayati	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat					
				600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.9.2	Rawa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.4.10	Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.4.10.1	Perangkat mitigasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim					
				600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim (antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.4.12	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun					
				600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.4.13	Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun					
				600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.4.14	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3					
				600.4.14.1	Pemantauan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.14.2	Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
			600.4.15	Pengelolaan Sampah					
				600.4.15.1	Pembatasan sampah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.15.2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.15.3	Pembentukan Dewan Adipura	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.15.4	Penetapan pemenang adipura	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.4.16	Hukum Administrasi Lingkungan					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.4.16.1	Pengelolaan dan pengembangan pengaduan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.16.2	Penataan hukum administrasi lingkungan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			600.4.17	Penyelesaian Sengketa Lingkungan					
				600.4.17.1	Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.4.17.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			600.4.18	Penegakan hukum pidana lingkungan					
				600.4.18.1	Penyidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.18.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.18.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.4.19	Komunikasi Lingkungan					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.4.20	Penguatan Inisiatif Masyarakat					
				600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.20.2	Kearifan Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.4.21	Peningkatan Peran Masyarakat					
				600.4.21.1	Masyarakat Perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.4.21.2	Masyarakat Pedesaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.4.22	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan					
				600.4.22.1	Organisasi Sosial Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.4.23	Data dan Informasi Lingkungan					
				600.4.23.1	Pengelolaan Data	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.23.2	Pengelolaan Informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.4.23.3	Pengembangan Perangkat Lunak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.23.4	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.4.24	Kelembagaan Lingkungan					
				600.4.24.1	Kelembagaan dan Tata Laksana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.24.2	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.4.25	Standarisasi dan teknologi					
				600.4.25.1	Standarisasi Manajemen dan Pengujian Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				600.4.25.2	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.25.3	Teknologi Ramah Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			600.4.26	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan					
				600.4.26.1	Pemantauan dan Kajian Kualitas Llingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				600.4.26.2	Laboratorium Rujukan dan Pengujian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
VIII	700	PENGAWASAN							
1		700.1	PENGAWASAN INTERNAL						
			700.1.1	Rencana Pengawasan					
				700.1.1.1	Rencana Strategis Pengawasan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
							internal dan eksternal serta penegak hukum	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
				700.1.1.2	Rencana Kerja Pengawas Tahunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				700.1.1.3	Rencana Kinerja Tahunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				700.1.1.4	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
				700.1.1.5	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
			700.1.2	Pelaksanaan Pengawasan					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Inspektorat
				700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Inspektorat
				700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Inspektorat
				700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Inspektorat

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsilembaga pemerintahan.	Inspektorat
				700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan <i>Review</i>	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				700.1.2.9	<i>Good Corporate Governance(GCG)</i>	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
IX	800	KEPEGAWAIAN							
1		800.1	SUMBER DAYA MANUSIA						

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			800.1.1	Penyusunan dan Penetapan KebutuhanAparatur Sipil Negara					
				800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, AnalisisKebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi (antara lain:Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN,Pertimbanganteknis penetapan formasi ikatan dinas)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				800.1.1.4	Standarisasi Jabatan (antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan,Klasifikasi Jabatan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				800.1.2.1	Formasi ASN (antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN , Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN (antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				800.1.2.5	Pengangkatan ASN	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				800.1.2.6	Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			800.1.3	Mutasi Pegawai					
				800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara,	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN			lembaga pemerintahan.	
				800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsilembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsilembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			800.1.4	Pengembangan Karir					
				800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				800.1.4.2	Penyesuaian ijazah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
							serta penegak hukum	pelaksanaan tugas dan fungsilembaga pemerintahan.	
				800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsilembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsilembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				800.1.4.5	Angka Kredit (antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara					
				800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				800.1.6.1	Kode Etik Pegawai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				800.1.6.2	Disiplin	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				800.1.6.5	Pemberhentian Sementara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				800.1.6.6	Pensiun ASN (antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Jada/Dudanya)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			800.1.7	Bantuan Hukum		Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsilembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai					
				800.1.8.1	Status Kepegawaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsilembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				800.1.8.3	Keberatan Pegawai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								fungsi lembaga pemerintahan.	
			800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian					
				800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			800.1.10	Pengawasan dan pengendalian					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsilembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsilembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			800.1.11	Administrasi Pegawai					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				800.1.11.2	Cuti Sakit	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				800.1.11.3	Cuti Bersalin	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								fungsi lembaga pemerintahan.	
				800.1.11.4	Cuti Tahunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				800.1.11.5	Cuti Alasan Penting	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				800.1.11.6	Cuti Besar	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsilembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsilembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								fungsi lembaga pemerintahan.	
				800.1.11.1 1	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				800.1.11.1 2	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/tunjangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsilembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			800.1.12	Kesejahteraan Pegawai					
				800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				800.1.12.3	Tabungan Perumahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				800.1.12.4	Bantuan Sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				800.1.12.5	Pakaian Dinas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				800.1.12.10	Rekam Medis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			800.1.13	Administrasi Perseorangan					
				800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								fungsi lembaga pemerintahan.	
				800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								fungsi lembaga pemerintahan.	
				800.1.13.4	Sekretaris Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				800.1.14	Penilaian Kompetensi				
				800.1.14.1	Penilaian Kompetensi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
2		800.2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
		800.2.1	Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah			Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		800.2.2	Pendidikan dan Pelatihan						
			800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				800.2.2.4	Modul-modul diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				800.2.2.5	Panduan fasilitator	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			800.2.3	Widyaiswara					
				800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			800.2.4	Penyelenggaraan Diklat					
				800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				800.2.4.5	Sistem informasi diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			800.2.5	Alumni		Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
X	900	KEUANGAN							
1		900.1	KEUANGAN DAERAH						

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)					
				900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			900.1.2	Penyusunan Anggaran					
				900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
			900.1.3	Pelaksanaan Anggaran					
				900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				900.1.3.2	Pendapatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				900.1.3.3	Belanja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				900.1.3.4	Pembiayaan Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				900.1.3.7	Daftar Gaji	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				900.1.3.8	Kartu Gaji	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				900.1.3.10	Laporan Keuangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri					
				900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (<i>Blue Book</i>)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (<i>Green Book</i>)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
				900.1.4.3	Dokumen <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> , dan dokumen sejenisnya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				900.1.4.4	Dokumen <i>Loan Agreemeent (PHLN)</i> (antara lain: <i>Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender</i>)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri (antara lain: usulan luncuran dana)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri (antara lain: Surat Perintah Pencairan Dana, SPMbeserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) antara lain : <i>No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA)</i>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				900.1.4.10	<i>Staff Appraisal Report</i>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				900.1.4.11	<i>Report /Laporan</i>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				900.1.4.13	<i>Completion Report/ Annual Report</i>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)					
			900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)		Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan					
				900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran KegiatanPembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya :(antara lain: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/ <i>Invoice</i> , Faktur Pajak, BuktiPenerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l. : <i>Copy</i> Faktur Pajak dan NotaKredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/ <i>Service Report</i> dan Berita Acara PenyelesaianPekerjaan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				900.1.7.3	Buku Rekening Bank	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri:(antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP),Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			900.1.8	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan					
				900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaranlainnya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda KeterlambatanMenyelesaikan Pekerjaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP				KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			900.1.9	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD (antara lain: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentangPerda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			900.1.10	Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu				

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				900.1.10.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giroBerkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasukPerubahan/Pergeseran/Revisin ya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			900.1.11	Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
				900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
								lembaga pemerintahan.	
				900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			900.1.12	Anggaran Daerah					
				900.1.12.1	Anggaran Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			900.1.13	Pendapatan dan Investasi Daerah					
				900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (antara lain: Fasilitas pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitas pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah (antara lain: Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, Penyiapan pelaksanaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah)				
				900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah (antara lain: Analisis, standarisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi dibidang pola pengelolaan keuangan badan layanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
					umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standarisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola				

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					pengelolaankeuangan badan layanan umum daerah)				
				900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan , Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaankekayaan dan investasi daerah)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				900.1.13.5	Pinjam Dan Obligasi Daerah (antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			900.1.14	Fasilitasi Dana Perimbangan					

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				900.1.14.1	Fasilitasi Dana Alokasi Umum (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				900.1.14.2	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar. Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				900.1.14.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam)				
				900.1.14.4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya (antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomikhusus dan dana transfer lainnya)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				900.1.14.5	Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan (antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis danaperimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan danaperimbangan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			900.1.15	Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah					
				900.1.15.1	Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturandaerah pertanggungjawaban keuangan daerah)				
				900.1.15.2	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasirancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangandaerah)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturandaerah pertanggungjawaban keuangan daerah)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli antara lain: penyiapan bahan bantuan keterangan ahli dibidang keuangan daerah, penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO